KRONIK SUKSESI

KERATON JAWA

1755 - 1989



KRONIK SUKSESI

KERATON JAWA

1755 - 1989

SUSILO HARJONO

JPP
JURUSAN POLITIK &
PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM

PolGov
RESEARCH CENTRE FOR POLITICS AND GOVERNMENT
Department of Politics & Government - FISIPOL UGM

KRONIK SUKSESI KERATON JAWA
1755 - 1989

Susilo Harjono

Penulis: Susilo Harjono
Kata Pengantar: Penerbit
Editor: Wigke Capri Arti
Sampul dan Tata Letak: Oryza Irwanto

Research Centre for Politics and Goverment
Jurusan Politik dan Pemerintahan
Universitas Gadjah Mada
Jl. Socio Yusticia 2 Bulaksumur, Yogyakarta 55281
www.jpp.fisipol.ugm.ac.id
email: polgov.ugm@gmail.com
Telp: +62 274 563365 ext.212

164 + xvii halaman
140 x 210 mm
ISBN 978-602-96762-8-0



Daftar Isi



Daftar Gambar, Tabel dan Diagram

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Diagram



KATA PENGANTAR

Buku yang diberi judul “Kronik suksesi Kraton Jawa tahun 1755-1989” ini memaparkan tentang hal yang dianggap tabu untuk dipertanyakan dan diutak-utik. Ketabuan ini mengakibatkan minimnya informasi mengenai suksesi pemerintahan Kraton Yogyakarta baik berupa informasi tertulis maupun tidak tertulis. Meski pun demikian, dengan kegigihan penulis yang merangkum data baik dari dokumen yang “rahasia” maupun dari wawancara mendalam secara personal dengan pihak-pihak internal Kraton menguatkan posisi buku ini sebagai buku penting yang patut untuk diperhitungkan untuk melihat realitas suksesi raja-raja Ngayogyakarta dari tahun 1755 hingga 1989.

Salah satu temuan penting yang dikupas dalam buku tulisan Susilo Harjono ini adalah adanya sifat suksesi raja-raja yang ternyata bersifat *fluid.* Ini artinya, suksesi pemimpin Kraton Ngayogyakarta tidak pernah *saklek* atau tertumpu pada aturan tertentu (*paugeran*) namun sangat cair sesuai dengan situasi dan kondisi politik dan ekonomi saat itu. Detail temuan ini diuraikan oleh penulis melalui gambar yang mudah dipahami dalam halaman 44. Sementara secara deskriptif, penulis menguraikannya dalam halaman demi halaman buku ini.

Buku penting tentang suksesi sistem pemerintahan "tradisional" di Indonesia ini merupakan salah satu karya skripsi terbaik mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM dalam minat studi 'Politik Lokal dan Otonomi Daerah'. Selain buku ini, JPP telah menerbitkan buku-buku yang termasuk dalam 3 skope minat studi yang lain yaitu Partai Politik dan Pemilu, Reformasi Birokrasi dan Sistem Integritas serta Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Meskipun dicetak dengan jumlah terbatas, skema penerbitan buku ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Praksis, JPP telah melaksanakan publikasi ini selama kurang lebih 5 tahun.

Penerbitan serial karya mahasiswa ini menjadi salah satu indiikator dari keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa JPP Fisipol UGM. Keberhasilan ini tidak saja mencakup dimensi pengajaran namun juga penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan amanat Tri Dharma Universitas Gadjah Mada. Pernerbitan serial karya mahasiswa ini juga dirancang demi berkembangnya budaya intelektual di kalangan mahasiswa sehingga dapat mendorong mahasiswa untuk melahirkan karya-karya akademik yang berkualitas yang layak diterbitkan dan disebarluaskan sehingga dapat dinikmati oleh para pembaca yang budiman.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan danm referensi para pembaca dalam memahami dunia pemerintahan, sosial dan politik di Indonesia. Selamat membaca!

Yogyakarta, Oktober 2012

Penerbit



DARI PENULIS

Bermula dari berpikir, semua menjadi ada. Barangkali itulah yang terjadi pada penulis atas sekelumit kisah penelitiannya. Tadinya, penulis berpikir bahwa skripsi tak beda dengan sebuah habitus yang datang dan pergi bagi mahasiswa UGM yang sudah memasuki "masa uzur" studi. Skripsi, baginya adalah ibarat mandi dan lalu berganti pakaian—sesuatu yang pasti dikerjakan entah senang ataupun terpaksa. Tak heran, purwarupa awal yang muncul hanyalah aktivitas mengurus surat ijin penelitian yang tak penting, mencari data sebanyak-banyaknya, lalu ditafsirkan sendiri dengan bantuan sederet buku-buku tua di perpustakaan. Niat penulis saat itu hanya satu: ingin segera lulus dari UGM karena cukup malu sudah dua kali menghadiri wisuda teman seangkatan.

Rupanya, pandangan ini pudar sesudah suatu larut malam di pertengahan tahun 2010 penulis mendapat cambukan keras dari Professor Purwo Santoso yang membimbing dengan tekun sedari awal.

"Saya tidak rela kalau penelitianmu hanya akan menambah barang antik di almari perpustakaan. Dapat nilai, lalu disimpan rapi oleh petugas

perpustakaan, lalu tiba-tiba kamu senang karena diwisuda sementara hasil jerih payahmu menulis untuk mendapat gelar sarjana dimakan rengat", hardik beliau.

Saya ingat pulang jam 12 malam waktu itu, dan menghabiskan dini hari dengan berpikir: oke akan aku buat sebagus-bagusnya! Dimulailah niat lebih serius untuk menggarap tulisan ini menjadi lebih seksi.

Menjelang akhir tahun 2010, semua sudah tampak terang. Koreksi detail keseluruhan naskah oleh Professor Purwo membuat saya heran—kadang sampai agak frustasi—karena persoalan diksi, kerangka serta alur pikir, tata bahasa, dan kejelasan maksud selalu saja ada yang salah. Di tengah suasana itu, tibalah hari-hari kelam di mana penulis mesti berhenti memikirkan penelitiannya akibat letusan Gunung Merapi 26 Oktober 2010. Tempat tinggal penulis yang hanya berjarak kurang lebih 15 kilometer dari bibir kawah kocar-kacir akibat material erupsi. Penulis terpaksa berstatus sebagai pengungsi bersama sekira 250.000 orang lain, menyingkir meninggalkan kampung halaman. Sesudah keadaan membaik di Tahun Baru 2011, penulis berniat mulai menggenjot kembali tulisannya. Sayang, sebagian arsip penelitian tak ditemukan selama ditinggal mengungsi. Helai demi helai, penulis menenun tulisannya kembali. Di bawah rasa malas dan semangat yang datang silih berganti, tulisan ini pun selesai jelang Ramadhan 2011.

Melalui penelitian ini, penulis ingin menyampaikan ke segenap pembaca tentang "wujud" dan "purwarupa" suksesi politik Raja-raja Jogja sejak Kesultanan dibangun. Tiga babakan besar tulisan ini

mengajak Anda semua untuk menikmati sedikit perbincangan politik berseling fakta sejarah mengenai tak seragamnya pola suksesi di Kraton Jogja. Tiga babakan dalam tulisan ini adalah pola suksesi yang sudah terjadi yang meliputi periode kerajaan dan periode Republik, pola suksesi yang terjadi pada masa ini (di masa Sultan HB X), serta pola suksesi yang akan terjadi di masa depan. Sesungguhnya, tulisan ini tak terkait langsung dengan polemik RUU Keistimewaan Jogja, namun mengingat status seorang HB X yang dianggap melekat pada jabatan kepala daerah, persoalan suksesi menjadi penting untuk di-benang merah-kan dengan polemik ini. Tentu, penulis tak pernah berniat apapun untuk memberikan wacana tertentu dengan tendensi pihak-pihak tertentu. Penulis menjamin penuh hal tersebut. Tulisan ini murni buah pikir akademik untuk menunjukkan bahwa ternyata pola suksesi di Jogjakarta ketika dipetakan menjadi sebuah narasi menampakkan "keistimewaan" purwarupa. Di sinilah penulis menjalani perannya sebagai "keran informasi" kepada publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Akhirnya, tak ada ungkapan lain selain rasa terima kasih kepada Professor Purwo Santoso yang selalu memberikan ruang kesabaran yang luar biasa, koreksi yang detail, lengkap, dan menyeluruh untuk semua dimensi naskah penulis ini. Tanpa kebaikan beliau, tak mungkin pula tulisan ini sampai di tangan pembaca sekalian. Teringat selalu beliau dengan penuh kesabaran sering sekali mengajak penulis datang ke rumahnya dan berdiskusi dari Isya hingga tengah malam, kadang beliau sampai terkantuk-kantuk dengan mata memerah. Acapkali pula beliau menyediakan waktu di pagi buta

dengan suguhan teh panas hanya untuk membicarakan naskah. Saya mesti angkat topi untuk semua kebaikan itu.

Mas AAGN Ari Dwipayana dan Mas Bayu yang memberikan perspektif baru, Mbak Azizah yang menjadi teman curhat, Mas Sigit Pamungkas dan Mas Achong yang menjadi teman ngobrol dan bercanda: terima kasih untuk Anda semua. Mbak Wigke, terimakasih sudah banyak membantu. Untuk Sudi, teman yang selalu menyediakan indekosnya untuk melepas penat, terimakasih banyak. Untuk Indra, Revan, Hendra, Uci, Ardhy, Denny, Laila, Wasis, Aminah, Ferdhi, Silvy, Keke, Sigid, dan Badai, yang menjadi teman seperjuangan.

Teristimewa adalah untuk Ferish, yang sejak awal, sedari nol, menjadi pendamping setia, memberikan nasihat-nasihat yang mendukung, dan selalu menjaga ketertautan hati yang sudah diikat. Bahagia sekali penulis dianugerahi wanita yang menjadi pendamping hidup bersahaja dan akan menggenapi separuh dari agamanya bersama penulis.

Kepada khalayak, selamat membaca!

Kaserat ing Ngayogyakarta,
18 Maret 2012

Penulis



MELACAK POLA SUKSESI RAJA-RAJA JOGJA

Ada Apa Dengan Suksesi Kraton Jogja?

Suksesi Raja-raja Jogja selalu menyisakan misteri. Menyibak tirai politik di Kraton Jogja, utamanya dalam persoalan suksesi, adalah sesuatu yang tak lazim. Ketidaklaziman ini disebabkan karena beberapa hal. *Pertama,* masyarakat Jawa tidak terbiasa untuk mempertanyakan sesuatu yang dianggap tabu dalam kehidupan sosial-politiknya. Pergantian tahta raja dikonstruksikan sebagai ruang misteri yang gelap dan tak boleh dijamah oleh publik. Hal ini menimbulkan keengganan publik untuk bertanya. *Kedua,* ada banyak sekali arsip yang memaparkan mengenai masa lalu suksesi yang terjadi di dalam kraton dalam berbagai bentuk. Akan tetapi karena berbagai sebab, tidak satu pun pihak yang mencoba untuk merangkai data-data itu menjadi sebuah bentuk yang dapat dibaca secara komprehensif.

Alhasil, hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan sejarah suksesi kraton yang bisa diketahui. Sisanya masih tersimpan dalam bentuk cerita tutur yang hanya beredar di lingkup kraton, terkubur dalam serat-

serat kuno yang sudah mulai hancur, tersimpan di museum dalam wujud surat-surat rahasia, atau tersembunyi dalam berbagai simbol yang belum tersibak di kompleks kraton yang sedemikian luas.[1] Sulit memang. Namun bagaimanapun juga harus dimulai upaya "ekskavasi politik" atas fenomena suksesi di Kraton Jogja. Keterbatasan data dan sumber yang sering sulit diverifikasi justru menjadi tantangan untuk menuliskan proses ilmiahnya.

Bermula dari sini, keingintahuan tentang suksesi menimbulkan pertanyaan lain dalam hati tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam proses pergantian tahta di Kraton Jogja. Selama ini kita hanya disuguhi dengan "hal-hal besar dan mengagumkan" tentang Kraton Jogja. Akan tetapi, sebagai manusia biasa, para Sultan Jogja tentu harus bertahan di antara riuhnya kontestasi politik di kraton. Soal suksesi tadi salah satunya. Cara raja memanajemen suksesi, dinamika politik yang melingkupinya, kuat tidaknya intervensi asing, dan dampak dari proses itu sangat minim diketahui oleh publik.

Persoalan di atas membawa tulisan ini pada fokus mengenai suksesi di Kraton Jogja. Ada dua relevansi untuk mengangkat tema ini. *Pertama,* suksesi di Kraton Jogja dianggap baku. Saya kurang sepakat dengan pernyataan ini sebab klaim ini hanya dipandang dari satu sudut saja yakni jenis kelamin raja. Hasilnya memang benar, seluruh Sultan Jogja adalah laki-laki. Namun jika

---

[1] Sejauh ini yang telah dilakukan adalah konservasi manuskrip milik Kraton Jogja. Sayangnya, upaya untuk mentransliterasikan naskah-naskah yang mengandung muatan sejarah politik kerajaan amat minim. Ada banyak alasan. Tiga alasan utama adalah soal dana, kompetensi ilmu dan akses terhadap naskah-naskah kraton.

ditarik ke sudut pandang pola suksesinya, saya rasa istilah "baku" tidaklah tepat adanya. Ini mengingat kecurigaan saya pada berbagai fakta yang terkuak dalam proses "ekskavasi politik" yang hanya menunjukkan sedikit sekali kesamaan pola suksesi sepanjang sejarah Kraton Jogja.

Kedua, proses naik turunnya Sultan Jogja tidak semata-mata tergantung pada bakunya *paugeran* (aturan adat) suksesi yang dianut.[2] Dalam *paugeran* dinyatakan dan diatur mengenai kapan raja boleh diganti, siapa yang berhak menggantikan, bagaimana cara memilih pengganti dan menilai kriteria yang dipersyaratkan, juga siapa yang memiliki otoritas atas pengaturan dan penyelenggaraan suksesi. Pertanyaannya, apakah sejauh ini, *paugeran* betul-betul menjadi satu-satunya faktor yang menentukan suksesi?

Jawabannya adalah: tidak sepenuhnya benar. Suksesi di Jogja menjadi sangat beragam oleh karena banyaknya faktor yang berpengaruh. Klaim bahwa suksesi di Jogja "lancar, tenang dan baku dari waktu ke waktu" tidak dapat dipertahankan karena sejarah sendiri mencatat fakta bahwa Kraton Jogja pernah dihancurkan dan dijarah oleh militer Inggris dalam pergolakan suksesi kerajaan. Pernah pula terjadi pergeseran dinasti ketika HB V wafat dengan tanpa penerus tahta. HB VII waktu itu juga pernah *lereh keprabon*, menyerahkan tahta secara mendadak di tengah jalan. Pada saat itu, *paugeran* kraton ternyata tidak menjamin keseragaman pola suksesi.

[2] *Paugeran Praja Kejawen* adalah seperangkat tata hukum di lingkungan kraton yang hingga sekarang tak pernah dikodifikasi secara utuh dan jelas, namun dianggap sebagai konstitusi baku dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan kerajaan.

Dengan demikian, apakah suksesi sejak HB I sampai HB X memang tak pernah seragam? Boleh jadi. Bukti awal menulis, dari lebih dari sepuluh kali suksesi yang terjadi di Kraton Jogja sejak tahun 1755, ragam politik yang terjadi cukup banyak. Sedari awal sejarah suksesi politik di Jogja, sebagian menimbulkan huru-hara militer, sebagian berbelok di arah yang tak seharusnya, sebagian lagi berjalan dengan intensitas konflik yang beragam. Penelusuran selanjutnya menunjukkan peta keragaman yang cukup signifikan.[3]

Saat ini, gejala akan hal itu mulai mengemuka kembali. Pembicaraan mengenai suksesi tengah hangat dan memunculkan diskursus baru karena raja yang sekarang bertahta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mewacanakan perubahan tradisi suksesi yang intinya membolehkan kaum perempuan duduk sebagai Raja Jogja. Hasilnya, muncul dua pihak yang berseberangan soal ini. Perdebatan mengenai ini akan mengisi ruang suksesi pada era HB X yang masih terus berproses dan belum mencapai hasil. Artinya, akan muncul peluang-peluang untuk terjadinya perubahan pola suksesi di masa depan.

Untuk itulah, kajian ini akan menarasikan keseluruhan rangkaian proses suksesi politik di *Kasultanan Ngayogyakarta* Hadiningrat sejak HB I sampai dengan HB X. Pelacakan sepanjang periode itu akan mengantarkan kita pada peta ragam pola suksesi. Satu

[3] Karenanya, sebagai asumsi awal, rasa-rasanya tidaklah sederhana jawaban atas pertanyaan besar di atas. Ini berdasar asumsi bahwa momentum suksesi adalah medium dan ajang bagi masing-masing elit yang berkepentingan untuk saling menunjukkan seberapa besar pengaruh dan kuasa yang dimiliki. Suksesi adalah arena kontestasi. Sebagaimana dengan aktor-aktor politik, arena itu sendiri tidaklah berwujud permanen dari waktu ke waktu. Pastinya akan ada perubahan-perubahan menyangkut suksesi di masing-masing jamannya.

demi satu suksesi dari raja ke raja berikutnya akan dipaparkan mengapa dan bagaimana itu terjadi secara politik. Sesudahnya, penekanan paparan akan banyak diletakkan dalam konteks saat ini di mana manajemen untuk menghadapi perubahan tengah digulirkan oleh HB X. Sebagai bumbu pemanis, analisis jangka panjang di seputar pergantian tahta dari penguasa sekarang, HB X, ke raja berikutnya akan disuguhkan juga dalam penelitian ini.

Perlu diketahui bahwa kajian mengenai proses suksesi pemimpin kerajaan sangatlah minim. Kalaupun ada, itu pun sebatas menarasikan ulang sejarah besar dari kerajaan yang bersangkutan. Masih jarang kajian yang secara khusus memandang suksesi di kerajaan dengan kacamata ilmu politik. Padahal, suksesi, tentu memuat fenomena politik yang paling pokok yakni kontestasi kekuasaan. Penelitian ini, nantinya, akan banyak menyoroti benturan-benturan tersebut. Itulah mengapa, suksesi kerajaan menjadi menarik untuk dibicarakan. Hasil akhir yang dikehendaki adalah terciptanya babaran yang cukup signifikan untuk melihat apa dan bagaimana suksesi di Kraton berjalan mengarungi zaman dengan sekian ragam dan varian yang ada di masing-masing periode.

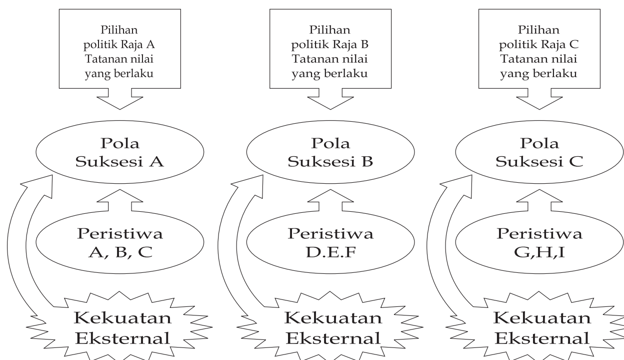
Ngumpulake Balung Pisah: Narasi Ilmiah Peta Suksesi Di Kraton Jogja

Pola suksesi tak ubahnya pola kain batik. Dengan mengamati secara detail mengenai warna dan ragam hiasnya kita bahkan bisa menebak bahwa selembar kain batik itu apakah bercorak Jogja dengan motif *Parang Gurdha,* atau corak Solo dengan motif *Udan Riris*. Bagi

pola suksesi, hal tersebut paralel: hampir pasti selalu ada cerita berbeda di tiap-tiap zaman, selain pula ada hal sama yang berlaku dari waktu ke waktu. Perbedaan dan persamaan yang ada itulah yang akan diekskavasi untuk kemudian dapat dirangkai menjadi pola-pola tertentu. Pola-pola yang sudah didapatkan itulah yang bisa kita baca sebagai pola suksesi. Bagaimana pola-pola suksesi di Kraton Jogja bisa dibaca sedemikian rupa? Kita akan membacanya melalui *frame* berikut.

Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti corak, sesuatu yang dipakai sebagai contoh, sistem, cara kerja sesuatu, atau bentuk. Pergantian elit, penguasa, atau pemimpin kerajaan mengikuti pola tertentu berdasarkan dominasi tradisional yang biasanya kaku (Haryanto 2005: 146). Pun demikian hal tersebut bisa saja berubah oleh sesuatu yang mengintervensi ke dalam diri elit. Akibatnya, muncul variasi pola suksesi. Pola suksesi yang berganti dipengaruhi oleh keberadaan variabel lain yang terkait dengannya. Lihat diagram berikut:

Diagram 1.1. Hubungan Antar Faktor Yang Mempengaruhi Ragam Suksesi



Kita mesti memahami terlebih dahulu bahwasanya sirkulasi elit di lingkup Kraton Jogja bersifat sangat terbatas. Keterbatasan ini meliputi arena kontestasi yang hanya terjadi di dalam kraton dan dengan pelaku yang hanya terdiri dari keturunan para Sultan. Perlu diingat bahwa konvensi suksesi yang selama ini berlaku hanya memperkenankan keturunan lelaki raja saja yang berhak menggantikan tahta. Permaisuri, menantu raja, pejabat tinggi kerajaan, apalagi rakyat tidak masuk dalam kategori pelaku. Secara umum, ini yang disebut oleh Kolabinska sebagai sirkulasi elit yang hanya berlaku bagi elemen-elemen pokok dalam lingkaran *the governing elite* (Haryanto 2005: 90).

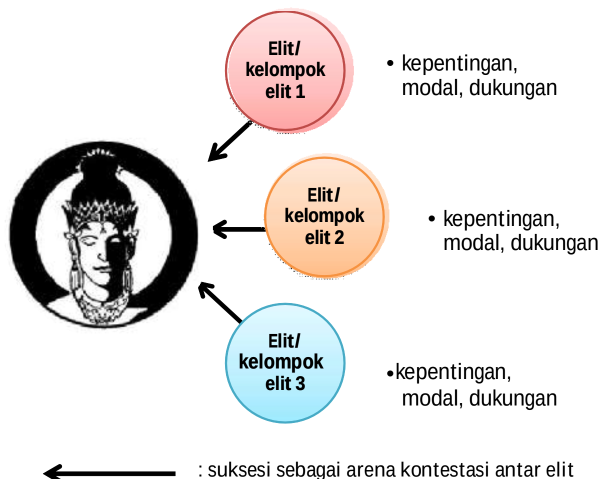
Lalu, bagaimana kita dapat membaca sumber pokok yang menyebabkan lahirnya pola-pola suksesi tertentu sebagaimana diagram di atas? Suksesi adalah arena politik dan karenanya elit-elit yang memangku hajat dan kepentingan akan melakukan tindakan sesuai dua hal ini. Kepentingan pokok dalam suksesi di Kraton Jogja berasal dari dua pelaku yakni masing-masing Sultan yang berkuasa dan adanya pihak eksternal. Kepentingan-kepentingan itu adalah:

1. Kepentingan bagi Sultan untuk menjamin stabilitas internal keluarga,
2. Kepentingan untuk memastikan tahta berlanjut sesuai garis darah langsung,
3. Kepentingan Sultan dan anggota dinasti untuk mendapatkan penerus tahta yang cakap dan berkualitas, serta
4. Kepentingan Pemerintah Kolonial untuk menjamin suksesi tidak menimbulkan instabilitas

di bidang politik, militer, ekonomi, dan sosial. Tipologi Pemerintah Kolonial yang notabene penjajah sekaligus pelaku bisnis tentu tak akan membiarkan kerugian menimpa dirinya.

Kepentingan-kepentingan pokok di atas menjadikan proses suksesi di Kraton Jogja tidak pernah berjalan dalam pola yang sama. Khusus untuk suksesi yang terjadi sesudah Kraton berintegrasi dengan Republik Indonesia, kepentingan Pemerintah Kolonial otomatis sudah tidak ada. Melalui pengaruh demokrasi modern, kepentingan ini tak lagi melekat pada institusi pemerintah namun terpecah-pecah secara personal ke dalam kepentingan elit-elit politik di tingkat lokal sebagaimana diagram berikut ini:

Diagram 1.2. Elit dan Kontestasi Elit di Kraton Jogja



Dari diagram pola suksesi di bagian awal tadi, kita menemukan tiga hal utama yakni intervensi kekuatan eksternal, tatanan nilai yang berlaku, dan pilihan politik raja. Mari kita lihat lebih detail. *Pertama,* pentingnya kekuatan eksternal menjadi hal yang signifikan mengingat posisi Kraton Jogja sejak awal bukanlah wilayah yang berdaulat secara murni. Kraton Jogja, dan kerajaan lain di wilayah *Vorstenlanden,* adalah vasal[4] dari Pemerintah Kolonial menurut Perjanjian 11 Desember 1749. Karenanya, kebijakan politik yang diterapkan akan sangat bergantung dari adanya intervensi pihak ketiga. Raja berkepentingan untuk mempertahankan restu politik Pemerintah Kolonial dan legitimasi publik (kesetiaan primordial dari elit lain dan rakyat luas) (Sjamsuddin 1991).[5]

Kedua, tatanan nilai memberikan ruang terbatas baik bagi raja, elemen-elemen dinasti Kesultanan, dan pihak eksternal dalam bermanuver. Tatanan nilai ini sekarang disebut sebagai *Paugeran Praja Kejawen* yang lebih merupakan seperangkat hukum dan kode etik tak tertulis yang mengatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan kraton. Uniknya, ia dianggap sebagai hukum positif yang berlaku tanpa batasan waktuyang tegas. Dalam analisis yang lebih mendalam, kita bisa melihat bahwasanya tatanan nilai ini cenderung menjadi faktor yang paling stabil dan tak banyak mengalami perubahan sejak Kraton Jogja berdiri. Bisa dikatakan bahwa jika di setiap zaman faktor intervensi eksternal

[4] Negara taklukan, negara bagian.

[5] Nazaruddin Sjamsuddin menambahkan dengan penjelasan bahwa kesetiaan primordial itu cepat atau lambat akan rapuh asalkan tidak terjadi provokasi dari elit yang justru menyebabkan diskontinuitas alur sejarah dalam masyarakat.

dan pilihan politik raja selalu berubah, tidak demikian dengan *paugeran*. Ini membuat *paugeran* tidak bisa dikesampingkan dalam setiap proses suksesi.

Ketiga, pentingnya momentum atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masing-masing kehidupan para Sultan Jogja menjadi faktor pendorong bagi berubah atau tidaknya intervensi eksternal dan pilihan politik Sultan. Artinya, ada fenomena yang melatarbelakangi perubahan dua faktor tersebut. Hal ini menempatkan momentum sebagai salah satu faktor yang cukup signifikan bagi beragamnya pola suksesi.

Keempat, pilihan politik raja menjadi penanda babak akhir yang akan menentukan hasil dari proses suksesi. Tatanan nilai serta intervensi pihak eksternal mempengaruhi hasil akhir pilihan politik raja dalam menentukan arah suksesi. Itu mengapa, saya menempatkan faktor pilihan politik raja sebagai hal pokok yang menentukan suksesi. Toh begitu, ketiganya saling berkaitan dan tidak berlaku sebagai faktor independen. Saya memparalelkan hal tersebut dengan reaksi dalam ilmu kimia. Sekian banyak unsur kimia, jika masing-masing direaksikan dalam kuantitas yang berbeda-beda akan menghasilkan senyawa yang berbeda pula.

Faktor-faktor yang saya sebut dalam diagram di atas merupakan faktor yang merestriksi proses suksesi. Merestriksi dapat diderivasikan sebagai sesuatu faktor yang mampu memotong (menganulir), menghambat, memperlama, atau malah mendorong (mendukung) proses suksesi raja. Faktor-faktor yang mempengaruhi

variasi model dan pola suksesi di Kraton Jogja dalam kajian ini ditampilkan sebagai keadaan spesifik yang menjadikan sedemikian rupa sehingga proses suksesi berjalan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Saya menyebutnya empat pilar faktor. Hal ini bisa demikian karena baik dinamika internal elit maupun ketiga faktor tadi tidak memiliki kesamaan elevasi di setiap momen suksesi. Kecuali tatanan nilai, semuanya berubah dan memiliki pengaruh yang berbeda sehingga melahirkan variasi yang berbeda pula. Kita akan melihat lebih jauh tentang bagaimana suksesi di Kraton Jogja berlangsung sejak awal, lalu kita akan mencoba memetakan bagaimana suksesi di masa depan akan terjadi. Bab-bab berikutnya akan mengulas persoalan penting itu secara gamblang. Mari kita lihat!



PANCA WARNA POLA SUKSESI RAJA JOGJA

"Model suksesi di Kraton Jogja beda-beda, kalau kita lihat kembali sejak HB I proses itu tidak serupa. Filosofinya memang sama, tetapi konteks zaman menjadikannya bervariasi dari satu Sultan ke Sultan lainnya"

(KRT Jatiningrat, Pengageng Tepas Dwarapura Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat)

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (selanjutnya akan disebut Kraton Jogja saja) kaya akan pengalaman politik. Di bawah tekanan politik penjajah yang intens, suksesi penguasanya berlangsung dalam wajah yang berbeda-beda. Variasi pola ini mengerucut pada beberapa tipologi suksesi Raja Jogja yang lebih spesifik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya secara gradual. Kita akan melihat persoalan penting tersebut secara lebih jelas dalam argumentasi pada bab ini. Kita akan memulainya dengan berbicara mengenai Jogja dalam konteks sekuensi awal sejarah politiknya.

Wajah Politik Tahta Yogya

Pergeseran Kekuasaan Pasca Traktat Giyanti

Jogja, juga Solo, adalah buah dari konflik sedarah selama puluhan tahun. Perpecahan keluarga yang melahirkan Kraton Jogja dan Kraton Solo terjadi di masa kekuasaan Pakubuwono II (PB II) dan mencapai klimaks di masa PB III. Perpecahan ini lebih dikenal dengan nama Perang Suksesi III Jawa. Kala itu, Dinasti Mataram Islam masih utuh di bawah pemerintahan PB II dengan kekuasaan yang terbentang di hampir seluruh Jawa dan Madura. Oleh sebab Perjanjian Ponorogo tahun 1743 yang dianggap menggadaikan tanah air, Pangeran Sambernyawa mengawali peperangan terhadap PB II dan VOC (Meinsma, J. H. 1949: 30-34 dan Soekanto 1952: 6-7).[6] PB II berjanji akan memberikan 3000 cacah tanah Sukowati (Sragen saat ini) bagi sesiapa yang berhasil menumpas pemberontakan itu.

Mangkubumi, adik PB II, sanggup. Ia berhasil menumpasnya. Namun karena hasutan dari patih kerajaan, Pringgalaya, yang juga didorong oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, PB II ingkar janji. Raja hanya mau memberikan 1000 cacah, seraya dipermalukan oleh Gubernur Jenderal di hadapan umum. Mangkubumi pun berbalik memerangi PB II dan bergabung dengan Sambernyawa. Di tengah kecamuk perang, PB II jatuh sakit. Dalam keadaan lemah 9 hari jelang kematian, PB II menandatangani naskah Perjanjian 11 Desember 1749 di

[6] Sebab khusus konflik sebenarnya bermula dari rasa dendam Pangeran Sambernyawa atas konspirasi politik antara Patih Danurejo, janda Sri Susuhunan Amangkurat, dan Kompeni, yang menimbulkan pembuangan ayahnya, Pangeran Arya Mangkunegara, ke Srilanka atas tuduhan berselingkuh dengan salah satu istri PB II. Tuduhan itu, bagaimanapun juga, tak pernah bisa dibuktikan oleh pejabat kraton maupun Belanda.

hadapan Gubernur Baron van Hohendorff yang menyatakan bahwa seluruh Kerajaan Mataram diserahkan sepenuhnya kepada VOC (dalam teks asli naskah perjanjian dipergunakan frase *hangutjulaken sarta hanrahaken*).[7]

Kini, Mangkubumi memerangi kemenakannya sendiri, PB III, anak PB II. Kecakapan militer Mangkubumi kini telah menjadikannya panglima perang atas puluhan ribu bala tentaranya (Moedjanto, G 2002:116).[8] Kota-kota dan lahan pertanian di Pulau Jawa telah rusak berat akibat kecamuk perang yang berlangsung sepanjang 9 tahun. VOC yang terdesak di berbagai medan pertempuran pun mulai frustasi lalu menawarkan kesepakatan damai. Di sinilah akhirnya, melalui traktat politik Giyanti 1755, Mataram dibelah menjadi dua bagian yang hampir sama, wilayah barat diserahkan pada Mangkubumi, wilayah timur diserahkan kepada Pakubuwono III. Pembagian ini dikenal dengan *Palihan Nagari*.

Mangkubumi kini menjadi raja atas wilayah yang di masa silam disebut sebagai Garjitawati, sedang Pakubuwono III berkuasa di wilayah yang dahulu disebut Pajang. Wilayah Mataram ini oleh Mangkubumi diberi nama *Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat* (DIY saat ini), dan ia naik tahta sebagai raja pertama dengan sebutan Sultan Hamengku Buwono I dan menggenapi sanjungan yang

---

[7] Frase *hangutjulaken sarta hanrahaken* dalam naskah Perjanjian 11 Desember 1749 bila diindonesiakan memang berarti menyerahkan, namun makna itu sampai saat ini masih diperdebatkan banyak pakar dalam konteks historisasi keruntuhan Kerajaan Mataram Islam di Jawa.

[8] Bahkan memasuki tahun 1750, ia telah memiliki 60.000 pasukan terlatih.

dialamatkan pujangga Yasadipura I kepadanya: *ingkang tuhu Narendra mandireng hamangku tlatah ing Nuswa Jawa*.

Kelanjutan Politik: 264 Tahun Pergantian Tahta

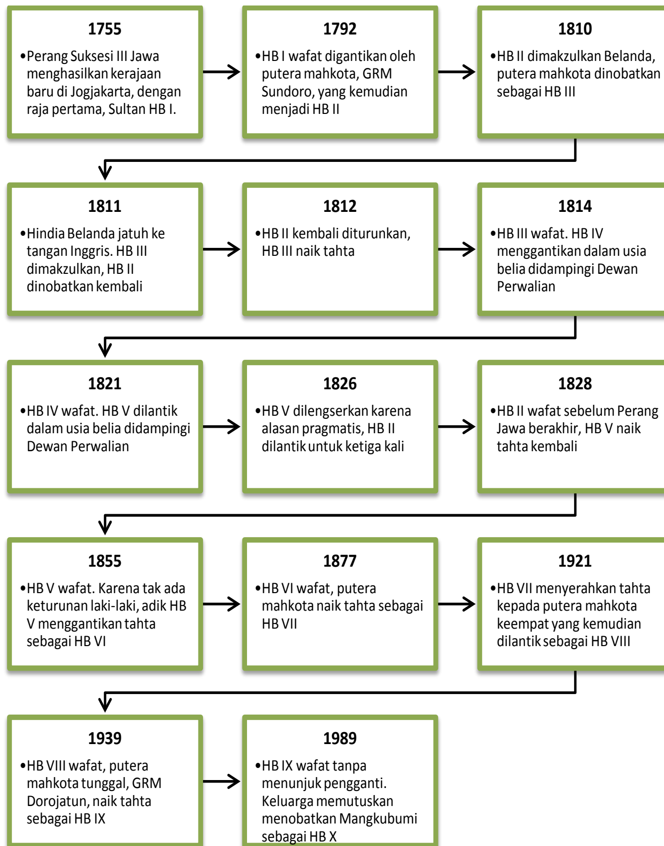
Kurang lebih 200 tahun sesudah Traktat Giyanti ditandatangani, Jogjakarta memasuki era baru di mana raja yang berkuasa memutuskan untuk meleburkan kerajaan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Muncul suasana dan konteks politik yang berbeda sejak momentum integrasi ini. Namun, perubahan era tak mengubah status politik kraton. Ketika berdiri, kraton adalah vasal dari Belanda, lalu berpindah ke tangan Inggris, diserahkan kembali ke Belanda, kemudian jatuh ke tangan Jepang, dan akhirnya melekat ke pangkuan RI hingga kini. Karenanya bisa dikatakan bahwa sejak berdiri, Jogjakarta berstatus sebagai kerajaan yang berdaulat secara terbatas. Bila dirangkum, hal ini dapat digambarkan dengan ilustrasi berikut:

Gambar 2.1. Arus Perubahan Status Politik Kraton Jogja Sejak Berdiri



Gambar 2.1 sekuensial di atas penting ditinjau mengingat salah satu aspek penting dalam setiap pergantian tahta adalah hadirnya entitas politik yang lebih tinggi yang berkepentingan dalam ruang itu. Gambar ini sekaligus menunjukkan eksistensi kekuatan eksternal yang memberikan pengaruh cukup signifikan dalam proses suksesi. Meski berdiri sebagai kerajaan yang "berkedaulatan politik secara terbatas", kondisi ini tak memberikan perubahan signifikan atas asas dasar hukum pewarisan tahta. Dua ratus enam puluh tahun berlalu dan tahta tetap berlanjut. Proses transfer estafet kekuasaan raja di Jogja sepanjang periode itu dapat dilihat dalam kronogram berikut ini:

Diagram 2.1. Momentum Suksesi di Kraton Jogja Dalam Babakan Waktu



Dengan melihat secara sekilas urutan sekuensial pergantian tahta di Kraton Jogja tadi, kita dapat melihat kecenderungan tipe-tipe perbedaan yang khas. tentu ada faktor yang menjadikan proses itu menjadi berbeda. Sejauh ini kita akan membaca perbedaan-perbedaan itu agar dapat kita gunakan untuk mengkodifikasi dan menganalisnya sehingga memunculkan pola tertentu.

Namun kita perlu menganalisis basis kategorisasi untuk dapat membacanya dengan baik. Tabel berikut ini akan memandu kita dalam memberikan kategorisasi-kategorisasi tertentu. Mari kita lihat terlebih dahulu acuan basis pembedaannya.

Tabel 2.1 Basis Kategorisasi Pola Suksesi Raja-Raja Jogja

	Momentum Suksesi								
	HB I – HB II	HB II – HB III	HB III – HB IV	HB IV – HB V	HB V – HB VI	HB VI – HB VII	HB VII – HB VIII	HB VIII – HB IX	HB IX – HB X
A. **Faktor Internal**									
Acuan sosiologis: gradasi konflik (kontestasi kekuasaan)	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Acuan hukum adat: berjalannya *Paugeran* suksesi secara normal	Normal	Normal	Tidak Normal	Tidak Normal	Tidak Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Acuan elit pelaku: adanya ruang otonomi raja	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
B. **Faktor Eksternal**									
Acuan tingkat intervensi Kolonial atas putera mahkota	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	-
Acuan tingkat intervensi Kolonial atas raja yang bertahta	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	-
Acuan tingkat intervensi elit pusat/daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	Sedang

Dari tabel di samping, kita memahami bahwa ada pola suksesi yang normal dan tak normal. Bagaimana kedua pola besar itu dapat dijelaskan secara lebih detail lagi. Kita akan melihatnya dalam analisis mendalam seperti akan dipaparkan berikut.

RAGAM POLA SUKSESI

Suksesi Normal (Mblarak Sempal)

Kita mesti memahami terlebih dahulu mengenai bagaimana acuan suksesi dapat dikatakan normal. Suksesi normal, berdasar tabel acuan di atas, merujuk pada kondisi-kondisi berikut:

1. Pola pewarisan tahta jatuh dari ayah kepada anak lelaki yang memang sejak awal diposisikan sebagai calon penerus tahta.
2. Tahta yang ditinggalkan oleh Sultan yang mangkat dilanjutkan oleh pewaris tahta yang sudah dewasa.
3. Tidak terjadi konflik yang terlalu mengemuka yang membuat stabilitas politik kraton terganggu.

Melihat hal di atas, maka yang dimaksud dengan proses suksesi normal adalah proses pergantian tahta berlangsung damai, yakni dari ayah kepada anaknya, relatif tanpa melalui dinamika politik yang tajam. Disebut sebagai suksesi mblarak sempal oleh karena suksesi ini berlangsung secara wajar dan alami (on the track). Blarak sempal berarti pelepah daun kelapa yang jatuh oleh karena ia memang sudah kering, lalu terlepas dari batang pohon dengan sendirinya. Suksesi tipe ini terjadi ketika pergantian tahta dari HB VI ke HB VII tahun 1877, suksesi HB VIII ke HB IX tahun 1939, dan suksesi dari HB IX ke HB X tahun 1989. Satu demi satu, kita akan melihat detailnya

Suksesi dari HB VI ke HB VII



Tak banyak literatur yang dapat digali secara mudah dan mampu memberi referensi mengenai hari-hari pemerintahan HB VI sampai dengan wafatnya. Tercatat hanya ada sedikit arsip antara lain *Babad Ngayogyakarta: Hamengkubuwana V dumugi VII* dan dua naskah beredaksi sama, *Babad Ngayogyakarta: Hamengkubuwana VI*. Berbeda dengan kenaikan tahta ayahandanya yang menyimpang dari kondisi normal, HB VII naik tahta dalam suasana yang relatif damai. Tak ada referensi yang secara khusus merekam proses pergantian tahta dari HB VI ke HB VII. HB VI sendiri tercatat memiliki dua permaisuri. Permaisuri pertama, GKR Kencono tak memberikan keturunan laki-laki. Garis penerus tahta justru didapatkan dari permaisuri kedua, GKR Sultan. Darinya lahir GRM Murtedjo yang kelak menggantikan tahta.

Sesudah berakhirnya masa-masa kelam di era HB V, Jogjakarta di bawah HB VI mulai relatif stabil. HB VI telah mewarisi kedamaian wilayah kekuasaannya sejak Perang Jawa berakhir 15 tahun sebelum ia naik tahta. Tak heran, perkembangan dunia sastra dan ekonomi mulai

berjalan stabil sejak masa ini. Sultan HB VI yang lahir pada 4 Februari 1839 memerintah Jogjakarta sampai dengan tahun 1877, sesudah wafat pada usia 56 tahun. Putera mahkotanya, GRM Murtedjo, naik tahta pada 13 Agustus 1877.

Suksesi dari HB VIII ke HB IX



Hamengku Buwono VIII adalah sosok raja yang unik. Kegagalan ayahandanya hingga tiga kali berturut-turut dalam proses kaderisasi calon raja membawanya pada semangat membangun kraton dalam tatanan baru seiring dengan arus modernisasi yang gaungnya makin deras. Kegagalan itu rupanya memberinya ilham dan pelajaran yang sangat berharga atas realitas pengelolaan suksesi politik raja.

Rupanya HB VII tak salah pilih, sebab HB VIII yang dianggap titisan Dewa Wisnu adalah raja yang visioner. Hampir seluruh anak lelaki utamanya dikirimkan ke sekolah-sekolah modern. Sang putera mahkotanya, GRM Dorojatun, dikirimnya ke Negeri Belanda untuk mengenyam pendidikan di Rijksuniversiteit, Belanda. Kebijakan ini kelak akan menjadi batu pijakan

pembentukan sikap nasionalisme penerus tahtanya yang akan berdampak besar bagi berdirinya Republik Indonesia.

Suksesi politik yang mengiringi naiknya Hamengku Buwono IX menjadi cerita menarik tersendiri. HB VIII hanya memiliki seorang putera lelaki dari permaisurinya.[9] GRM Dorojatun namanya. Sesudah hampir 9 tahun Dorojatun berada di Belanda untuk mengenyam studi di Universitas Leiden, tiba-tiba ia dipanggil pulang oleh ayahandanya. HB VIII memang belum berusia terlalu lanjut, ia baru 59 tahun. Namun penyakit diabetes yang dideritanya menjadikan ia terlampau lemah, dan ketika ia mulai mendapatkan firasat bahwa ajalnya telah dekat, seluruh puteranya dipanggilnya pulang. Dorojatunlah yang diutamakan untuk segera kembali ke Jogja.

Segera sesampainya di Tanjung Priok pada paruh Oktober 1939, Dorojatun terkejut dengan sikap penuh hormat seluruh anggota keluarganya yang ikut menjemput di dermaga. Pertanda suksesi sudah tampak sejak awal. Mereka berbahasa *krama hinggil* kepadanya seraya menaruh sembah hormat tiap kali berbicara kepadanya. Lalu seluruh keluarga kraton tinggal untuk sementara di Hotel des Indes (sekarang menjadi kompleks Pertokoan Duta Merlin). Di salah satu kamar hotel inilah terjadi peristiwa politik penyerahan keris pusaka Kyai Joko Piturun dari tangan HB VIII kepada

[9]Seumur hidupnya, HB VIII hanya memiliki seorang permaisuri. Itu pun ia nikahi ketika ia masih berstatus sebagai putera mahkota. Itu mengapa, permaisuri bergelar KRAy Adipati Anom Hamengkunegoro. Namun, persoalan rumah tangga menjadikannya pisah ranjang dengan raja. Darinya, lahir satu-satunya putera mahkota, GRM Dorojatun, yang kelak akan bergelar HB IX.

Dorojatun. Dengan penyerahan keris pusaka itu, menjadi jelaslah maksud HB VIII bagi Dorojatun dan seluruh kerabat kraton: Dorojatunlah yang kelak akan melanjutkan tahta.

Ketika dalam perjalanan pulang menuju Jogja, HB VIII jatuh sakit, dan diputuskan untuk segera dibawa menuju Rumah Sakit Onder de Bogen (sekarang RS Panti Rapih Jogjakarta). Ketika tubuhnya yang sudah pingsan sedari Cirebon diturunkan dari kereta api, mendadak muncullah petir dengan suara menggelegar di langit Jogjakarta. Mengingat cuaca pada waktu itu jelas-jelas siang hari yang cerah, merupakan suatu keganjilan tersendiri dengan hadirnya petir tersebut.[10] Akhirnya, tepat di pagi buta pada hari yang sama dengan wafatnya Hamengku Buwono I, Sultan HB VIII meninggal dunia sesudah koma selama berjam-jam.

Sesudah HB VIII dinyatakan wafat, Gubernur Lucien Adam mengambil alih untuk sementara atas kekuasaan Kraton Jogja. Mengadopsi dari pembentukan Dewan Perwalian di masa penobatan HB IV dan HB V, maka dibentuklah sebuah panitia yang bertugas mengelola jalannya pemerintahan kraton untuk sementara waktu. Panitia tersebut beranggotakan 5 orang yakni GRM Dorojatun sebagai pimpinan, GPH Mangkukusumo, GPH Tejokusumo, Pangeran

[10]Hingga hari ini, cerita ini masih dituturkan oleh kalangan tua di Jogja. Bagi orang Jawa, hadirnya tanda-tanda alam secara mendadak di tengah cuaca yang normal merupakan pertanda bahwa seorang tokoh besar telah mangkat. Fenomena yang hampir mirip kelak akan kembali terulang dan banyak disaksikan oleh banyak orang ketika HB IX wafat di bulan Oktober 1988. Catatan ini bukan ingin menekankan dimensi mistisisme Jawa melalui fenomena-fenomena gaib yang acap kali di luar akal rasional, melainkan ingin menegaskan bahwa dunia batin orang Jawa teramat luas, acap berseling dengan politik, dan seringkali tampil dalam wajah yang unik.

Hangabehi dan Pangeran Puruboyo. Dorojatun jauh lebih muda dibanding pamannya, Mangkukusumo. Namun demikian, Belanda tetap mendukung komposisi "Dewan Keraton" tersebut sebagai penghormatan atas diserahkannya Keris Kyai Joko Piturun kepada Dorojatun.

Untuk membicarakan suksesi maka diadakan suatu pertemuan internal kerabat Kraton Jogja pada 26 Oktober 1939, dua hari sesudah upacara pemakaman HB VIII. Dalam pertemuan itu, Dorojatun secara terbuka menyampaikan pertanyaan kepada seluruh kerabatnya apakah ada di antara mereka yang berkehendak menjadi pelanjut HB VIII. Tak satupun kerabat kraton memberi jawaban kesanggupan, malahan seluruh kerabat sepakat untuk mendukungnya duduk di tahta raja. Ia didukung oleh semua kerabat.

Namun masih ada yang harus dilakukannya sebagai bagian proses suksesi politik yakni menandatangani kontrak politik dengan Belanda.[11] Rupanya intuisi Dorojatun tak seremeh yang dinilai Gubernur Lucien Adam. Dorojatun dengan cerdas menolak pasal-pasal krusial dalam kontrak politik itu sehingga proses negosiasi berjalan alot sampai empat bulan lamanya. Sekali lagi, peristiwa unik terjadi namun diakui sendiri oleh Sultan HB IX dalam biografinya

[11] Sebagai konsekuensi logis dari perang besar semasa Geger Sepoy 1812 yang melahirkan kontrak politik pertama dengan Kraton Jogja, setiap pergantian tahta ke raja berikutnya selalu disertai dengan penyusunan kontrak politik yang baru yang harus ditandatangani oleh raja yang dinobatkan. Dengan demikian, suksesi politik Kraton Jogja seolah tersandera melalui perjanjian tertulis itu oleh karena berisi pasal-pasal yang mengerdilkan kekuasaan dan kewenangan raja. Ini yang kemudian disadari benar oleh Dorojatun bahwa ia tak akan sebegitu mudah mengamini seluruh pasal dalam kontrak politik yang disodorkan oleh Gubernur Lucien Adam, sebab ia mempertaruhkan kewibawaannya sebagai penerus tahta.

"Tahta Untuk Rakyat". Pada suatu senja sesudah empat bulan negosiasi politik tak membuahkan hasil positif, dalam keadaan setengah tertidur Dorojatun merasa mendengar suara yang mengatakan dalam bahasa Jawa "*Thole, tekena wae, Landa bakal lunga saka bumi kene* (Nak, tandatangani saja, Belanda akan segera hengkang dari negeri ini)". Tak ambil pusing, Dorojatun segera menandatangani naskah kontrak yang membuat Gubernur Adam sendiri terkejut dan terheran-heran.

Maka genaplah sudah empat legitimasi Dorojatun untuk duduk ke tahta raja Jogjakarta. Keempat legitimasi tersebut adalah:

1. GRM Dorojatun sebagai putera lelaki tertua dari satu-satunya permaisuri;
2. Dorojatun diserahi pusaka Kyai Joko Piturun langsung dari ayahandanya;
3. Bulatnya dukungan dukungan seluruh pangeran dan anggota keluarga;
4. Ditekennya perjanjian politik antara Belanda dengan dirinya.

Pembilahan legitimasi Dorojatun untuk naik tahta merupakan bentuk kombinasi antara legitimasi kultural yang bersifat intrinsik, dan legitimasi politik yang lebih bersifat ekstrinsik, dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram 2.2. Bilahan Kombinasi Legitimasi Kenaikan Tahta HB IX



Suksesi dari HB IX ke HB X



Hamengku Buwono X adalah raja kedua di Jogjakarta yang hidup di alam republik. Bernama kecil BRM Herjuno Darpito, ia terlahir sebagai putera tertua dari istri kedua yang dinikahi oleh HB IX, KRAy Windyaningrum.[12] Empat istri lain HB IX yakni KRAy

[12] Gelar BRM (Bendara Raden Mas) menunjukkan bahwa Herjuno Darpito dilahirkan dari seorang istri yang bukan berstatus permaisuri, karena memang HB IX tak memiliki permaisuri. Ini akan menjelaskan mengapa suksesi 1989 unik karena ini merupakan momen pertama seorang Sultan Jogja tidak menobatkan selir maupun permaisuri dan kemudian wafat tanpa menunjuk pengganti.

Pintokopurnomo, KRAy Hastungkoro, KRAy Ciptomurti, dan KRAy Norma Nindya Kirana. Ia naik tahta sesudah ayahandanya, HB IX, wafat pada awal Oktober 1988.

Sejak awal, Herjuno merupakan anak istimewa bagi HB IX. Ia adalah putera sulung yang didapatkan dari istri kedua HB IX. Kelahiran sang putera mahkota dibalut peristiwa aneh yakni kembalinya Srikandi, salah satu dari lima wayang pusaka Kraton Jogja yang hilang satu setengah abad sebelumnya, ke tangan HB IX. Mengingat pesan yang diterima HB IX adalah memberikan nama Arjuna bagi puteranya, maka ketika lahir sang putera mahkota diberi nama BRM Herjuno Darpito. HB IX sendiri mengatakan secara lugas mengenai peristiwa itu:

> *"Waktu itu saya baru mempunyai beberapa anak perempuan, tetapi belum ada anak laki-laki. Aneh sekali, tepat pada saat anak laki-laki saya yang pertama dilahirkan, ayam jago hitam mulus itu mati, seakan-akan jiwanya berpindah kepada anak saya"*[13](Roem, M 1982: 107-113).

Keistimewaan ini membawa Herjuno diangkat sebagai pangeran pada tahun 1974 dengan gelar KGPH Mangkubumi. Langkah ini jelas merupakan sinyal bahwa dia salah satu calon penerus tahta. HB IX sendiri memaparkan proses ini dalam sebuah wawancara.

---

[13] Ayam jago hitam mulus merujuk pada peristiwa penemuan secara tak sengaja dua ayam jago, masing-masing hitam dan putih mulus, di dekat Gunung Wilis. Pencarian ini merupakan perintah HB IX sendiri sesudah ia selesai mengunjungi gedung RRI Jogjakarta yang setengah jam sebelumnya luluh lantak karena serangan udara pesawat Belanda.

"Terus terang, apabila seseorang telah diberi gelar Mangkubumi, itu adalah langkah pertama ia dicalonkan untuk menjadi putera mahkota. Tetapi apakah ia benar-benar akan menjadi putera mahkota, masih tergantung pada penilaian, atau katakanlah periode ia menjadi Mangkubumi adalah periode penjajagan. Saya menilainya, para keluarga pun menilainya, untuk nanti pada pertemuan keluarga, sebagaimana waktu saya dulu, ditetapkan apakah ia bisa diterima atau tidak sebagai putera mahkota" "[14] (Roem, M 1982: 123).

Sesudah Herjuno dinaikkan pangkatnya menjadi Lurah Pangeran dengan gelar KGPH Mangkubumi pada 1970-an, sinyal mengenai penerus tahta menjadi semakin jelas. Jabatan Lurah Pangeran sendiri bukan tanpa makna, karena ia mengemban dua makna simbolik tersendiri yakni ia merupakan pemimpin seluruh pangeran yang ada di kraton, sekaligus orang yang berpeluang menjadi putera mahkota. Hal ini tampak jelas pada hadirnya Mangkubumi sebagai pengganti HB IX dalam berbagai acara resmi di kraton.[15]

Beberapa waktu sebelum wafat, HB IX secara khusus memanggil satu per satu keempat anaknya, yang konon untuk membicarakan rencana Sultan untuk

[14] Ayam jago hitam mulus merujuk pada peristiwa penemuan secara tak sengaja dua ayam jago, masing-masing hitam dan putih mulus, di dekat Gunung Wilis. Pencarian ini merupakan perintah HB IX sendiri sesudah ia selesai mengunjungi gedung RRI Jogjakarta yang setengah jam sebelumnya luluh lantak karena serangan udara pesawat Belanda.

[15] Posisi Mangkubumi sebagai kans terkuat putera mahkota nantinya juga akan tampak ketika Sultan HB IX wafat pada Oktober 1988. Beliaulah yang mewakili keluarga menerima jenazah Sultan dari Menko Kesra Soepardjo Rustam selaku wakil pemerintah. Beliau pula yang menerima kedatangan Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto, di pelataran Siti Hinggil Kraton ketika mereka datang melayat.

menobatkan putera mahkota pada akhir tahun 1988. Mangkubumi adalah orang pertama yang dipanggil selain ketiga yang lain yaitu GBPH Hadikusumo, GBPH Hadiwinoto, dan GBPH Joyokusumo. Kurang begitu dapat dipahami mengapa hanya mereka yang dipanggil. Akan tetapi, dapat dibaca suatu pengertian bahwa pemanggilan itu merupakan bentuk ekspresi politik HB IX yang sadar betul ia mesti memilih bibit-bibit unggul calon pewaris tahta dari anak-anak tertuanya.

HB IX akhirnya wafat pada Oktober 1988. Saling berebut klaim sempat muncul mengiringi proses suksesi. Hadikusumo adalah orang kedua yang berpeluang menggantikan tahta. Ini mengingat ia adalah putera lelaki tertua dari permaisuri pertama HB IX, KRAy Pintokopurnomo. Dalam beberapa kesempatan ia sempat menyampaikan kesiapannya. Bahkan melalui salah satu media massa lokal, ia menyatakan telah mendapat "wasiat" dari HB IX dalam sebuah pertemuan pribadi sebulan sebelum mangkatnya HB IX. Namun, kontradiksi muncul ketika pada saat yang sama ia juga mengatakan bahwa ia tak pernah punya cita-cita untuk duduk sebagai raja, lagipula ia sendiri enam bulan lebih muda dibanding Mangkubumi. Dengan demikian, syarat legitimasi kultural menyangkut usia Hadikusumo menjadi tak terpenuhi.

Musyawarah keluarga pun digelar untuk membicarakan suksesi. Lewat forum itu, akhirnya disepakati Mangkubumilah yang akan menggantikan tahta. Rendahnya ekskalasi konflik dalam suksesi HB IX ke HB X ini terletak pada dua hal. *Pertama,* keberhasilan HB IX menjaga soliditas dinasti. Peneguhan Mangkubumi sebagai putera mahkota tak resmi sejak

belia membuat soliditas keluarga menjadi mudah untuk diikat. Seandainya seluruh anak HB IX tak mendapat "perhatian" untuk dijajagi meneruskan tahta, mungkin saja terjadi silang pendapat yang cukup tajam mengenai siapa pewaris tahta yang paling sah.[16]

Kedua, pengertian di antara pangeran-pangeran yang masuk dalam bursa pergantian tahta. Pihak yang bersaing secara politik dengan Mangkubumi menyadari kurangnya legitimasi mereka untuk duduk di tahta. Mereka tak memaksakan kehendak, dan memilih untuk meninggalkan arena perebutan tahta secara terhormat. Seluruh pangeran bahkan turut hadir dalam upacara penobatan HB X. Di situ, Hadikusumo berkenan untuk membacakan *undhang* (semacam surat ketetapan) mengenai kenaikan tahta Mangkubumi. Kedua faktor inilah yang menyebabkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya konflik suksesi 1989 menjadi relatif sempit.

Suksesi Abnormal

Kategori besar kedua pola suksesi adalah suksesi abnormal. Yang dimaksud dengan suksesi abnormal adalah proses pergantian tahta yang mengacu pada situasi-situasi berikut ini:

1. Pewarisan tahta jatuh kepada putera mahkota yang bukan seharusnya (terjadi pergeseran, pencabutan, atau perebutan);

[16] Hal sebaliknya terjadi di Kraton Solo. Suksesi pasca wafatnya PB XII pada 2004 memicu perebutan tahta yang tak kunjung selesai. Dua anak PB XII, Tedjowulan dan Hangabehi, mengklaim diri sebagai pewaris tahta yang sah. Ujungnya, kini terdapat raja kembar di langit Solo. Sesama saudara saling berseteru bahkan terlibat dalam konflik kepemilikan sejumlah harta peninggalan PB XII.

2. Raja dilantik dalam kondisi tidak secara normal secara usia;

3. Terjadi gradasi konflik dalam skala signifikan yang menyebabkan instabilitas politik di internal kraton.

Suksesi tipologi ini dibedakan lagi menjadi empat macam suksesi yakni;

Suksesi Dinamis (Wahyu Oncat)

Suksesi jenis ini mengacu pada karakter situasi dan proses yang terjadi pada momen-momen pergantian tahta yang diselingi dengan dinamika politik. Saya memparalelkan dengan cerita pewayangan, di mana Raden Samba berupaya meraih wahyu cakraningrat dengan bertapa di Gunung Rewataka (Padmadihardja 1979).[17] Dalam pertapaannya, ia tergoda oleh wanita-wanita cantik, padahal sesungguhnya ia telah berhasil memperoleh wahyu kepemimpinan itu. Bagaimanapun, sedikit insiden telah mengubah takdir politiknya: ia harus kehilangan wahyu cakraningrat. Amarahnya, juga rasa sesalnya, tak mampu mengembalikan pada situasi semula. Akhirnya, Abimanyulah yang memperolehnya.

Fragmen ini memberi latar penyebutan istilah *wahyu oncat* atas suksesi yang dinamis. Kondisi normal yang mestinya berjalan lancar, karena suatu sebab entah oleh ulah sendiri maupun intervensi pihak lain, telah memunculkan perubahan arah secara politis. Suksesi ini terjadi pada masa pergantian tahta dari HB I ke HB II dan dari HB VII ke HB VIII. Mari kita lihat satu per satu.

Suksesi dari HB I ke HB II



Hamengku Buwono I adalah seorang panglima perang, arsitek, dan filsuf. Latar belakangnya sebagai seorang pangeran di lingkaran dalam Kraton Mataram Islam menjadikannya sangat paham seluk beluk dan liku-liku politik kekuasaan. Karakter istimewa HB I sempat diramalkan oleh Ratu Ageng (Pakempalan Pengarang Serat ing Mangkunegaran 1993: 33-34).[18] Dalam konsepsi Jawa, ia memenuhi syarat lahir–batin sebagai pemimpin besar yaitu *"trahing kusuma rembesing madu, wijining atapa tedhaking andana warih"*, suatu ungkapan untuk menyebut keunggulan pribadi atas seorang pemimpin. 40 tahun lebih kekuasaannya sebagai raja pertama Jogja, menjadi kunci bagi seluruh Jawa untuk menikmati masa-masa damai yang cukup lama.

Suksesi dari HB I ke HB II berjalan unik. Mangkubumi memiliki dua orang permaisuri yakni GKR Kencono dan GKR Kadipaten. Dari permaisuri pertama,

[18] Ratu Ageng adalah permaisuri Amangkurat IV, yang juga ibu dari HB I. Ratu Ageng pernah bermimpi ia melihat bulan jatuh dari angkasa, lalu wujudnya jatuh di sebuah pohon *randhu* (kapas). Mangkubumi mengambil bulan itu dengan sebilah bambu lalu memakannya. Ketika bulan sudah separuh lebih dimakan, dilemparkannya sisanya ke langit, namun bulan jatuh kembali. Bulan yang sudah tak utuh lagi lalu dimakan oleh Raden Mas Said. Baru sebagian kecil bulan dimakan, Ratu Ageng terjaga dari tidur.

GKR Kencono, terlahir anak lelaki bernama Raden Mas Ento yang telah dewasa sejak Mangkubumi memimpin perang gerilya dan belum menjadi raja. Ento bahkan sudah diangkat sebagai putera mahkota dengan gelar KGPAA Hamangkunegoro sebelum Perjanjian Giyanti disepakati. Namun, persoalan suksesi politik menjadi bermasalah karena Ento dikenal sombong, takmau belajar sastra, dan pernah terlibat dalam peristiwa pembantaian tujuh orang Cina ketika ia mengikuti ayahandanya bepergian ke wilayah Kedu, Jawa Tengah.[19]

Gubernur Nicolas Hartingh yang mengetahui informasi ini pun menyampaikannya kepada Sultan dalam suatu pertemuan di Gamping, Sleman, pada tahun 1758. Hartingh memberikan saran agar Sultan mempertimbangkan pembatalan status putera mahkota bagi Ento karena kelak jika Ento tetap menggantikan tahta, cacat politik yang disandangnya akan menyulitkan jalannya pemerintahan Kraton Jogja. Saat itu Sultan berjanji akan menegur putera mahkota agar mau mengubah tabiatnya.

Akan tetapi, peristiwa pada bulan Agustus 1758 akan mengubah sejarah suksesi politik perdana. Dalam suatu kunjungan ke Borobudur, Ento menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita Cina—suatu perilaku yang sangat tabu dan memalukan dilakukan oleh seorang calon raja Jawa. Sultan menjadi sangat marah. Namun, Sultan sendiri sempat ragu sebab pencabutan gelar putera

---

[19] Sesungguhnya ketika HB I telah mulai memasuki usia senja, Gubernur Semarang (*Gouverneurs van Java's Noord-Oost-kust*), Pieter Gerardus van Overstraten, sudah mengingatkan agar menunjuk putera mahkota definitif mengingat pertimbangan kesehatan raja yang sudah sering sakit-sakitan. HB I, nyatanya, belum terlalu mempedulikan hal itu.

mahkota akan menimbulkan pergolakan yang sangat besar bagi keluarga kerajaan. Akhirnya diambillah keputusan untuk melenyapkan Ento secara diam-diam: putera mahkota diracun melalui makanan yang disantapnya. Maka pada akhir Agustus 1758, akibat dari racun, Ento meninggal dunia pada usia 19 tahun setelah menanggung sakit selama beberapa hari (Marihandono, D 2008: 26-27).[20] Pujangga kraton menyembunyikan fakta ini dengan menuliskan bahwa ketika Ento berkunjung ke Candi Borobudur, ia melihat seribu bayang-bayang ksatria yang mengepungnya. Bersamaan dengan itu, ia memperoleh bisikan bahwa hal itu akan membawa petaka pada dirinya.

Dalam perkembangan selanjutnya, diangkatlah putera lelaki tertua ketiganya yang lahir dari permaisuri GKR Kadipaten yakni Gusti Raden Mas (GRM) Sundoro sebagai putera mahkota pengganti. BPH Hangabehi (Pangeran Ngabehi) tidak masuk kans putra mahkota. Sebuah versi menyebutkan bahwa Hangabehi terlibat dalam suatu hubungan gelap dengan salah seorang selir Sultan. Namun informasi ini patut diragukan. Jika kisah ini benar adanya, Hangabehi sudah pasti akan disingkirkan sebagaimana dialami Ento. Dalam argumen yang ditulis oleh Ricklefs dan Pramutomo, pengangkatan GRM Sundoro ini merupakan cara yang paling aman untuk menjaga kepentingan internal di antara putera-puteranya didasarkan atas situasi politik pada saat itu (Ricklef, M.C. 2003:76-77)[21].

[20] Ricklefs sendiri menyebutkan bahwa HB I sendirilah yang memerintahkan agar Ento diracuni, dan menjelang wafatnya, Sultan memberi maaf atas kesalahan-kesalahan Ento. Namun ini tindakan yang kontradiktif bagi Sultan terhadap putranya. Ada kemungkinan ide untuk melenyapkan Ento berasal dari Mayor Donkel, Residen Jogjakarta yang mengunjungi Ento menjelang akhir hayatnya.

[21] Sultan HB I mempunyai dua *garwa prameswari* (permaisuri) dan 21 *garwa ampeyan* (selir). Sesuai *Paugeran Praja Kejawen*, penunjukan GRM Sundoro sebagai putera mahkota sudah

Pertimbangan politiknya didasarkan atas dua hal. *Pertama*, hampir setengah abad lebih sejak Perjanjian Giyanti, Kraton Jogja hidup dalam suasana damai. Sultan HB I sadar benar bahwa ia tak ingin memunculkan manuver politik yang terlalu tajam untuk menghindari terpicunya konfrontasi dengan Belanda. *Kedua*, ia memiliki putera-putera yang cakap seperti BPH Hangabehi, juga BPH Notokusumo (kelak akan menjadi Paku Alam I) yang jika tak menjamin mereka untuk sepenuh hati mematuhi keputusannya, ia khawatir Jogja akan tenggelam dalam perang saudara memperebutkan tahta.

Itu mengapa, menjelang wafat, Sultan HB I mengumpulkan seluruh keluarganya, termasuk putera-puterinya dan pejabat tinggi kraton, lalu membagi-bagikan pusaka dan harta kepada mereka sekaligus meminta kesediaan mereka untuk bersumpah setia kepada putera mahkota, GRM Sundoro. Raja mengkonsolidasikan seluruh kekuatan internal kerajaan agar stabilitas kerajaan tetap utuh sepeninggalnya, sehingga ruang bagi intervensi politik Belanda dapat dipersempit (Pramutomo 2006: 157-158). Akhirnya Sundoro Hamengku Buwono II naik tahta menggantikan ayahandanya, *Sultan Swarga*, yang wafat pada 1792.

Yang unik dalam proses suksesi dari HB I ke HB II ini adalah kontestasi kekuasaan di dalam kraton termanifestasikan melalui sastra. Di tengah banyaknya

tepat adanya. BPH Hangabehi memang lebih tua dibanding Sundoro dan ia juga disebut secara eksplisit dalam naskah Perjanjian Giyanti sebagai pewaris tahta kedua bila Sundoro berhalangan. Namun, oleh karena Hangabehi putera dari Bendoro Raden Ayu Tilarso yang notabene *garwa ampeyan*, sementara GRM Sundoro masih ada, maka ia tak masuk kans sebagai pengganti tahta.

intrik di dalam kraton, Sundoro yang masih berstatus putera mahkota menulis sebuah karya sastra yakni *Babad Mangkubumi*.[22] Salah satu bagian dari naskah itu menggambarkan argumen pribadinya atas legitimasi transfer kekuasaan dari sang ayah. Ini tampak dari kutipan *Pupuh 20, Pada 46* naskah *Babad Mangkubumi* berikut:

Sanadyan katan amangke	*Meskipun ada banyak*
Atmajenira prabu	*Putera raja (Sultan HB I, red),*
Mung kang dadya teleng ingang sih	*Satu-satunya yang menjadi perhatian*
Njeng Den Mas Timur nama	*Adalah Raden Mas Timur namanya,*
Langkung sih Sang Prabu	*Sangat dicintai oleh Paduka Raja,*
Apan badhe gentenana	*Yang akan menggantikan*
Mring kang raka jumeneng pangran dipati	*Kakaknya, menjadi Pangeran Adipati*
Anom Mengkunegoro	*Anom Hamengkunegoro,*
Kanjeng Raden Mas Timur ing mangkin	*Raden Mas Timur julukannya,*

[22] Kekhawatiran Sundoro memang cukup masuk akal sebab ia adalah putera mahkota dari permaisuri kedua HB I, GKR Kencono. Sementara itu permaisuri pertama mempunyai dua orang putera dan oleh HB I telah dicalonkan sebagai putera mahkota. Namun keduanya tak memenuhi syarat. Putera pertama meninggal dunia sebelum diangkat, sedang putera kedua dianggap tidak sehat jiwanya. Sesudah dewasa, ada kandidat lain yang mengkhawatirkan posisi Sundoro yaitu Pangeran Notokusumo yang cukup berpengaruh. Meski berstatus sebagai putera selir, namun kalangan pejabat Belanda mencoba membujuk HB I agar mengangkat Notokusumo menggantikan Sundoro. HB I memang menolaknya. Peristiwa ini telah menjadi suatu peringatan bagi Sundoro untuk mewaspadai manuver-manuver politik Notokusumo.

Ingkang yudwa daweg wolung warsa	*Tengah menginjak usia delapan tahun*

(Marihandono, D 2008: 69).

Ia juga menulis karya serupa yang kelak akan menjadi salah satu pusaka paling keramat Kraton Jogja: *Serat Surya Raja*. Karya ini ditulisnya di tengah pergumulannya dengan Belanda dan ancaman intrik yang dilakukan terutama oleh Pangeran Notokusumo. HB II menegaskan posisi dirinya dengan menulis sebagai berikut:

Sri Narendra ing Mataram	*Paduka Raja di Mataram*
Pan kathah atmajanira	*Memiliki banyak putera*
Nging putra ingang satunggil	*Tetapi hanya satu orang putera*
Kang dadya telenging driya	*Yang menjadi pusat perhatiannya*
Ginadhang sumilih katong	*Diharapkan akan menggantikan raja*
Ayusya padlikur warsa	*Dua puluh empat tahun usianya*

(Marihandono, D 2008: 70).

Suksesi dari HB VII ke HB VIII



Hamengku Buwono VII, tersohor dengan sebutan *Sultan Sugih*, yang dalam suasana relatif stabil naik tahta pada tahun 1877.[23] Sultan HB VII memiliki tiga orang permaisuri. Permaisuri pertama, GKR Kencono tak memberinya keturunan sama sekali. Dengan demikian, hak pewarisan tahta akan dialihkan ke dua permaisurinya yang lain. HB VII memperoleh putera lelaki dari GKR Hemas, yang dikukuhkan sebagai permaisuri keduanya pada 1883, dan dengan demikian gugur sudah hak tahta kraton atas putera-putera permaisuri ketiganya, GKR Kencono Wulan. GKR Hemas melahirkan lima putera lelaki. Empat di antaranya kelak akan dinobatkan sebagai putera mahkota secara bergantian. Ini adalah keunikan tersendiri dalam sejarah suksesi politik Jogjakarta.

[23] Perhatian HB VII tercurah pada ekonomi. Ia memprakarsai dibangunnya pabrik-pabrik gula di Jogjakarta. Tercatat ada 17 pabrik gula yang berdiri kala itu. Bahkan dengan bantuan adiknya, KGPA Mangkubumi, ia juga mendirikan pabrik vanili di kawasan Lendah, Kulon Progo. Pemerintah Belanda malahan memberikan subsidi sebesar 200.000 Rijksdalder (Gulden) untuk setiap pabrik yang dibangunnya. Dari pabrik-pabrik itulah HB VII menangguk keuntungan besar tiap tahun. Itu mengapa, ia dijuluki *Sultan Sugih* (baginda sultan yang kaya raya).

Plot yang gagal dan serangkaian kematian misterius

Putera lelaki pertama GKR Hemas, GRM Akhadiyat, dilantik sebagai putera mahkota pada usia 10 tahun, tepat ketika ibundanya diangkat sebagai permaisuri. Dua jilid dari naskah *Babad Ngayogyakarta: Hamengkubuwana VII* memberikan informasi mengenai pemberontakan Suryaningalaga (*Suryengalaga*) pasca pelantikan Akhadiyat. Suryaningalaga sebenarnya adalah putera kandung dari HB V dari permaisuri GKR Kedhaton. Persoalannya adalah Ratu Kedhaton belum sempat melahirkan Suryaningalaga ketika HB V mangkat. Naskah *Babad Ngayogyakarta: Hamengkubuwana V dumugi Hamengkubuwana VI* menulis mengenai desakan GKR Kedhaton kepada Pemerintah Belanda untuk mengangkat Suryaningalaga sebagai putera mahkota. Namun Belanda menolak mentah-mentah keinginan itu.

Momentum ini memicu serangkaian insiden politik. Suryaningalaga dan segelintir pengikutnya, yang didukung oleh ibunya, merencanakan plot untuk menghancurkan kraton, lalu melarikan diri ke Desa Remame, dekat Magelang. Plot gagal karena sudah terbongkar terlebih dahulu. Suryaningalaga ditangkap dan dibuang ke pengasingan (Lindsay 1994: 120).[24] Sepuluh tahun kemudian, pada 1893, Akhadiyat wafat pada usia remaja, 19 tahun. Kematian Akhadiyat meninggalkan jejak misteri. Arsip surat rahasia Belanda

[24] Kisah dan latar belakang mengenai kudeta politik Suryaningalaga diceritakan secara detail di kedua jilid naskah *Babad Ngayogyakarta: Hamengkubuwana VII*. Kesulitan utama adalah latinisasi substansinya dari aksara Jawa bergaya prosaik untuk mendapatkan pandangan dari sejarawan masa itu mengenai peristiwa tersebut. Saya hanya mengutip dari buku karangan "Kraton Yogyakarta".

merilis informasi mengenai "sakit ayan" yang diderita oleh Akhadiyat.

> "*Raden Mas Akhadiyat diangkat menjadi putera mahkota pada tahun 1883. Dia meninggal pada tahun 1893 karena penyakit ayan."* (Surat pribadi Residen Belanda kepada Gubernur Jenderal Nomor 66 tertanggal 20 Mei 1913).

Sepeninggal Akhadiyat, sang adik kandung, GRM Pratistha, pun diangkat sebagai putera mahkota pengganti. Namun, dokumen Belanda menyebutkan bahwa atas alasan kesehatan, maka gelar KGPAA Hamengkunegoro bagi Pratistha dicabut. Tidak ada catatan rinci mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun arsip Kerajaan Belanda menuliskan bahwa Pratistha sakit jiwa tak lama setelah diangkat sebagai putera mahkota, ia akhirnya dirawat di rumah Pangeran Mangkubumi, salah satu saudara HB VII (Residen Jogjakarta, B. van Baak 1913).[25]

Adik kandung Pratistha, yakni GRM Putro pun dinobatkan sebagai putera mahkota oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 11 November 1895. Oleh Sultan HB VII sendiri, pelantikannya dilangsungkan pada 4 Juli 1895. Namun malang benar, pada tahun 1913 ia juga meninggal di usia muda. Kematiannya menyisakan misteri hingga kini. Arsip Belanda menuliskan ketidaklaziman kematiannya:

---

[25] Informasi ini saya sarikan dari arsip surat nomor 66, dengan kode Sangat Rahasia, yang ditulis oleh Residen Jogjakarta, B. van Baak, kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 20 Mei 1913. Surat berisi seputar pergantian tahta dari HB VII ke putera-puteranya.

"Ada kesan kuat bahwa kematian putera raja ini diduga tidak disebabkan oleh penyebab alami, akan tetapi dianggap sebagai korban dari kelompok yang memusuhinya, yang maksud dan ambisinya tidak pernah terwujud sepanjang hidupnya…"

"Juga dua dokter yang merawatnya (dr. Wagener dan dr. Wahidin) tidak bisa menemukan penjelasan yang masuk akal karena hal itu sangat tidak bisa mereka pahami maupun jelaskan, sebab lima hari terakhir sebelum kematian putera mahkota, gejala-gejala yang dianggap penyakit disentri sama sekali lenyap." (Surat Pribadi Residen Belanda kepada Gubernur Jenderal No. 66 tertanggal 20 Mei 1913)[26]

Jika saja tak wafat mendadak, garis tahta akan tumbuh dari GRM Putro sebab ia sudah memiliki permaisuri dan anak laki-laki. Akhirnya, GRM Sujadi diangkat menjadi putera mahkota pengganti sesudah perdebatan panjang nan rumit mengenai siapa yang akan diserahi tahta. (HB VII 1914)[27]

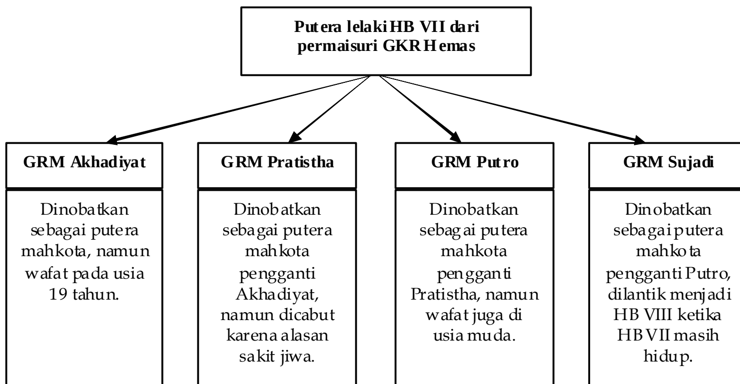
---

[26] Petikan surat nomor 1252, kode rahasia, tertanggal 11 Juni 1914 yang memuat pandangan resmi Volksraad kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, serta surat pribadi Residen Belanda kepada Gubernur Jenderal nomor 66 tertanggal 20 Mei 1913.

[27] Berdasar surat-surat rahasia Belanda, sesunguhnya HB VII pada mulanya tak berkenan atas rencana penobatan Sujadi sebagai putera mahkota. Hal ini akibat dari insiden hilangnya sejumlah uang kas kraton yang disimpan dalam brankas. HB VII mencurigai Sujadi sebagai pelaku karena puteranya itu yang diserahi kunci brankas. HB VII sempat berpikir untuk keluar dari pakem suksesi dengan memberikan tahta kepada Mangkukusumo, putera tertua dari salah satu selirnya. Namun, sebuah penyelidikan akhirnya menyimpulkan bahwa pelaku pencurian adalah salah seorang *abdi dalem* keuangan, bukan Sujadi. Sesudah terang persoalan itu, HB VII lega dan mengirim surat permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar "menyegerakan" penobatan Sujadi sebagai putera mahkota kerajaan. Informasi digali dari arsip surat yang ditulis HB VII dalam *mailrapport* nomor 1558/14 tertanggal 12 Maret 1914 dan 16 Mei 1914.

Di penghujung usianya, sesudah 43 tahun memerintah Jogjakarta, HB VII sempat menyampaikan permintaannya untuk *lereh keprabon* (lengser dari tahta kerajaan) untuk kemudian *mbegawan* dan *madeg pandhita* (menyepi untuk mendekatkan diri pada Tuhan).[28] Ia sendiri menyaksikan putera mahkotanya, GRM Sujadi, dinobatkan sebagai Sultan HB VIII. Sesudahnya, ia memutuskan tinggal di luar keraton, di Kedhaton Ambarukmo, *jumeneng* (menyatakan diri) sebagai *Panembahan*. Setahun sesudah *lereh keprabon,* HB VII akhirnya wafat di penghujung September 1921 persis pada usia 82 tahun. Jika dirangkum dalam sebuah diagram, suksesi dari HB VII ke HB VIII dapat ditampilkan sebagai berikut:

Diagram 2.3. Garis Pergantian Empat Putera Mahkota HB VII



[28] HB VII menyampaikan permintaan kepada Belanda untuk turun tahta. Peristiwa politik *lereh keprabon* ini kelak akan menjadi catatan istimewa bagi Kraton Jogja tentang seorang raja yang meninggalkan singgasana tanpa menyisakan kegaduhan yang berarti.

Suksesi menyamping (klapa nyawang)

Suksesi ini ditandai dengan terputusnya dinasti politik raja karena secara biologis raja tak memiliki putera lelaki dari istri-istrinya. Hambatan faktor biologis memaksa pergantian tahta tidak berjalan sebagaimana mestinya dari ayah kepada anak. Suksesi ini diibaratkan dengan istilah *klapa nyawang*. Istilah *klapa nyawang* berarti pohon kelapa yang tumbuh dengan satu cabang. Normalnya, pohon kelapa adalah tanaman yang berbatang tunggal. Namun karena suatu sebab, pohon kelapa acap kali bercabang satu atau dua di kanan kirinya. Suksesi tipe inilah yang kemungkinan besar kelak akan terjadi dalam pergantian tahta dari HB X ke HB XI. Dalam sejarah Kraton Jogja, suksesi menyamping baru terjadi pada masa HB V.

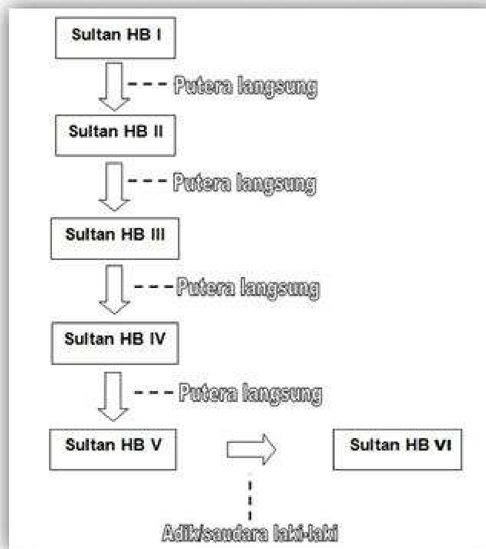
Suksesi dari HB V ke HB VI



Hamengku Buwono VI adalah adik dari HB V. Karena kedua permaisuri HB V, yakni GKR Kencono tak memberikan putera, sementara GKR Kedhaton yang tengah hamil di waktu menjelang wafatnya HB V belum juga menampakkan tanda-tanda kelahiran, maka suksesi politik di masa ini merupakan simpangan yang cukup

serius dalam kacamata politik. Ketika Sultan HB V wafat, de Geer, Residen Jogjakarta pada waktu itu, mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, agar adik kandung raja, KGPA Mangkubumi, dinobatkan sebagai Sultan HB VI. Maka, atas restu Belanda, Mangkubumi diangkat sebagai raja pengganti. Sebelumnya, garis keturunan raja demi raja selalu bersambung dari ayah ke anak. Kini, garis langsung estafet dari ayah – anak seolah terpotong. Hal ini membenarkan konklusi teori Pareto yang mengatakan bahwa kejatuhan elit dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor biologis (Haryanto 2005). Tiadanya keturunan lelaki HB V telah menggugurkan keberlangsungan suatu pertalian darah secara langsung. Dengan demikian, dinasti HB V telah usai pada tahun itu juga.

Diagram 2.4. Simpangan Politik dalam Suksesi dari HB V ke HB VI



Adalah menarik mengingat tak lama setelah HB V wafat, permaisurinya yang tengah mengandung akhirnya melahirkan seorang anak lelaki bernama GRM Muhammad (kelak bernama GPH Suryoningalogo, pelaku affair di masa HB VII). Sebenarnya ada putera lelaki yang sudah dewasa dari BRAy Dewaningsih, selir pertama HB V. Ia bernama BRM Sepuh. Namun dalam konteks politik saat itu, keluarga kraton tentu tak mungkin mengambil resiko besar dengan menobatkan anak selir.

Suksesi berdampak kekerasan (nggenthong pecah)

Proses pergantian tahta dalam klasifikasi ini digolongkan sebagai suksesi yang menimbulkan pergolakan dan pertumpahan darah. Suksesi ini terjadi di masa HB II. Suksesi semacam ini diibaratkan dengan gentong berisi air yang retak lalu pecah, sehingga air pun tertumpah. Gentong sendiri dalam tradisi Jawa merupakan simbol sumber berkah, ekivalen dengan kraton sebagai kran yang menyalurkan berkah Tuhan kepada segenap rakyat yang dinaunginya. Mari kita lihat lebih jelas suksesi pola ini.

Suksesi dari HB II ke HB III



Sejak awal Sultan HB II memang "istimewa" bagi Pemerintah Kolonial karena pada masanya, Kraton Jogja mengalami aneka dinamika politik yang tajam. Stabilitas politik kraton mulai goyah oleh karena karakter pribadi Sultan HB II yang keras kepala. Di satu sisi ia tak punya hubungan yang baik dengan Belanda, sementara penasihat-penasihat cakap di masa ayahandanya sudah uzur atau wafat.

Instabilitas politik melahirkan peluang intrik di lingkar utama kekuasaan. HB II berselisih dengan anaknya sendiri, GRM Surojo. Sebagai putera mahkota yang lahir dari permaisuri GKR Kedhaton, sedari awal masa remaja Surojo telah terlibat dalam konflik bersama dengan pejabat tinggi kraton dan Belanda. Hal ini membuat raja mulai menunjukkan perasaan tidak senang pada putera mahkota yang sebelumnya oleh Gubernur Jenderal Inggris, William Daendels, malahan telah diberi gelar *Kanjeng Raja*.[29] Itu mengapa, konspirasi politik putera mahkota berdampak pada dinobatkannya putera

[29] Gelar ini diperoleh oleh karena instabilitas situasi politik akibat buruknya hubungan antara Sultan dengan Daendels. Kondisi ini mendorong putera mahkota untuk mengambil peluang dengan memainkan konspirasi politik.

mahkota sebagai *Kanjeng Raja* pada 1810 dengan kewenangan kekuasaan pemerintahan. Namun atas alasan politik, pada akhir tahun 1811 ia dilengserkan kembali, sementara Sultan HB II dikembalikan lagi posisinya sebagai raja kraton.

HB II juga terlibat konflik pribadi dengan Pangeran Notokusumo, saudaranya dari lain ibu. Masih pula dari ujung timur kerajaannya, ia diancam oleh dendam sejarah yang masih berkobar di hati Pakubuwono IV karena pernah dipermalukan oleh HB I dalam suatu insiden politik yang melibatkan militer Belanda. Konflik HB II dengan Notokusumo yang dilatarbelakangi oleh kecemburuan antar elit berujung pada perang besar yang mengakibatkan Kraton Jogja rusak berat. HB II yang dianggap membangkang, dihukum oleh Inggris dengan sebuah invasi militer. Notokusumo berada di pihak Inggris dan membantu invasi. Inggris sendiri mengerahkan pasukan artileri dibantu oleh Pasukan Sepoy dari India, bala tentara dari Surakarta dan Legiun Mangkunegaran. Meski benteng Kraton Jogja telah dipertahankan oleh 8.000 prajurit, namun tersandera secara politik membuat kraton tak mampu membendung gempuran selama 3 hari *Geger Sepoy* itu. Ricklefs melukiskan pertikaian militer ini sebagai berikut:

> *"Pada bulan Juni 1812, 1.200 prajurit berkebangsaan Eropa, dengan dibantu oleh 800 prajurit Legiun Mangkunegaran, serta prajurit dari Kraton Surakarta berhasil merebut Kraton Jogja setelah terjadi tembakan-tembakan artileri yang seru. Kraton Jogja dirampok, perpustakaan dan arsip-arsipnya dirampas, sejumlah besar*

> *uang diambil, Hamengku Buwono II dimakzulkan dan dibuang ke Penang." (Ricklefs, M.C 2005: 250)*[30]

Perang besar ini telah melahirkan bencana baru di Kraton Jogja dan membawa dampak kekacauan politik yakni dilengserkannya Sultan HB II (*Sultan Sepuh*) sebagai raja, dan ditekennya Perjanjian 1812 yang mewajibkan Kraton Jogja membayar ganti rugi perang dalam jumlah besar. HB II kini digantikan oleh anaknya yang digelari HB III.

Sultan HB III tidak memerintah lama karena dua tahun sesudah naik tahta, ia wafat. Naik turunnya tahta HB II–HB III menjadikan proses suksesi di era dua raja ini (1810 - 1814) memiliki keunikan tersendiri dalam sejarah politik Kraton Jogja. Keunikan ini jelas menggambarkan betapa pseudoabsolutisme raja-raja Jogja tergambar secara jelas dalam proses pergantian tahta HB II–HB III.[31] Dampaknya pun tegas. Pembangkangan Sultan HB II telah melahirkan kebijakan baru Belanda di bidang politik yaitu setiap pergantian raja harus melalui kontrak politik Kasultanan–Belanda.

Dengan sifat "kepala batu" sebagaimana julukan yang diberikan oleh Belanda, ia mewariskan sifat ksatrianya pada segenap keturunannya yang akan memimpin kerajaan. Ia wafat pada 1826, selang dua

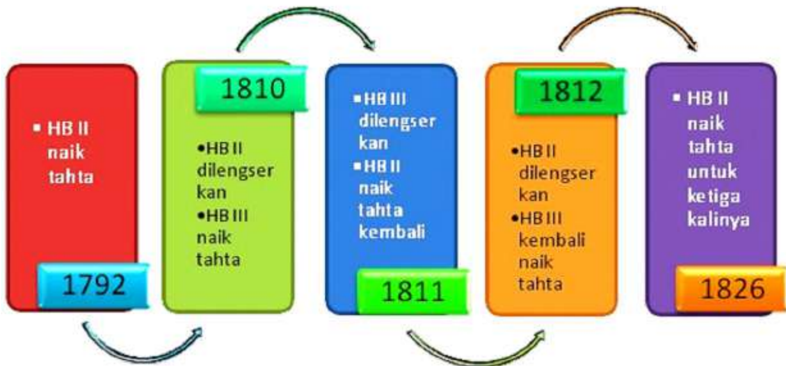
---

[30] Beberapa literatur menuliskan uang yang diambil sebesar 500.000 Gulden, naskah-naskah penting milik Kraton, sejumlah pusaka dan benda peninggalan kraton, juga turut diangkut sebagai hasil rampasan perang. Peristiwa ini lebih sering terkenal sebagai *Geger Sepoy*. Jejak peristiwa ini kini dapat disaksikan melalui reruntuhan benteng Kraton Jogja yang telah hancur di bagian sisi timur.

[31] Bandingkan dengan Pramutomo 2006: 161

tahun sebelum Perang Jawa berakhir. Ia pula satu-satunya Raja Jogja yang tidak dimakamkan di kompleks pemakaman sakral Raja-Raja Mataram di Bukit Merak Imogiri. Rangkuman diagramatik atas proses suksesi di masa HB II – HB III dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram 2.5. Pasang Surut Suksesi Politik Kraton Jogja 1812 - 1828



Suksesi dengan perwalian (Ngembar Dhomas)

Yang dimaksud sebagai suksesi perwalian adalah pergantian tahta dibarengi dengan dibentuknya Dewan Perwalian sebagai pendamping raja yang ketika dinobatkan masih berusia belia. HB IV dan HB V adalah dua orang raja yang ketika dilantik keduanya masih belum dewasa. Kedua raja tersebut menjadi raja dengan didampingi oleh suatu Dewan Perwalian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kraton hingga raja dianggap telah dewasa. Dengan demikian, proses sirkulasi elit dari HB III ke HB IV serta dari HB IV ke HB V bisa dikatakan sebagai fenomena suksesi perwalian yang tak lazim dalam tradisi

kepemimpinan Jawa. *Ngembar dhomas* sendiri merupakan pralambang bahwa ada pihak yang mengiringi jalannya raja kecil, diibaratkan dengan pengantin Jawa yang selalu diiringi oleh *dhomas* (pendamping kedua mempelai) sampai dengan upacara pernikahan purna.

Suksesi dari HB III ke HB IV



Hamengku Buwono IV dinobatkan sebagai raja pada tahun 1814 ketika ia masih berusia 9 tahun. Nama kecilnya GRM Ibnu Jarot yang terlahir sebagai putera mahkota dari permaisuri GKR Kencono. Ia merupakan raja yang "istimewa" secara kedudukan, sebab ia menjadi satu-satunya putera lelaki bagi Sultan HB III yang didapatkannya dari garis permaisuri. Dengan demikian, kenaikan tahtanya merupakan proses yang cukup mulus dan tanpa konflik elit yang berarti.

Proses suksesi ke GRM Ibnu Jarot ini juga merupakan catatan tersendiri dalam sejarah Kraton Jogja sebab ini adalah kali pertama Kraton Jogja dihadapkan pada pengalaman akan penobatan raja yang masih sangat belia. Usia 9 tahun tentu bukan usia produktif. Dengan demikian, menjadi analisis tersendiri bahwasanya ada

kebijakan alternatif yang ditempuh oleh pemangku kepentingan di Kraton untuk mengatasi hal tersebut. Cara yang ditempuh kala itu adalah membentuk Dewan Perwalian yang dipegang oleh KGPAA Paku Alam I dan ibundanya, GKR Kencono. Paku Alam I sendiri merupakan paman HB IV dan belum lama dinobatkan sebagai *pangeran merdiko* di wilayah Pakualaman.[32]

Sebelum masa ini, tidaklah dikenal adanya Dewan Perwalian dalam tradisi Dinasti Mataram. Dewan Perwalian merupakan "ketidaklaziman" politik dalam struktur kekuasaan raja Jawa.[33] Ia lebih merupakan hasil samping dari proses suksesi yang memerlukan negosiasi untuk menyeimbangkan kekuatan pihak-pihak yang berkepentingan di sekitar lingkaran kekuasaan raja. Dengan menempatkan Paku Alam I sebagai Dewan Perwalian, Belanda lebih leluasa untuk melakukan kontrol atas elit-elit kraton dibanding harus mengangkat raja dengan mengambil putera mendiang raja dari garis selir yang jelas akan menimbulkan resistensi yang kuat di kalangan keluarga kraton. Rekayasa ini diharapkan dapat mempersempit kemungkinan terjadinya konflik internal kraton yang sewaktu-waktu akan meluas menjadi gerakan pemberontakan.

Rupanya Belanda telah salah hitung. Asumsi di atas memang benar, namun tak meredam kekecewaan

[32] KGPAA Paku Alam I merupakan raja yang memimpin Pura Pakualaman, hasil sampingan atas kisruh politik semasa Geger Sepoy di era pemerintahan Sultan HB II. Jadi, di masa kolonial Inggris, sempurna sudah praktik politik pengkaplingan di antara keluarga Dinasti Mataram menjadi dua kerajaan besar (Surakarta dan Jogjakarta) serta dua kadipaten (Mangkunegaran dan Pakualaman) yang kesemuanya berdiri sendiri, dan memiliki hak waris secara turun temurun.

[33] Kelak cara ini akan dilanjutkan pada proses suksesi dari HB IV ke HB V yang memiliki latar belakang serupa yakni raja yang diangkat masih berusia sangat muda.

para pangeran yang sesungguhnya ingin tampil sebagai pahlawan dalam proses pergantian raja sesudah Sultan HB III wafat. Dari dikukuhkannya GRM Ibnu Jarot secara resmi menjadi seorang raja definitif pada tahun 1819 sampai dengan mangkatnya di penghujung tahun 1822, memang tak terjadi gejolak yang menonjol. Namun dengan hadirnya seorang raja yang masih belia, raja akan mengalami degradasi kapasitas personal yang berpengaruh pada jalannya pemerintahan kraton.

Pribadi Sultan HB IV sendiri lebih dikenal cenderung afirmatif terhadap gaya hidup Eropa, misalnya diizinkannya pesta-pesta ala Barat yang dilangsungkan di dalam kraton. Dengan demikian, cengkeraman kekuasaan Kolonial Belanda semakin menjadi-jadi sejak era ini. Hal ini membuat akumulasi kekecewaan elit kraton semakin besar. BPH Diponegoro yang lebih terkenal dengan sebutan Pangeran Diponegoro, merupakan satu di antara pangeran yang kecewa pada raja. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di bagian lain.

Kematian "misterius" Sultan muda

Sultan HB IV adalah raja yang wafat pada usia 18 tahun, usia yang setara dengan kehidupan anak SMA saat ini. Kematian sang raja muda menyimpan misteri yang sampai dengan saat ini tak banyak diketahui oleh publik. Banyak keraguan mengenai bagaimana ia wafat. Arsip resmi kraton mengatakan bahwa HB IV wafat ketika ia tengah bertamasya di luar kraton. Karenanya ia mendapat julukan *Sultan Seda ing Besiyar* yang bermakna Sultan yang wafat ketika bertamasya. Kompleks

makamnya di Makam Raja-raja Imogiri pun bernama resmi Kompleks Besiyaran.

Ricklefs sendiri menuliskan adanya isu kemungkinan Sultan HB IV wafat karena diracun. Salah satu kerabat kraton membenarkan analisis ini. Pasalnya, cerita ini sengaja disembunyikan oleh elit dan pujangga kraton pada masa itu. Hal yang sebenarnya terjadi tidaklah demikian. Kerabat kraton tadi membeberkan informasi tersebut dengan mengatakan;

> *"Memang ada kecenderungan bahwa Sultan HB IV sesungguhnya wafat secara tak wajar. Pujangga kraton kan menyembunyikan cerita ini dengan menuliskan bahwa HB IV wafat sewaktu pesiar, piknik-lah istilahnya. Sejarah akhirnya ya sekadar menuliskan bahwa HB IV wafat usia muda waktu piknik, maka disebut Sultan Seda ing Besiyar. Padahal kan tidak, HB IV itu wafatnya di kraton, di meja makan sesudah bersantap makan sepulang dari acara pesiar itu. Ini intrik lho, dan Belanda-lah yang diduga kuat jadi dalang di balik kematian Sultan."* (Pramutomo 2011, komunikasi langsung, 9 Januari 2011).

Sebutan *Sultan Seda ing Besiyar* hanyalah instrumen politik untuk menyembunyikan fakta sebenarnya. Tidak ada sumber yang dapat dirujuk mengenai sesiapa elit kraton maupun Belanda yang mempunyai kepentingan untuk melenyapkan HB IV di usia mudanya. Namun, hal ini dapat dibaca bahwa ada konflik di dalam kraton yang gaungnya tak terendus sama sekali. Hal serupa juga kelak akan terjadi pada diri HB V.

Suksesi dari HB IV ke HB V



Hamengku Buwono V terlahir sebagai salah satu putera lelaki dari permaisuri HB IV, GKR Kencono. Nama kecilnya GRM Gathot Menol. Seiring dengan wafatnya sang ayahanda pada tahun 1822, Menol dinobatkan sebagai raja pada tahun yang sama di usia 3 tahun. Sejarah terulang kembali dimana seorang raja belia diangkat di Kraton Jogja dengan didampingi Dewan Perwalian. Dewan Perwalian untuk Menol yang kini telah bergelar Sultan HB V terdiri dari neneknya, ibundanya, Pangeran Mangkubumi (putera HB II), dan Pangeran Diponegoro (putera HB III).

Pengangkatan Menol ternyata tak mulus. Sesungguhnya Diponegoro menyimpan sedikit kekecewaan mengingat ia adalah juga putera lelaki tertua dari garis selir (Dwiyanto 2009: 250). Kejadian serupa pernah terjadi pada diri Notokusumo, putera HB I dari garis selir. Rasa kecewanya juga dipengaruhi oleh faktor lain yakni pengalaman spiritual Diponegoro, yang dialaminya jauh sebelum ia memimpin perang, menjadikan dirinya merasa berhak atas tahta raja

(Ricklefs 2005: 177-178).[34] Apalagi waktu itu Diponegoro disebut-sebut merupakan penjelmaan Ratu Adil, tokoh yang kehadirannya tengah membahana di zaman itu.

Kekecewaan ini semakin memuncak tatkala Belanda berencana membangun jalan baru yang melewati makam leluhur Diponegoro di daerah Tegalrejo. Pihak Belanda pun rupanya sudah memasang patok-patok untuk pembangunan jalan. Diponegoro marah dan mencabutinya. Ia kemudian menyatakan mundur dari Dewan Perwalian, meninggalkan kraton, dan mulai memimpin perang melawan Belanda. Maka, meletuslah Perang Jawa 1825 sampai 1830 yang secara gradual akan mempersulit posisi Belanda secara politik dan ekonomi.[35]

Namun, motif sesungguhnya Diponegoro masih belum jelas benar. Salah satu sumber referensi yang agak kontradiktif mengatakan bahwa sebenarnya ia diinginkan oleh ayahandanya, HB III, agar ia menggantikan tahta. Namun Diponegoro menyadari bahwa dirinya bukan lahir dari seorang permaisuri raja, ia menolaknya dan lebih suka hidup di tengah rakyat jelata.

---

[34] Pada tahun 1805, Diponegoro mengalami suatu kejadian spiritual yang membuatnya yakin bahwa ia adalah calon raja Jawa yang memperoleh wahyu supranatural. Ketika ia masih dalam perjalanan ziarah ke tempat-tempat sakral Dinasti Mataram, ia bermimpi ditemui oleh Kanjeng Ratu Kidul yang menjanjikannya bantuan untuk mencapai status sebagai raja. Ia diperintahkan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan memasuki "lautan jaman kehancuran" sebagai tanda bahwa negerinya telah disucikan.

[35] Perang Jawa telah membawa kehancuran luar biasa bagi kedua belah pihak baik di pihak pasukan pemberontak maupun Belanda. Pemerintah Belanda kehilangan 15.000 tentaranya yang tewas selama 5 tahun perang berkecamuk, sedangkan di pihak sipil, jumlah penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 orang.

Dalam perkembangannya, Perang Jawa makin meluas dan didukung oleh hampir sebagian besar pembesar kraton. Pangeran Mangkubumi, yang juga merupakan anggota Dewan Perwalian untuk Sultan HB V, juga ikut bergabung di barisan Diponegoro. Mangkubumi adalah pangeran yang disegani oleh karena memiliki pengaruh luas di kalangan kraton. Posisi ini telah menjadikan Belanda semakin frustasi.

Suksesi politik pun terguncang karena Belanda mengambil keputusan untuk melengserkan Sultan HB V sekaligus membubarkan Dewan Perwalian. HB II yang hidup di pengasingan dipulangkan kembali. Hal ini merupakan strategi politik untuk meredam gejolak perang. Dalam pertimbangan Belanda, HB II akan mampu membujuk para bangsawan dan pembesar kraton agar berhenti bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Maka untuk yang ketiga kalinya, HB II naik tahta pada 1826, dengan suatu perjanjian bahwa ia tak akan mengganggu kelancaran suksesi bagi sang cicit, HB V, yang kelak akan menggantikannya. Namun, sebelum Perang Jawa berakhir, Sultan HB II telah wafat pada 1828. Tahta raja pun dikembalikan lagi kepada HB V. Dua tahun kemudian, Perang Jawa usai sesudah elit-elit kunci di kalangan pemberontak telah mati atau ditangkap. Berakhirnya Perang Jawa menandai fase lahirnya kembali masa-masa damai bagi Jogjakarta.

Kini, dengan tiadanya peluang untuk membangun angkatan perang bagi kraton sebagaimana diatur melalui Perjanjian Belanda–HB III tahun 1812, HB V mengalihkan perhatiannya dalam dunia sastra dan keagamaan. Ia sendiri menyelesaikan karya sastra berjudul *Makutha Raja* yang memuat ajaran

kepemimpinan, yang ia hadiahkan kepada Ratu Belanda. Ia juga menempuh kebijakan kooperatif dengan Belanda sebab ia tak ingin peluang konflik dengan Kompeni terbuka kembali. Namun tindakan ini justru mendapat tentangan dari kalangan istana karena dianggap sebagai tindakan kurang ksatria. Dukungan pada HB V pun berkurang, sementara banyak kalangan mewacanakan agar adiknya menggantikan tahta. Toh raja tetap bergeming. HB V wafat pertengahan tahun 1855.

Restu Politik Belanda: Penentu Dominan Suksesi

Kita sudah memahami betapa sepuluh peristiwa suksesi tidak memiliki kesamaan signifikan. Dalam pada inilah, Jogja justru punya referensi politik mengenai suksesi yang lebih kaya dibanding Solo atau Mangkunegaran. Varian dan ragam yang tak sepola inilah yang membawa wajah unik proses politik pergantian raja di Jogja. Dari sini kita bisa menyimpulkan apa saja hal yang berpengaruh dalam suksesi di Jogja. Saya mengambil tolok ukur empat hal untuk membaca pola yang ada sepanjang 260 tahun terakhir. Keempatnya sekaligus menjadi faktor yang berpengaruh dalam suksesi. Empat hal itu meliputi:

1. Ada tidaknya kekuatan eksternal yang memberikan pengaruh. Jika ada, seberapa signifikan ia memberikan dampak.
2. Pilihan politik raja. Ini didasarkan pada pandangan politik raja dalam mengelola suksesi.
3. Penghormatan atas tata nilai yang dianut, apakah tinggi atau justru sebaliknya.
4. *Outcome* suksesi bagi internal kraton.

Jika Jogja dianggap sebagai kerajaan yang lebih banyak merepotkan Pemerintah Kolonial, tidak demikian dengan Solo. Karakteristik personal raja mempengaruhi pilihan politik raja dalam mengambil dan merespons kebijakan yang ia terapkan. Sedangkan dalam lingkup suksesi, raja selalu lekat dengan dua hal yakni tradisi besar yang ia warisi serta tekanan atau pengaruh Belanda sebagai kekuatan eksternal penyeimbang. Ketiga faktor tersebut—nilai adat budaya, pilihan politik raja, serta intervensi pihak ketiga—masing-masing menempati porsinya dalam memberikan warna dalam dinamika suksesi raja.

Perbedaan porsi ini dapat dilihat dalam berbagai fakta. Pergantian tahta dari HB II ke HB III adalah buah dari intervensi Belanda yang sangat kuat. Belanda memanfaatkan kedekatannya dengan putera mahkota HB II untuk menekan manuver HB II yang dicap sebagai "Sultan kepala batu". Lewat serangkaian persekongkolan, HB II dimakzulkan dan putera mahkota diangkat sebagai kepala pemerintahan dengan gelar *Kanjeng Raja*. Berbeda lagi ketika HB V wafat, Belanda tak banyak melakukan intervensi dalam menentukan pengganti HB V yang tak berketurunan lelaki. Penobatan GRM Mustoyo sebagai HB VI berjalan mulus. Bahkan ketika putera lelaki dari permaisuri HB V yang lahir sesudah penobatan HB VI menggugat keabsahan pamannya, Belanda segera membungkamnya.

Fakta di atas menunjukkan tingkat signifikansi intervensi kekuatan eksternal (baca: Pemerintah Kolonial) cukup besar dalam suksesi kraton. Signifikannya intervensi dan tekanan kekuatan eksternal adalah manifestasi dari kepentingan politik yang lebih

besar. Perlu diingat, Jogjakarta tidaklah 100% berdiri sebagai kerajaan merdeka bahkan sedari berdiri, sebab ia sudah menjadi vasal dari Kerajaan Belanda menurut Perjanjian Belanda dan penguasa Mataram pada 11 Desember 1749. Itu mengapa, penguasa Belanda berkepentingan secara strategis untuk membuat Jawa dalam kondisi "jinak" demi menjaga stabilitas politik yang akan mengalirkan banyak keuntungan bagi mereka.

Persoalan ini tentu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kepentingan Pemerintah Kolonial untuk menjamin suksesi tidak menimbulkan instabilitas di bidang politik, militer, ekonomi, dan sosial. Tipologi Pemerintah Kolonial yang notabene penjajah sekaligus pelaku bisnis tentu tak akan membiarkan kerugian apapun menimpa dirinya. Itu mengapa, Pemerintah Kolonial sejak awal tak segan megalokasikan anggaran yang cukup besar untuk menjamin stabilitas politik di seluruh kerajaan *Vorstenlanden*. Dari sudut pandang ini, dapat kita pahami bahwa restu politik Pemerintah Kolonial adalah sesuatu yang pokok dan penting bagi seluruh momentum suksesi politik sampai batas waktu hengkangnya mereka dari Nusantara secara permanen.

Selanjutnya, seorang raja menyandarkan diri pada pilihan dan naluri politiknya dalam persoalan strategis menyangkut kerajaan. Ini dapat dimaknai bahwa kebijakan strategis yang diambil merupakan *out put* dari nilai-nilai politik yang dianut. Sewaktu Jepang menginvasi Asia Tenggara, lalu Pulau Jawa jatuh ke tangan tentaranya, HB IX sudah ditawari untuk menjadi pemangku kekuasaan bagi seluruh kerajaan di Jawa. Itu berarti kesempatan untuk mempersatukan Kerajaan

Mataram Islam sebagaimana diimpikan oleh HB I secara mendadak muncul di pelupuk mata HB IX.[36] Jika peluang ini diambil, HB IX dapat memberikan kekuasaan yang besar bagi keturunan yang kelak menggantikannya. Jawa bisa digenggamnya dalam sekali waktu. Akan tetapi HB IX menolak mentah-mentah tawaran manis ini. Ia tak peduli dengan pewarisan tahta atas segenap Tanah Jawa.

Paradigma pribadi seorang raja yang tercermin dari fakta itu mencerminkan betapa penting kapasitas pribadi seorang raja dalam menghadapi arus zaman. Secara *de jure* Jogjakarta tunduk di bawah imperialisme Belanda–Inggris–Jepang, namun acap kali ketertundukan ini tak sepenuhnya mampu mengubah karakteristik seorang Sultan yang *Hamengku, Hamangku, dan Hamengkoni* (Partokusumo 1989).[37]

Faktor ketiga, hal yang juga berpengaruh besar terhadap suksesi di Kraton Jogja adalah strategi penyesuaian dengan nilai-nilai zaman yang berkembang luas. Penyesuaian ini dilakukan oleh seorang raja karena dua sebab, pertama inisiatif strategis yang muncul dari diri sendiri, atau kedua cenderung lebih disebabkan karena faktor "keterpaksaan" atau menyesuaikan karena "tekanan" kekuatan eksternal. Dinamika suksesi politik yang terjadi di masa pemerintahan HB VII merupakan

---

[36] HB I sesungguhnya berkeinginan untuk mempersatukan kembali Dinasti Mataram selepas terpecah melalui Palihan Nagari Giyanti tahun 1755. Berbagai upaya telah ditempuh, termasuk konfrontasi militer dan intrik perkawinan politik untuk mendapatkan peluang perubahan hak pewarisan tahta, namun tetap tidak bisa.

[37] *Hamengku* berarti melindungi dan mengayomi tanpa membeda-bedakan golongan dan keyakinan. *Hamangku* berarti tanggap dan mampu membesarkan hati dengan lebih banyak memberi daripada menerima. *Hamengkoni* berarti memiliki sikap keteladanan yang berwatak kepemimpinan yang adil dan bertanggungjawab.

cermin dari perdebatan dan tarik ulur mengenai kemampuan raja, tekanan kekuatan eksternal, dan tuntutan akan nilai zaman. Terkuaknya surat-surat rahasia Kerajaan Belanda yang membahas secara rinci mengenai penobatan dan pencabutan putera mahkota Kraton Jogja sampai dengan empat kali terjadi oleh karena faktor-faktor tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada era HB VIII. Tuntutan nilai yang terkandung dalam Paugeran Praja Kejawen menjadikan HB VIII tak pernah menyatakan ingin menyerahkan tahta Jogja kepada putera lelaki dari para *priyantun dalem*-nya (selir-selir Sultan). Padahal, sang permaisuri satu-satunya, yakni KRAy Adipati Anom Hamengkunegoro sudah "dinonaktifkan" sebagai permaisuri raja dan hidup di luar istana.[38] Sebagai seorang raja, ia paham berdiri di atas dua sisi: kekuasaan kolonial dan kekuasaan tradisional Jawa. Karena itu, ia mencoba untuk mengasimilasi tekanan kekuatan eksternal dan kewajiban untuk taat pada tata aturan nilai adat dengan memberikan perhatian besar atas proses suksesi politik tepat di penghujung usianya.

Ia memanggil pulang Dorojatun yang masih di Belanda, lalu ia serahkan pusaka keris Kyai Joko Piturun kepadanya, dan sehari kemudian ia wafat dalam kebesaran nama. Suatu kebijakan strategis yang dilakukan tepat pada waktunya. Padahal, putera lelaki

[38] Dalam istilah Jawa hal ini dikenal sebagai *dikebonake*, yakni Raja tak lagi hidup serumah dengan seorang istri oleh karena suatu sebab internal di antara keduanya. HB VIII dalam sejarahnya, melakukan hal itu kepada permaisuri tunggalnya, KRAy Hamengkunegoro. Ia tak lagi menempatkan permaisurinya sebagai seorang pendamping resmi dalam acara-acara protokoler. Hanya saja, sang istri masih tetap berstatus sebagai permaisuri raja lengkap dengan gelar dan hak-hak politiknya.

dari selir banyak yang jauh lebih dewasa dibanding Dorojatun. Namun, pilihan politik serta strategi penyesuaian atas situasilah yang mengantarkan HB VIII pada keputusan itu.

Lalu, kalau sudah tahu apa yang pernah terjadi dengan Kraton Jogja, bagaaimana dengan suksesi yang terjadi saat ini dan di masa mendatang? Bab-bab berikutnya akan memberi kita cerita dan wawasan baru mengenai hal itu. Mari kita lanjutkan!



SUKSESI MASA KINI: "DAMAR KELI"

"Yang sekarang ini kurang begitu jelas, ngambang, belum tahu juntrunge mau ke mana. Kita tunggu saja nanti pada akhirnya akan seperti apa. Tetapi saya berharap tidak sampai njomplang dalam urusan kepentingan itu, dan orang terbaiklah yang nanti akan memimpin Jogja kita ini."

(RM Pramutomo, budayawan)

Pada bab sebelumnya, kita sudah memetakan pola dan proses suksesi yang tak baku sejak era HB I sampai dengan HB X. Faktor yang membumbui suksesi raja tetap pada tempatnya. Namun, tarik ulur kepentingan aktor dan tuntutan zaman menjadi sesuatu yang semakin terasa nuansanya. Jika di awal kraton berdiri, suksesi lebih bernuansa dalam konteks kenginan elit-elitnya untuk mempersatukan kembali Dinasti Mataram seraya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Kolonial, pada masa sekarang persoalan bergeser ke arah bagaimana elit mempertahankan eksistensi kekuasaan. Strategi ini diwujudkan dengan kebijakan HB X yang ingin mengubah tatanan suksesi. Proses menuju suksesi diwarnai oleh lalu-lalang mengenai wacana raja perempuan. Hal ini tentu menimbulkan dinamika. Rupanya, pilihan politik raja mendominasi dinamika suksesi, sedang intervensi

kekuatan eksternal tak tampak sebagai faktor yang signifikan. Kita akan melihat lebih jauh bagaimana suksesi saat ini berjalan dalam dinamika itu.

Suksesi yang "Ndamar Keli"

Pada Bab II kita sudah memetakan empat faktor yang berpengaruh pada momen suksesi. Faktor itu meliputi tatanan nilai yang dianut, pilihan politik raja, pengaruh kekuatan eksternal dan *outcome* suksesi. Pada saat ini kita belum bisa mengetahui secara persis akan hasil akhir dari suksesi di masa HB X. Sejauh ini yang bisa diamati jika dipandang dari sisi raja adalah penghormatan akan tatanan nilai yang rendah yang diikuti oleh dominasi pilihan politik raja yang tinggi. Kekuatan eksternal yang berpengaruh bagi keputusan politik HB X mungkin besar terutama yang berasal dari lingkaran keluarganya, sedangkan intervensi pihak lain di luar kraton tidaklah tampak sebagai gejala yang signifikan.

Tentu saja *outcome* (hasil) dari suksesi belum bisa kita simpulkan oleh karena suksesi belumlah benar-benar berjalan. Itu mengapa, pengamatan terhadap pola suksesi di era HB X ini belum bisa menjawab teka-teki siapa yang akan secara sah duduk sebagai pengganti tahta. Semua elit kraton masih dalam tahap *wait and see*, yakni menunggu sembari mengamati situasi yang terus berjalan. Kutub raja, walaupun tak akan begitu saja menyerah dengan keadaan, tetap akan terus mencari legitimasi dan membangun kepercayaan di ranah publik. Sebaliknya, kutub konservatif disinyalir juga tak akan pernah memberikan peluang bagi kutub raja untuk meloloskan wacana raja perempuan menjadi keputusan

politik. kelemahan keduanya tampak samar. Kutub raja menyembunyikan politik dinasti, sedangkan kutub konservatif boleh jadi sudah memiliki tokoh dari kalangannya yang akan dicalonkan sebagai pewaris tahta.

Saya memparalelkan situasi ini dengan ungkapan "ndamar keli" (lentera yang masih menyala namun terbawa arus sungai), yang mengingatkan saya tentang sebuah gending bergaya Surakarta berjudul "Gending Damarkeli". Istilah "ndamar keli" merujuk pada proses suksesi yang belum bisa dipetakan seluruhnya. Fragmen-fragmen kontestasi elit kraton masih tersebar dan belum menunjukkan satu adegan yang bisa dianalisis secara tuntas. Itu mengapa, istilah *damar keli* agaknya pas. Sebelum ada listrik, masyarakat di perkampungan Jogjakarta masih menggunakan *damar/diyan* (lampu dari minyak kelapa). Lentera yang masih menyala namun terbawa arus sungai bisa ditafsirkan sebagai sesutau yang belum pasti, masih berproses. Nyala api bisa jadi padam karena percikan air atau tenggelam, bisa jadi juga tetap menyala karena nyala api selalu berada di atas permukaan air.

Berdasarkan basis kategorisasi yang sudah dipaparkan di bagian awal Bab II, suksesi masa ini belum bisa dikategorisasikan pola senyatanya. Setidaknya, pola suksesi pada saat ini menampilkan wajah yang unik sebab masih berproses apakah akan mengulang sejarah atau melahirkan perubahan politik yang ekstrem. Hanya saja, proses untuk mencapai resolusi akhir dapat direkam dalam bentuk lalu-lalang wacana mengenai bagaimana elit-elit kerajaan saling melemparkan klaim politik. kita akan mengetahuinya lebih jelas lagi.

Pola Baru, Interaksi Baru

"Sultan perempuan timbulkan pro kontra". Itulah judul berita utama halaman depan sebuah surat kabar lokal di Jogjakarta beberapa waktu silam. Judul berita itu memberikan sinyal bahwa momentum suksesi Raja Jogja di bawah Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) tampaknya akan penuh dinamika. Isu suksesi tengah bergema di kraton dan menjadi pembicaraan publik. Mengapa kemudian persoalan ini mengemuka dalam lalu lalang politik di Jogja?

Wacana raja perempuan menjadi topik hangat karena dua aspek penting. *Pertama,* isu-isu politik di lingkaran pertama kekuasaan selalu seksi untuk dikonsumsi khalayak umum. Orang cenderung tertarik untuk mengikuti informasi kontroversial yang menimpa elit penyelenggara kekuasaan, entah baik atau buruk. Sangat logis apabila segala peristiwa politik kerajaan kadang-kadang menjadi bahan obrolan masyarakat.

Kedua, sejauh ini suksesi raja selalu diikuti dengan suksesi Gubernur DIY. Meski ini tak bisa dimaknai sempit, pemahaman rakyat luas atas posisi "sultan adalah gubernur dan gubernur adalah sultan" belum hilang. Posisi Gubernur DIY tak sekadar jabatan politiik, akan tetapi ia juga jabatan kultural. Dengan begitu, raja dan gubernur bagi Jogja adalah entitas ganda yang saling bersanding dalam satu wajah. Suksesi raja kraton jelas akan memberikan dampak langsung atas suksesi gubernur. Elit kraton, media massa, dan publik Jogja tentu berkepentingan terhadap suksesi rajanya. Yang jelas, wacana ini menjadi arus dominan pola baru yang belum jelas.

Riuhnya wacana suksesi kraton pada mulanya terpantik oleh pernyataan HB X bahwa perempuan berhak menjadi raja kraton (kedaulatan rakyat 2010). Ketika media massa memuat pernyataan ini, reaksi beragam pun mengemuka. Bunga perdebatan politik yang hangat di internal Kraton, media massa, dan masyarakat publik pun mekar. Sebuah petikan judul utama artikel majalah dan *headline* surat kabar menyatakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Hamengku Buwono X: Raja atau Ratu?



Hamengku Buwono XI: Raja atau Ratu?

Sri Sultan Hamengku Buwono X melontarkan wacana raja perempuan dalam suksesi kepemimpinan Keraton Yogyakarta di masa depan. Tidak dikenal dalam sejarah paugeran keraton. Sekadar mengakomodasi isu kesetaraan gender atau ada fungsi kepentingan?

Sumber: Gatra, 26 Juni 2010

Gambar 3.2 Raja Yogya Bisa Perempuan



Sri Sultan HB X Soal Suksesi Kraton

Raja Yogya Bisa Perempuan

Sumber: Kedaulatan Rakyat 15 Mei 2010

Gambar 3.3 Sultan Perempuan Timbulkan Pro Kontra



Sultan perempuan timbulkan pro kontra

JOGJA: Pernyataan Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang kemungkinan perempuan dapat menduduki tahta mahkota Keraton menimbulkan pro kontra yang tajam diberbagai kalangan.

• Lebih lengkap hal. 19

Sumber: Harian Jogja 17 Mei 2010

Ramainya pembicaraan mengenai wacana raja perempuan lalu melebar ke berbagai hal mengenai suksesi di Kraton Jogja. Muncul pro dan kontra, kutub raja yang pro serta kutub konservatif yang kontra. Kita akan melihat bagaimana dua pihak itu berinteraksi dalam tataran wacana, serta alasan politik yang dikemukakan oleh masing-masing pihak.

Kutub Raja: Penggunaan Legitimasi Hak Sultan dan Politik Gender

Kutub raja adalah pihak yang afirmatif terhadap wacana raja perempuan. Mereka terdiri dari HB X sendiri, permaisuri, aktivis gender dan beberapa kalangan yang setuju dengan wacana itu. Sudah barang tentu mereka mempunyai pijakan argumen dalam sikap afirmatifnya terhadap wacana itu. Pelacakan akan basis inilah yang akan mengantarkan kita bagaimana elit menempuh strategi kekuasaan. Saya berbicara dalam koridor

normatif terlebih dahulu. Wacana yang dilontarkan oleh HB X mengenai raja perempuan ditopang oleh dua hal yakni hak raja secara pribadi dan pandangan kesetaraan gender sebagai basis ideologinya. Jadi, wacana raja perempuan muncul secara inheren dalam kedua hal tersebut. Kita akan menelusuri basis argumen yang mereka gunakan.

Legitimasi Lapis Satu: Hak Raja

Hak diartikan sebagai sesuatu yang layak didapatkan oleh karena memang sudah melekat pada sesuatu individu. Ada banyak sekali hak bagi seorang Sultan Jogja. Salah satunya adalah menerapkan kebijakan baru. Oleh karena itu lapis pertama argumentasi HB X adalah setiap raja berhak untuk melakukan perubahan atas kerajaan yang dipimpinnya. HB X mengatakan bahwa:

> *"setiap Yang Jumeneng, yang bertahta itu melakukan perubahan… orang luar itu tidak tahu bahwa di Kraton Jogja itu lain, setiap sultan berhak melakukan perubahan…"* (Wawancara dengan Sultan HB X, dokumen pribadi, Mei 2010).

Bagaimana bisa raja berhak melakukan perubahan? Untuk sampai pada pemahaman itu, agaknya kita perlu mengingat kembali makna gelar seorang Raja Jogja. Gelar utuh seorang Sultan Jogja adalah

> *Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrakhman*

Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping ... Ing Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat.

Apabila dipenggal menurut hermeneutika Jawa, ia akan memiliki makna berikut ini:

Apabila makna tersebut dinarasikan, akan ditemukan dua bilahan besar yakni hak seorang raja dan kewajiban yang mesti dilunasinya. Kewenangan sebagai seorang raja menurut alam pikir Jawa (baca: Mataram Islam) adalah seorang raja memiliki kekuasaan yang besar, luas, dan kewenangan hukum yang besar pula (Moedjanto 1987).[39]

Hak yang besar ini direpresentasikan dalam frase *Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono*. Bersamaan dengan itu, seluruh rakyat yang ada di wilayahnya haruslah menghormati hak rajanya oleh karena hak raja bisa dibaca sebagai kewajiban bagi kawulanya. Salah satu pasal dalam naskah *Serat Puji Warno Warni* menyinggungnya demikian:[40]

Kaping tiga bektia marang ratu gegentining Rasulullah	*Berbaktilah pada raja yang menggantikan Rasulullah*
Bekti ngratu sasat ambekteni ing Kanjeng Rasulullah	*Sebab berbakti untuk raja sama dengan berbakti untuk Rasulullah*

[39] Pemaknaan ini selaras dengan tulisan G. Moedjanto mengenai kekuasaan Raja-raja Mataram.

[40] *Serat Puji Warno-Warni* adalah salah satu arsip koleksi perpustakaan Kawedanan Hageng Punakawan Widyabudaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang oleh J. Lindsay dkk dikategorikan dalam *Serat Tajussalatin lan sapiturute*. Ada 7 naskah diberi judul Serat

Dengan demikian, hak HB X untuk melakukan perubahan adalah hak yang melekat pada pribadinya sebagai raja. Tentu ada batasan-batasan dalam pelaksanaan hak, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Untuk itu, meski hak HB X terlegitimasi dalam gelar yang ia peroleh, ia tak bisa lepas dari tata kewajaran dalam alam pikir Jawa. Perubahan yang bagi HB X merupakan hak tidaklah bersifat mutlak. HB X mengakui hal ini dengan mengatakan:

> *"Perubahan itu didasari pada aspek pondasi, tidak bisa melanggar apa yang sudah menjadi pondasi pada waktu membangun Kota Jogjakarta... Tugu, Kraton, Panggung Krapyak... yang jumeneng punya kewajiban menghantarkan setiap umat, setiap rakyat, khususnya jogja, untuk menuju Tugu..."*

Mengapa harus melakukan perubahan? Bagi HB X, perubahan di kraton sangat memungkinkan, oleh karena ini bagian dari strategi menghadapi zaman. HB X berpendapat bahwa zaman yang berubah tentu menuntut pemikiran manusia yang berubah pula. Sebab jika tidak, manusia justru akan terkungkung oleh pemikiran yang jauh tertinggal dengan zaman.

> *"Ya itu tadi, di Kraton setiap Sultan bisa berubah, bisa melakukan perubahan. Jadi nafas yang ada di Kraton mesti seimbang dengan yang di luar Kraton, dengan masyarakat. Kalau terjadi gap, ya bodhone sultane..."*

Tajussalatin. *Serat Puji Warno-Warni* bernomor kodex W.291C, D.30 yang terdiri atas 4 teks yakni Tajussalatin, Suluk Sujinah, Serat Seh Tekawardi, dan Serat Seh Hidayatullah. Karena berdasar isi yang demikian beragam, maka naskah ini diberi nama Serat Puji Warno-warni. Serat Puji II disusun pada masa pemerintahan Sultan HB V sesudah Perang Jawa usai.

> *"Bagi saya, yang namanya tradisi, itu sesuai dengan zamannya. Tradisi budaya itu dinamis, tergantung masyarakatnya dan zamannya, kalau tidak sesuai dengan tantangan zaman dan keadaan, tinggalkan saja. Tradisi itu kalau sudah tidak cocok dengan tantangan zaman jangan dipertahankan, karena kebudayaan itu produk manusia, yang sifatnya dinamis, tidak stag. Tradisi itu gitu, kecuali filosofi... Tradisi yang tidak sesuai dengan zamannya, dihilangkan..."*

> *"Makanya dari awal sudah terkondisioning, begitu saya diputuskan oleh keluarga untuk mengganti. Sebelum ada peristiwa jumenengan, saya sudah bertemu dengan keluarga, pegawai, abdi dalem semua, bahwa nanti akan ada perubahan-perubahan... karena tantangannya memang itu, jadi mereka sudah terkondisioning"*

Dengan pijakan argumentasi ini, HB X merasa perlu untuk memberikan wacana mengenai dimungkinkannya seorang perempuan boleh menjadi raja. Sebelum itu, beberapa waktu jelang Pemilu Presiden 2009, dalam sebuah acara *talk show* yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta, seorang penonton bernama Langit Krisna Haryadi bertanya kepada HB X yang kebetulan diundang menjadi narasumber. Ia bertanya:

> *"Saya bukannya nggege mongso (berpraduga) bahwa Sri Sultan HB X dicintai rakyat. Masalahnya HB X tidak punya putera mahkota, sebab lima anak Sultan semua perempuan. Saya rindu nantinya Jogja dipimpin seorang ratu. Kalau boleh tahu, siapa ratu yang telah disiapkan"*

HB X tak memberikan jawaban jelas atas pertanyaan itu, namun secara mengejutkan ia menyatakan bahwa:

> *"Kalau soal putera mahkota, itu juga biar terserah rakyat. Kalau mau laki-laki, saya punya adik laki-laki. Tapi jika rakyat menghendaki perempuan, ya silakan".*

Berkali-kali Sultan menekankan kata-kata "apabila rakyat Jogja menghendaki" (Harian Jogja, 15 Mei 2010). Ini berarti bahwa HB X membuka wacana bahwa suksesi seakan bukan hanya menjadi urusan pribadi raja dan keluarga, tetapi juga menjadi urusan publik/ bersama—meski hal ini agaknya tak kan mudah diterapkan.

Terkesan benar bahwa Sultan berhati-hati untuk memilih diksi yang tepat seakan ia ingin menolak asumsi bahwa ia seorang raja yang berkuasa penuh, yang bisa melakukan segalanya layaknya raja-raja di masa Mataram Hindhu atau Majapahit. HB X sadar betul bahwa dirinya kini menjadi seorang raja di alam modern, dan tunduk pada hukum nasional Republik Indonesia. Karenanya, sangat logis apabila ia mengakui bahwa kekuasaannya sebagai raja tak lebih besar dari seorang kepala rumah tangga. Hak-hak *octroi* yang dimiliki oleh para leluhurnya tak lagi seratus persen ia nikmati.

Namun, dalam konteks ini HB X tampaknya justru menampilkan wajah paradoks. Memang benar bahwa kekuasaannya sebagai Sultan Jogja tak lagi seperti dahulu. Ia tak punya legiun militer, tak berhak memiliki persenjataan, tak berhak mencetak uang sendiri, tak

berhak memungut pajak, juga tak lagi didewakan sebagaimana raja-raja terdahulu. Namun hak protokolernya sebagai raja kraton masih melekat dalam beberapa hal terutama dalam pengambilan kebijakan politik di internal rumah tangga kraton. Ketika berhadapan dengan wacana pergantian tahta dirinya, di satu sisi ia menampik eksklusivitas yang melekat pada dirinya dengan mengatakan semua tergantung pada masyarakat Jogja, namun di sisi lain ia juga menegaskan memiliki hak pribadi untuk mengambil keputusan itu.

Publik boleh saja berasumsi positif, dengan berpikir bahwa raja tengah menggawangi proses perubahan bagi Kraton Jogja. Seorang akademisi di SKH Kedaulatan Rakyat menulis pendapatnya. Dalam kolom pendapatnya itu, ia berujar "Undang-Undang Dasar negara saja bisa diamandemen, tentulah *paugeran* juga bisa dengan mudah diubah" (Purwoko, 19 Mei 2010).

Legitimasi Lapis Dua: Wacana Kesetaraan Gender

Hal kedua dan yang paling penting mengapa HB X mengemukakan pendapatnya mengenai perempuan boleh duduk sebagai raja adalah karena ia menganggap kesetaraan gender sebagai nilai sosial yang harus terus dikembangkan. Gender dalam tataran ideologi mempunyai basis misi mengangkat kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan menyangkut peran, partisipasi, pembagian hak, kesempatan di dunia kerja, dan lain-lain. Selama ini laki-laki mendominasi dalam semua ranah kehidupan. Apalagi, dalam konteks kerajaan Islam tradisional di Jawa, hadirnya gender merupakan sesuatu hal yang baru sama sekali sebab bagi

kalangan terutama di Asia, pandangan terhadap perempuan masih diliputi oleh paradigma lama, bahwa perempuan sebatas *konco wingking* bagi laki-laki. Kini, kesetaraan gender menjadi wacana umum di tengah masyarakat yang semakin modern. Ia sudah mulai diterima dan mendapat perhatian baik dari elit-elit penguasa.

Sultan HB X sendiri, dalam amar pikirannya, menyatakan bahwa ia menghormati laki-laki dan perempuan secara setara. Dengan demikian, perempuan pun memiliki otoritas yang sama dalam pengelolaan tanggung jawab sebagai pemimpin. Pada masa modern sebagaimana sekarang, tradisi lama yang sekiranya tidak sesuai lagi dengan aspirasi zaman, tak menutup kemungkinan untuk diubah, termasuk dalam soal tahta (Kedaulatan Rakyat, 19 Mei 2010). Gender, bagi HB X adalah gerakan sosial. Ia mengatakan,

> *"Ya itu tadi, dulu wanita ini tidak berperan, sekarang berperan, dalam arti menduduki posisi-posisi institusi. Yang penting dalam persamaan gender, kemandirian menjadi faktor utama, tidak terantung pada orang, sehingga dia punya potensi sendiri untuk tumbuh kembang sendiri..."*

Lalu, bagaimana dengan kepentingan pribadi HB X dalam wacana raja perempuan? Kita lihat bagian berikutnya.

Tujuan Mengukur Estimasi Politik

Ada peluang yang cukup rasional untuk kita dapat mengatakan bahwa HB X sesungguhnya tengah mengetes air yang tenang. Boleh jadi. Sebab, politik mengetes air (*testing the water*) sudah berjalan "dengan baik". Air ternyata bergolak, dan kalangan yang memposisikan diri secara diametral ternyata juga banyak. Artinya, Sultan sudah memetakan secara pasti siapa berposisi apa. Ini selaras dengan komentar Arie Sujito, sosiolog UGM, bahwa HB X sebenarnya tengah mengestimasi kemungkinan Pembayun untuk menjadi penggantinya (Sujito, Minggu Ketiga Mei 2010). Manuver baru akan ditempuh berdasarkan respons publik. Namun, tantangan terbesar justru ada di internal kraton. Siapa saja kerabat yang masih berpandangan kuat memegang tradisi yang sudah ada dan siapa saja kerabat yang sudah bisa menerima kesetaraan gender, itulah yang akan dipetakan Sultan melalui wacananya itu.

Kutub Raja menempuh strategi mengetes air tenang di dua level untuk mendapatkan respons terkait wacana raja perempuan. *Pertama*, di level lingkaran dalam kraton. Menurut seorang narasumber terpercaya, strategi ini ditempuh dengan mengirimkan kuesioner kepada seluruh *bupati* dalam struktur pemerintahan kraton. Hasilnya 98% menolak apabila Pembayun, puteri tertua HB X, menjadi raja. Konon, kuesioner ini bahkan disusun atas sokongan kalangan akademisi.[3] *Kedua*, di level publik, memanfaatkan momentum lalu melontarkan wacana ke publik melalui media massa. Hasilnya pun sebagian publik

[41] Informasi ini diperoleh dari salah seorang kerabat Kraton Jogja. Nama sengaja tak disebut demi menjaga privasi yang bersangkutan.

masih tak sependapat. Hasil dari kedua respons di level internal dan eksternal ini tentu kelak akan mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh HB X.

Titik Kelemahan Argumen

Mesti gender diartikulasikan dalam kebijakan yang koheren dengan misi untuk mencapai keadilan bagi kaum wanita, ada titik lemah di mana gender justru berpeluang untuk dikonversi menjadi alat kekuasaan. Dalam hal ini, gender sebagai ideologi boleh jadi berubah tidak murni oleh karena ia telah dirasuki oleh motivasi dan kepentingan politik. Gender adalah gerakan ideologis, sedangkan politik gender lebih merupakan instrumen politik, dengan kebijakan-kebijakan yang mendasarinya, digunakan untuk mencapai, melegitimasi, dan atau mempertahankan kekuasaan. Artinya, gender dan politik gender adalah dua hal yang sama sekali berbeda.

Begitu juga dengan tafsir mengenai hak raja. Makna hak bagi raja tidaklah untuk melakukan perubahan demi kepentingan pribadi atau melanggengkan kekuasaan. Muncul disparitas yang samar dalam pernyataan-pernyataan HB X mengenai raja perempuan. Saya menyebutnya sebagai kebocoran argumen ilmiah. Sebab, dengan mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi raja otomatis akan diparalelkan dengan kenyataan bahwa ia tak memiliki keturunan laki-laki. Jika HB X membenarkan argumen mengenai perempuan bisa naik tahta Kraton Jogja karena alasan penyesuaian zaman, mengapa tidak sekalian seorang permaisuri juga diperbolehkan menggantikan

tahta?. Bukankah GKR Hemas juga penyokong gerakan kesetaraan gender?.

Jika gender memang menjadi pijakan utama, maka HB X mestilah mengesampingkan aturan mengenai nasab dinasti yang harus dipegang oleh keturunan langsung (anak kandung). Dengan demikian, ada semacam titik lemah atas basis argumen mengenai wacana raja perempuan ini. Baik argumentasi hak maupun gender tidaklah semata-mata menjadi alasan pembenar yang mutlak bagi HB X dalam pemunculan wacana raja perempuan ini. Cacat dalam tataran ilmiah menjadikan wacana HB X mudah untuk diserang oleh pihak yang kontra. Apakah kedua basis argumen ini kelak akan diterima oleh kerabat kraton dan masyarakat? Kita lihat saja.

Kutub Konservatif: Argumen Kembali kepada Khittah Kraton

Riuhnya suksesi yang dipantik oleh kebijakan HB X mengenai perubahan paugeran, tentu saja, menimbulkan kutub yang kontra. Saya menyebutnya sebagai kutub konservatif. Mereka terdiri dari elit-elit yang merupakan kerabat kraton, akademisi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Kita bisa melihat ekspresi penolakan kalangan ini melalui sebuah nukilan berita di surat kabar lokal seperti terlihat berikut:

Gambar 3.4 Wacana Perempuan Raja Yogya

WACANA PEREMPUAN RAJA YOGYA

Gusti Yudha: Ngogreh-ogreh Paugeran!

KERATON Yogyakarta kembali jadi fokus. RUUK DIY belum juga rampung dibahas di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X melontarkan wacana menghentak: Perempuan bisa jadi raja.

Wacana itu langsung mengundang opini publik. Paugeran di keraton menurut Drs GBPH H Yudhaningrat, raja (sultan) harus laki-laki yang merupakan keturunan langsung raja. Diutamakan anak laki-laki dari permaisuri tertua. "Bila tidak ada anak laki-laki raja dari *garwa prameswari*, baru dicari dari anak laki-laki *garwa ampeyan* (selir)," katanya.

Kerabat keraton Yogyakarta ini menambahkan, jika ada lebih dari satu *garwa ampeyan*, diprioritaskan dipilih dari *garwa ampeyan* tertua. "Persyaratan lainnya, sehat jasmani dan rohani," jelasnya.

Masyarakat sering mengaitkan kepemimpinan keraton dengan wahyu (pulung). Menurut Gusti Yudha, pulung merupakan hal gaib yang itu akan muncul dan *manjing* dengan sendirinya ke kandidat raja.

Tentang wacana perempuan menjadi raja di keraton Yogyakarta, sebagai kerabat *dalem*, Gusti Prabu menganggap itu sama halnya *ngogreh-ogreh paugeran*. Hal yang sebelumnya sudah menjadi aturan baku di keraton akan diamandemen.

"Raja (sultan) Yogyakarta harus laki-laki. Ini tak bisa ditawar. Karena raja keraton Mataram punya gelar *Sayidin Panatagama Khalifatullah*. Yang namanya imam agama Islam harus laki-laki," tambah *rayi dalem* Sri Sultan HB X ini. Keraton Yogyakarta merupakan kelanjutan dari dinasti Mataram Islam. Maka gelar bagi rajanya pun Sultan (Yogya) dan Susuhunan /Sunan (Solo).

Karena Mataram merupakan kerajaan Islam, sehingga imamnya (raja) harus laki-laki. "Jika konstitusinya bukan kerajaan Islam, bisa-bisa saja rajanya perempuan. Menurut sejarah di tanah Jawa memang pernah ada beberapa raja perempuan. Tapi ingat, mereka bukan kerajaan Islam," lanjut Gusti Yudha.

Paugeran merupakan aturan baku yang dipegang keraton. Seharusnya orang luar tidak berhak mengubah paugeran tersebut. Itu menjadi hak prerogratif kerabat keraton.

Terkait lontaran Sri Sultan HB X yang mewacanakan kemungkinan keraton Yogya dipimpin perempuan, menurut Gusti Yudha, sebagian menolak. Sebagian lainnya pilih diam. Di halaman sebelas laporan ini berlanjut. ■ - o

Sumber: *Minggu Pagi*, edisi minggu ketiga Mei 2010

Bagi kutub ini, argumen pokok yang mereka sampaikan meliputi pondasi filosofi raja, aspek kesejarahan, dan kekhawatiran akan adanya fungsi kepentingan di balik wacana itu. Intinya, kembali kepada *khittah* adalah pesan mereka.

Aspek Filosofis Keharusan Laki-Laki Sebagai Sultan

Jika kutub raja menggunakan kata-kata awal dalam gelar seorang sultan sebagai argumen filosofis atas kepemilikan hak untuk melakukan perubahan, kutub konservatif menggunakan frase kata-kata akhir dalam gelar itu. Bagi kalangan ini, gelar Sultan Jogja tak sekadar gelar kebesaran tanpa makna karena ia memiliki dua sisi penting: makna filosofis dan implikasi logis. Paruh kedua gelar seorang Sultan Jogja jika dibabar frase demi frase adalah sebagai berikut:

Senopati Ing Ngalogo	: panglima perang
Ngabdurrakhman	: abdi dari Yang Maha Pengasih
Sayidin	: pemimpin agama (*pangarso*, Jw)
Panatagama	: penjaga hukum & tatanan agama
Khalifatullah	: wakil/utusan Allah di muka bumi
Ingkang Jumeneng Kaping..	: yang bertahta ke- ...
ing Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat	: di negara Ngayogyakarta Hadiningrat.

Ini adalah bilahan kedua yang menggambarkan posisi raja yang mengaitkan dirinya secara langsung dengan tugas dan kewajiban yang dipanggulnya. Kewajiban itu meliputi raja sebagai *senopati ing ngalogo* atau panglima perang yang menjaga perdamaian negara ataupun menentukan perang, *abdurrakhman sayidin panatagama* atau pemimpin agama (baca: Islam) yang berkewajiban menjaga tatanan Islam tetap pada tempatnya, sekaligus *khalifatullah* yakni wakil Tuhan yang hadir di muka bumi dengan tugas memimpin-mengantarkan rakyatnya menuju keadilan dan kemakmuran negeri. Jika dirangakai secara utuh, tanggung jawab itu disandangnya dalam frase *Senopati Ing Ngalogo Nbadurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah*. Dalam persoalan kepemimpinan dan agama, frase *Sayidin Panatagama Khalifatullah* dianggap menjadi landasan filosofis mengenai siapa yang berhak duduk sebagai raja.

Frase itu pula yang mengandung doktrin kekuasaan Islam yang telah menjadi roh bagi peradaban Mataram Islam. Roh ini yang kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Giyanti 1755 yang secara tegas memberikan kekuasaan dan kedaulatan penuh bagi Kraton Jogja sebagai pemerintahan yang sah dan memiliki hak waris turun temurun. Yang dimaksud dengan hak waris turun temurun adalah kedaulatan wilayah yang ada di bawah kekuasaan Kraton Jogja menjadi hak sepenuhnya bagi setiap raja yang menggantikan raja sebelumnya. Pertimbangan inilah yang kemudian dijadikan sandaran filosofis atas proses suksesi.

Bagi kutub konservatif perubahan *paugeran* kraton dalam pengaturan suksesi disinyalir akan menimbulkan goncangan yang besar. Sebab, perubahan satu klausul mengenai jenis kelamin raja akan berakibat pada perubahan tata nilai dan sistem ideologi yang dianut kraton. Konsideran pengaturan mekanisme suksesi di Kraton Jogja sudah final: Fiqih Islam dalam hukum *khilafah*. *Al-Mulk* (raja) dalam konsep ini adalah seorang pria. Kontradiksi wacana raja perempuan dikhawatirkan akan menyebabkan disharmoni sosial bagi Jogja sendiri.[42] Penegasan ini disampaikan oleh salah seorang pangeran yang mengatakan,

> *"Jadi gini, raja itu salah satu ungkapan filosofinya adalah cemani jalu jati. Ayam cemani itu ayam murni, kalo disilangkan tetap jadi ayam cemani. Ini bermakna*

[42] Ini senada dengan pernyataan berbagai tokoh masyarakat seperti Djoko Suryo (sejarawan UGM), Arie Sujito (sosiolog UGM), dan KH Muhaimin Yahya (Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman DIY) dari berbagai sumber media massa pada periode Mei dan Juni 2010.

seorang raja harus keturunan langsung dari seorang raja sebelumnya. Ini sudah baku lho ya di Jogja, ya beda lagi mungkin di Mangkunegaran, mereka cucu bisa, keponakan bisa, saudara tua bisa. Tapi kalo Jogja gitu, nasab dinasti bisa melenceng kemana-mana. Nah, jalu itu taji, lambang ayam jantan. Jati itu sejati. Jadi seorang calon raja maupun raja yang bertahta haruslah seorang lelaki sejati. Istilahnya dia itu lelananging jagat, seorang yang hidup sebagai sebenar-benarnya pria sejati." (Yudhaningrat 2010, komunikasi personal, 31 Agustus 2010. [43]

Pentingnya makna *sayidin panatagama khalifatullah* tampaknya mendapat perhatian besar dalam kesusateraan kraton. Sebuah naskah prosaik yang ditulis pada era HB V, *Serat Puji Warno-Warni,* menuliskan secara gamblang mengenai persyaratan untuk bisa menjadi raja. Pasal kelima dalam *serat* ini khusus membahas mengenai perilaku raja dalam memelihara rakyat di negaranya (bahasa prosaik dalam naskah asli tertulis *tingkahing para ji/ ingkang sami rumeksa ing bala/ kukuma ing keratone*). Ada 10 syarat sebagaimana tertulis dalam pasal kelima *Serat Puji Warno-Warni*:

"Imam Bukari wasiyat supaya wong donya lan para ratu ngawruhi wong-wong kang drajade luhur kuwi. Miturut Kitab Idabul Muluk, kanggo dadi raja sing becik kuwi sarate ana 10: 1. Akil balig, supaya raja bisa mbedakake ala lan becik, 2. Alim, yaiku ahli ngelmu, ngerti maca tulis lan ngerti carita

[43] Salah satu adik Sultan HB X dari garis ibu KRAy Hastungkoro.

kanggo tepa tuladha, 3. Bisa milih punggawa kang apik budine lan pinter micara, 4. Alus wicarane lan bagus rupane kang marakake wong tresna marang dheweke, 5. Loma, ora cethil, 6. Tansah gawe kabecikan lan ngelingake wong supaya gawe kabecikan, 7. Wani maju ing perang, 8. Ngula anggone mangan lan turu, 9. Aja kerep amicara marang wong wadon lan wong cilik, 10. Lanang, ratu kuwi sing utama wong lanang, dudu wong wadon."

Terjemahan bebas penggalan serat ini adalah sebagai berikut:

"Imam Bukhari berwasiat agar manusia dan para raja bisa memberikan ilmu dan pemahaman bagi mereka yang ditakdirkan berpangkat tinggi. Menurut Kitab Adab Al-Mulk, untuk menjadi seorang raja yang baik itu syaratnya ada 10: 1. Akil baligh, agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, 2. Alim, yaitu ahli dalam baca dan tulis supaya dapat menjadi teladan yang baik, 3. Dapat memilih menteri dan pejabat negara yang luhur budi dan cerdas berbicara, 4. Halus bicara dan rupawan, 5. Dermawan. 6. Selalu mengerjakan kebajikan dan mengajak semua orang untuk mengerjakannya juga, 7. Berani berperang, 8. Mengurangi makan dan tidur, 9. Tidak banyak berbicara dengan kaum wanita dan orang kecil (yang bisa merendahkan martabat), 10. Seorang laki-laki, sebab raja itu yang utama adalah pria, bukan perempuan."

Selain itu, masih pada serat yang sama, disebutkan bahwa *Pangeran iku minangka tajaline rasa lan tajaline rasul* (raja adalah penampakan rasa sekaligus penampakan rasul) (Suryo, Djoko 2001: 167-275). Konsep kerasulan dalam Islam selalu mengikuti garis laki-laki sebagai tokohnya. Ini berbeda dengan konsep "nabi", sebab ada banyak nabi sepanjang sejarah umat manusia, dan memang tak hanya lelaki yang pernah ditunjuk sebagai nabi di tengah umatnya, perempuan pun ada. Namun, konsep kerasulan dalam Islam menunjukkan bahwa seluruh rasul yang diakui dalam Islam berjumlah 25 dan kesemuanya adalah laki-laki. Posisi raja adalah *pangarso* (pemuka) yang menjadi sumber kelestarian pelaksanaan Islam. Seorang Sultan adalah *khalifatul fil ardh,* wakil Tuhan yang diberi kewenangan di muka bumi, juga *dzillullah fil ardh,* raja adalah bayangan wajah Tuhan (*wewayanganing Pangeran*).

Bagaimana Menurut Islam?

Kraton Jogja adalah estafet Mataram Islam. Ia dapat dipandang sebagai kekhalifahan lokal di Jawa. Gelar seorang Sultan Jogja dan semua simbol yang dianut kraton diambil dari tata nilai Islam. Sebagai kerajaan yang menabalkan diri sebagai dinasti Islam, maka perlu kiranya kita menelusuri mengenai pandangan Islam mengenai kepemimpinan wanita. Secara umum bisa dikatakan bahwa wanita yang memimpin suatu kaum tidaklah diperkenankan dalam Islam. Ini merujuk pada Al Quran yang mengatakan "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita" (An Nisaa: 34) yang tafsir resmi menurut Imam Qurthubi dituliskan sebagai "para hakim, amir (penguasa), dan orang yang berperang tidak

diperbolehkan wanita" (Era Muslim, 15 Juni 2010).[44] Larangan ini menurut Islam merupakan konsekuensi atas anugerah Allah yang lebih bagi laki-laki sehingga mendapatkan keutamaan dalam Islam.

Tafsir Ibnu Katsir dan Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz juga demikian, kepemimpinan wanita dan pemilihannya sebagai pemimpin publik bagi kaum Muslimin tidaklah diperbolehkan sebagaimana ditunjukkan oleh Quran, Sunnah dan ijma'. Walaupun demikian, kepemimpinan wanita dalam pekerjaan tidak dilarang. Yang dilarang dalam tafsir Islam adalah wanita sebagai pemimpin publik. Suatu kali Nabi mengomentari kepemimpinan puteri Raja Kisra di Persia dengan berkata "Tidaklah sekali-kali beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita" (HR Bukhari).

Tradisi Pewarisan Tahta Dalam Aspek Historis

Pranatan (peraturan) Kraton yang kemudian disebut sebagai *paugeran praja kejawen*—meski tidak pernah diundangkan dalam dokumen resmi—yang berlaku sampai dengan hari ini "menyatakan" bahwa seorang puteri, sekalipun dari permaisuri raja (*garwa padmi*), tidak lazim menduduki tahta kraton. Di masa lalu, puteri dari *garwa padmi* Susuhunan Paku Buwono X, GKR Pembayun, dan puteri dari *garwa padmi* Mangkunegara VII, Gusti Nurul, tidak menggantikan tahta ayahandanya. Di Kraton Jogja sendiri juga demikian. Pada 5 Juli 1855 HB VI, adik tertua HB V, naik tahta menggantikan HB V yang wafat namun tidak memiliki putera laki-laki.

---

[44] Tegasnya larangan wanita tampil sebagai pemimpin diterapkan secara ketat di Timur Tengah hingga kini. Bahkan di Arab Saudi, perempuan diharamkan menyetir mobil, dan jika melanggar akan ditangkap aparat kepolisian.

Aplikasi atas hal ini dapat ditelusuri secara historis melalui dokumen sejarah. Misalnya saja, dalam naskah Perjanjian Giyanti 1755, Belanda telah secara tegas mencantumkan klausul pasal pengaturan pengganti raja dengan mencantumkan kata-kata *"…separuh dari kerajaan Mataram diberikan kepada beliau (HB I) dengan hak turun-temurun pada warisnya, dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Raden Mas Sundoro"*.

Hal serupa juga terdapat dalam naskah perjanjian berdirinya Pura Pakualaman yang ditandatangani oleh Sri Paduka Paku Alam I dengan Pemerintah Kolonial Inggris pada 17 Maret 1813. Tertulis dalam pasal 1 perjanjian tersebut sebagai berikut:

> *"Pemerintah Inggris berjanji untuk membayar Pangeran Paku Alam seumur hidupnya, ... dan hal tersebut (gaji bulanan, kekuasaan dan tanah) selanjutnya diturunkan kepada putera tertuanya berdasarkan syarat-syarat dan kondisi yang sama."*[45]

Suatu hari pada tahun 1913, dalam kesempatan pertemuan dengan Residen Belanda di Jogjakarta untuk membicarakan pergantian tahta, HB VII yang sudah lanjut usia dan berpendengaran kurang begitu baik mengatakan:

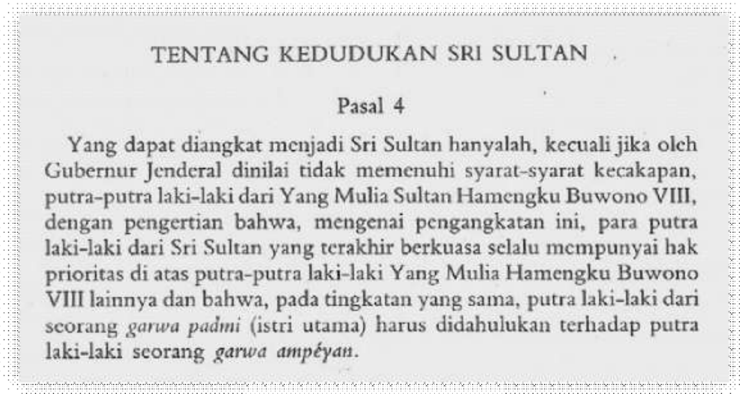
> *"menurut adat dan tradisi Kejawen, putera terakhir saya yang dilahirkan oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Raden Mas Sujadi, seperti yang kini*

[45] Disesuaikan dengan transkrip naskah asli yang tersimpan di Pura Pakualaman.

bernama Pangeran Puruboyo, harus dipertimbangkan untuk menduduki jabatan putera mahkota". (Surat No. 66, 20 Mei 1913)[46]

Arsip Kraton Jogja terkait suksesi paling kontemporer terdapat dalam naskah perjanjian antara Sultan HB IX dengan Pemerintah Kolonial Belanda pada Maret 1940. Naskah ini adalah traktat politik terakhir yang diteken oleh kraton kepada pemerintah kolonial. Naskah ini malah menyebutkan secara rinci mengenai siapa yang berhak dan layak menggantikan tahta, sebagai hasil permakluman Belanda atas tatanan suksesi di Kraton Jogja. Perlu diketahui bahwa Belanda tak pernah mengotak-atik tatanan suksesi di Jogja. Dokumen transliterasi pasal pengaturan suksesi menyatakan sebagai berikut (Roem, M 1982: 303):

Gambar 3.5. Petikan Pasal Pengaturan Suksesi Era HB IX



TENTANG KEDUDUKAN SRI SULTAN

Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi Sri Sultan hanyalah, kecuali jika oleh Gubernur Jenderal dinilai tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan, putra-putra laki-laki dari Yang Mulia Sultan Hamengku Buwono VIII, dengan pengertian bahwa, mengenai pengangkatan ini, para putra laki-laki dari Sri Sultan yang terakhir berkuasa selalu mempunyai hak prioritas di atas putra-putra laki-laki Yang Mulia Hamengku Buwono VIII lainnya dan bahwa, pada tingkatan yang sama, putra laki-laki dari seorang *garwa padmi* (istri utama) harus didahulukan terhadap putra laki-laki seorang *garwa ampéyan*.

[46] Pernyataan HB VII ini diperoleh dari transkrip pertemuan yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui sebuah surat rahasia atas nama kantor Karesidenan Jogjakarta.

Jika dikomparasikan, baik Jogjakarta maupun Surakarta tak memiliki perbedaan dalam hal prinsip pengelolaan suksesi. Dokumen *Troonsopvolging in het Rijk van Soerakarta* juga memuat pasal mengenai pasal penentuan putera mahkota sebagaimana terlihat berikut:

> *"Menurut adat yang berlaku, pangeran yang dapat menjadi putera mahkota adalah putera tertua raja dengan permaisuri. Jika raja tidak memiliki anak putera dari permaisuri, maka yang diberi kedudukan sebagai penggantinya adalah adik raja yang lahir dari permaisuri. Apabila adik raja yang dimaksudkan ini tidak ada, maka yang berhak adalap paman raja yang lahir dari permaisuri. Jika paman ini tidak ada, maka kedudukan diberikan kepada putera sulung raja yang terlahir dari seorang selir"* (Hadisiswaya 2009: 108).[47]

Maka, menjadi jelas alasan bagi kalangan konservatif untuk menekankan pentingnya menghormati tradisi pewarisan tahta yang sudah sekian lama berlangsung. Apalagi, suksesi yang pernah berlangsung sejak kerajaan berdiri tidak pernah menyentuh aras diskursus jenis kelamin pewaris tahta.

Kekhawatiran Akan Distorsi Fungsi Kepentingan

Kutub konservatif juga mengatakan bahwa wacana raja perempuan merupakan ekspresi kepentingan pribadi raja. Secara ginekologis, HB X tak

[47] Dokumen Kerajaan Belanda sebagaimana diarsipkan oleh KITLV, kode dokumen H 51 Ia, halaman 9, sebagaimana dikutip oleh Hadisiswaya, AM 2009.

punya penerus tahta karena kelima anaknya perempuan. Mereka adalah GKR Pembayun, GRAy Nurmagupita, GRAy Nurkamnari Dewi, GRAy Nurabra Juwita, dan GRAy Nurastuti Wijareni. Jika konsepsi Pareto ditarik ke dalam konteks suksesi di Kraton Jogja, maka secara biologis selesai sudah garis keturunan pewaris tahta bagi HB X (Haryanto 2005).

Bisa dipahami bahwa di sini, naluri seorang ayah berjumpa dengan naluri sebagai *zoon politicon* yang sedikit banyak dipengaruhi oleh orang lain. Dalam berbagai komentar yang disampaikan oleh sebagian kerabat kraton, pengaruh GKR Hemas juga harus diperhitungkan.[48] Dengan begitu, boleh jadi, ini sebatas kemauan ayah–ibu yang menginginkan perubahan *paugeran* kraton melalui "jalan konstitusional". Namun keinginan ini justru memunculkan prasangka politik yang dialamatkan kepada pribadi Sultan HB X maupun istri. Kenyataan bahwa alur ginekologis HB X telah putus, sedangkan ia ingin dinastinya langgeng, jelas boleh jadi merupakan faktor kunci di balik statemennya.

Kerabat kraton, KRT Jatiningrat, mengomentari hal ini dengan mengatakan:

> *"Itu hanya kepentingan pribadi saja. Sultan memang yang memutuskan, tapi pertimbangan kerabat kraton paling utama. Untuk menunjuk putera mahkota harus berdasar paugeran. Aturan*

---

[48] Seorang narasumber terpercaya dari lingkungan dalam kraton mengatakan bahwa GKR Hemas adalah permaisuri yang berpengaruh cukup kuat bagi HB X dalam kebijakan-kebijakan politiknya. Pengaruh kuat GKR Hemas pada raja, menurutnya, bahkan dipersamakan dengan Ratu Kencono Beruk, permaisuri Pakubuwono III.

> *kraton itu tidak mudah diubah begitu saja karena tidak hanya berlaku sesaat. Kalau nggak ada garis keturunan ya adik beliau. Modelnya kok kayak Pilkada saja harus dilempar ke masyarakat. Ini (penentuan putera mahkota) berbeda. Jangan disamakan dengan model demokrasi dalam memilih bupati atau walikota. Hal ini tentu membuat masyarakat salah kaprah dalam memaknai demokrasi. Sultan harus dapat memilah-milah urusannya sebagai raja dan sebagai gubernur."* (Harian Jogja, 26 Juni 2010).

Bahkan dengan argumentasi gender yang dipaparkan oleh HB X di berbagai kesempatan, kalangan kutub konservatif menilai sangat tampak distorsi yang mengapung di permukaan. Raja bak dua wajah sekeping mata uang. Pada satu sisi, seorang raja adalah pengayom dan penjaga budaya, sumber tertib sosial dan tertib hukum di wilayahnya. Dan oleh karenanya, dengan status *Panatagama* yang dimuliakan, ia memiliki tanggung jawab terbesar untuk mempertahankan nilai-nilai dasar Islam di Kraton Jogja. Sedang di lain sisi, raja menyatakan pro-gender dan menghormati siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu dengan alasan bahwa tradisi dapat diubah melalui kewenangannya, ia mewacanakan dimungkinkannya perubahan *paugeran* mengenai pemegang tahta bahwa perempuan boleh menjadi raja Kraton Jogja. Ini adalah dua posisi yang saling berseberangan.

Beberapa Kelemahan Kecil

Klaim historis yang disampaikan oleh kutub konservatif bahwa Islam tidak mengenal kepemimpinan wanita didasarkan pada aturan syariat benar adanya. Islam memang melarang wanita dan anak kecil menjadi pemimpin publik. Namun terdapat pengecualian dalam beberapa segmen sejarah komunitas Muslim dalam hal suksesi pemimpinnya. Mungkin kutub konservatif belum mengetahui bahwa ada juga beberapa wanita yang menjadi penguasa di dunia Islam. Fatima Merniasi, seorang profesor tamatan Universitas Sorbonne Perancis, juga seorang guru besar di Universitas Muhammad V Maroko, melakukan studi "arkeologi" kepemimpinan wanita di lingkup bangsa-bangsa Muslim. Dari riset yang kemudian dituangkan dalam buku berjudul "Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan", Fatima menemukan fakta mengejutkan yakni kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Tenggara pernah dikuasai oleh wanita.[49]

Uniknya, Indonesia masuk dalam temuan mengenai raja perempuan. Ia menyebut ada tujuh *sultanah* (raja perempuan) di Kepulauan Hindia yaitu tiga di Maldiv dan empat lagi di Indonesia. Keempat raja perempuan ini berkuasa di Kerajaan Aceh pada paruh kedua abad 17 (dari 1641 hingga 1699) secara berturut-turut. Keempat ratu ini adalah bagian dari 34 penguasa

---

[49] Gaya semiotika yang memulai sesuatu dengan azas kecurigaan, telah membawa perempuan kelahiran Fez, Maroko, ini pada kitab-kitab klasik dan teks-teks klasik yang telah dilupakan orang. Mernissi memang tidak bermaksud memecahkan teka-teki itu, tetapi penelusurannya telah membuka ruang dialog baru bagi permasalahan ambiguitas politik Islam. Ambiguitas bahwa Islam adalah agama yang demokratis, namun ternyata di balik kedemokratisannya masih mengabaikan hak perempuan untuk menjadi pemimpin publik.

yang pernah memerintah Aceh sejak abad 16 hingga abad 20. Empat raja perempuan itu yang bertahta di Aceh itu adalah:

1. Sultanah Tadj Al-Alam Safiyyat Al-Din Syah (1641 – 1675),
2. Sultanah Nur Al-Alam Nakiyyat Al-Din Syah (1675 – 1678),
3. Inayat Syah Zakiyyat Al-Din Syah (1678 – 1688) dan
4. Kamalat Syah (1688 – 1699)(Mernissi 1994).[50]

Dengan adanya fakta mengenai raja perempuan dalam komunitas Muslim, maka klaim akan tidak pernah adanya pemimpin wanita dalam sejarah Islam menjadi tidak 100% dapat diterima. Namun, di sini kita perlu membedakan aspek syariat Islam yang tidak memperkenankan kepemimpinan publik di tangan wanita dengan bukti-bukti historis yang ada. Bukti ini pun tidak dimaksudkan untuk menegasikan konsep imamat dalam fiqih Islam.

Sayidin Panatagama Khalifatullah: prinsip yang (seharusnya) tak luntur

Kita sudah menemukan lima macam pola suksesi di Kraton Jogja sepanjang 264 tahun terakhir. Lima pola menunjukkan gradasi zaman yang berbeda. Namun, saya perlu menggarisbawahi bahwa beragamnya pola yang

[50] Fatima Mernissi menemukan empat belas raja perempuan yang berkuasa dalam sejarah kerajaan Islam di Mongol, Turki, Maldives, dan Indonesia. Dikawasan Timur Tengah yang dianggap sebagai basis Islam ortodoks, bahkan perempuan juga pernah duduk di tahta kerajaan. Yaman, Syaba, dan Kairo adalah tempat di mana perempuan pernah menorehkan sejarah duduk sebagai penguasa Islam.

terjadi tidak kemudian menunjukkan Kraton Jogja memiliki sistem tata kelola pemerintahan adat yang rapuh. Ragam suksesi juga tak memberi praduga bahwa tidak ada nilai baku yang dianut sebagai pondasi filosofis. Beragamnya pola suksesi, sekali lagi disebabkan oleh karena empat faktor utama tersebut di atas. Sebaliknya, ragam suksesi justru memberikan kita pencerahan mengenai sesuatu hal yang menjadi kunci keberlangsungan Kraton Jogja selama lebih dari dua setengah abad. Kunci keberlangsungan itu mestinya sesuatu yang sulit berubah dan berlaku dari waktu ke waktu. Saya ingin mengatakan bahwa stabilitas ini disokong oleh tatanan nilai yang menjadi roh utama keberlangsungan tahta. Apa argumennya? Mari kita cek kembali dalam catatan historis.

Ketika naskah Perjanjian Giyanti disusun oleh Belanda sesudah perang berakhir, Belanda menetapkan pewaris tahta HB I kepada GRM Sundoro, putera lelaki tertua dari permaisuri. Meski terdapat putera lelaki dari selir yang lebih tua dan dianggap cakap, Belanda dan Sultan tak mengambil alternatif ini. Pada masa HB II melakukan affair, Belanda juga tak menunjuk pengganti di luar keturunan permaisuri. Penunjukan HB III dan IV yang masih kecil juga menjadi jalan tengah atas suksesi yang mesti mengakomodasi kepentingan Belanda dan menyesuaikan dengan *Paugeran Kraton*. Selalu dua hal yang pasti tetap dalam proses suksesi yakni pewaris tahta adalah laki-laki dan keturunan permaisuri Sultan. Intinya, hal demikian berlaku secara tetap dan terus-menerus sampai suksesi terakhir pada tahun 1989.

Apa yang bisa dipetik? Penghormatan akan tatanan nilai adat adalah prioritas utama dalam keputusan politik menyangkut suksesi. Mengapa seluruh pihak baik keluarga kraton dan Pemerintah Kolonial menyepakati hal ini? Ini karena proses suksesi sudah terkandung secara tersirat dalam gelar Sultan Jogja yang terletak pada frase *Sayidin Panatagama Khalifatullah.* Frase ini menjadi roh atas seluruh rangkaian pengelolaan kekuasaan Sultan. Dia adalah orang yang diutamakan (*sayyid*), dia juga yang menjadi pengatur tatanan agama (*panata agama*) dan dia adalah salah satu wakil Tuhan di muka bumi yang memimpin suatu kaum (*khalifah*). Intinya gelar Sultan bisa dikatakan menjadi sumber atas keberlangsungan kerajaan dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, saya juga ingin menegaskan bahwa *paugeran kraton* yang dituangkan ke dalam gelar raja ini berlaku pula sebagai prinsip bekerjanya manajemen kepemerintahan sekaligus manajemen konflik. Prinsip ini kemudian melebur dan menjadi *governance as a conflict management*. Kekuasaan tidak saja bagaimana cara mengatur keseharian administrasi pemerintahan, akan tetapi dalam konteks ini strategi *governance* diletakkan dalam tataran filosofis untuk menjamin keberlangsungan kekuasaan secara damai. Jika amanat filosofis ini ditaati, maka konflik akan terkelola dengan baik. Jika tidak, sebaliknyalah yang akan terjadi. Itu mengapa, pengelolaan suksesi oleh para Sultan di masa lalu merupakan cerminan strategi *governance* mereka yang berjalan baik.

Kita masih akan terus menunggu apa yang akan dicapai oleh seluruh rangkaian kontestasi politik antar elit di kraton. Apapun yang kelak akan dihasilkan, hal

itu akan menunjukkan satu pola suksesi. Jika mengikuti aturan yang sudah ada, maka suksesi menyamping akan terulang kembali. Namun apabila terjadi perubahan sistem, maka akan ada pola baru dalam sejarah suksesi di Kraton Jogja. Jika dikalkulasikan, perubahan besar-besaran tatanan politik dalam kraton membutuhkan harga yang mahal juga. Yang paling logis adalah mengikuti saja alur yang sudah ada: sudahi polemik dan kembalikan sesuai paugeran kraton. Di bab selanjutnya kita akan memetakan peluang mengenai pola suksesi yang kelak akan terjadi dan siapa saja elit berpotensi akan terlibat dalam gelanggang pencapaian tahta kerajaan. Kita lihat lebih lanjut, mari!



LIMA KEMUNGKINAN POLA SUKSESI DI MASA DEPAN

"Oh nggak, nanti yang memutuskan itu pada akhirnya ya di musyawarah keluarga... Nah kalau bicara normalnya gimana ya urut. Mas Hadiwinoto, lalu Mas Hadisuryo, baru Mas Prabu, terus Mas Joyokusumo, dan seterusnya."

(GBPH Yudhaningrat, kerabat Sultan HB X)

Pada bab sebelumnya, kita sudah menelusuri dan membaca wacana raja perempuan sebagai ruang manuver proses suksesi yang belum dapat dibaca hasilnya. Perdebatan mengenai wacana tersebut juga digunakan sebaik-baiknya oleh anggota lain di internal keluarga kraton untuk menunjukkan posisi tawar yang signifikan. Dengan begitu terbentuklah ruang tarik ulur kepentingan melalui wacana ini. Toh belum ada pola yang jelas. Suksesi masih dalam perjalanan menuju hasil. Kita akan melupakan hal itu sejenak. Dengan telah selesai membaca ruang diskursus tadi, kita akan memandang lebih jauh mengenai persoalan-suksesi di masa depan. Kita tidak terlalu mempersoalkan siapakah yang akan memenangkan "pertempuran", namun kita akan coba menelisik peluang-peluang yang seperti apakah yang akan terjadi di masa depan? Siapakah yang akan bermain dalam isu suksesi di masa depan? Sejauh apa peluang tersebut kelak dapat terwujud? Peluang mana yang paling memungkinkan? Mari kita lihat lebih gamblang.

Memetakan Masa Depan

Lakon Petruk Dadi Ratu dalam cerita pewayangan mungkin selaras dengan apa yang ada pada saat ini. Cerita ini berawal dari hilangnya pusaka Jamus Kalimasada milik Yudhistira, pimpinan para Pandawa. Petruk, salah satu abdi Punakawan, menyelamatkan pusaka itu dari perebutan antara kaum pencuri dan pemilik lantas menyembunyikannya. Karena dipengaruhi oleh energi pusaka Kalimasada, dalam hati Petruk tumbuh niat untuk menjadi raja. Ia akhirnya menjadi raja di Lojitengara, bergelar Prabu Welgeduwelbeh. Karena Petruk sejatinya dewa yang maha sakti, ia mengobrak-abrik dan mendekonstruksi tatanan yang selama ini dipakai oleh penguasa dan para dewa.

Tak ada yang berhasil menahannya, bahkan Batara Guru, dewa tertinggi pun tak sanggup. Begitu juga dengan Sri Kresna dan Baladewa, mereka babak belur dihajar Petruk. Atas ontran-ontran ini, ketidakseimbangan, kekacauan dan disharmoni mekar di mana-mana. Akhirnya, hanya Semar yang bisa menghentikan Petruk. Dengan senyum ia menegur Petruk, anaknya. Serta merta Prabu Welgeduwelbeh yang sakti, gagah dan tampan berubah wujud menjadi Petruk kembali, berlutut di hadapan Semar, kembali pada kodratnya sebagai abdi abadi Punakawan.

Sebagaimana Petruk, menjadi raja adalah posisi puncak bagi alam pikir Jawa. Jawa memposisikan raja dengan personalitas yang agung, adikuasa, dan pengalir berkah Tuhan. Karenanya, tak heran, menjadi “Ratu” adalah prestasi puncak bagi manusia Jawa. Dampaknya

jelas, posisi "Ratu" akan diperebutkan oleh mereka yang memiliki akses kepadanya sebagaimana Petruk yang memiliki kitab pusaka Jamus Kalimasada. Sayangnya, karena Petruk melakukan kesalahan, umat manusia di bumi justru terjebak dalam kurungan instabilitas.

Kini, di Kraton Jogja kita belum tahu siapakah yang berposisi sebagai Petruk. Kita akan mengetahuinya kelak di kemudian hari. Yang terpenting dari semuanya adalah, bagaimana proses menjadi raja alias suksesi di masa HB X akan berlangsung? Tampaknya kita perlu mengerti dahulu bahwa ada semacam kebetulan sejarah yang terjadi pada proses ini. Sebuah analisis yang disampaikan kerabat kraton mengatakan bahwa selama ini suksesi bergeser setiap lima generasi penguasa [51].

Konteks ini kemudian ditarik ke masa pemerintahan HB X. Kebetulan yang sangat luar biasa adalah ia menjadi raja tepat ketika periode lima penguasa telah terlampaui. Banyak kalangan berhipotesis bahwa kemiripan yang dialami oleh HB V dan HB X akan berimplikasi pada pengulangan kejadian masa silam dimana dinasti HB X akan putus lalu tahta akan bergeser kepada salah satu adik HB X. Karenanya, sebagaimana pesan Napoleon Bonaparte bahwa sejarah akan berulang dapat dimengerti dalam tataran ini. Ke depan, tahta Jogja adalah objek yang menarik perhatian bagi elit-elitnya. Karena itu, pertanyaan dasar yang menarik adalah siapakah yang kelak berpeluang akan menggantikan tahta HB X.

[51] Siklus sejarah ini adalah persitiwa bergesernya tahta raja di luar alur normal seorang ayah kepada anak yang terjadi setiap lima generasi penguasa. Siklus pertama terjadi di awal Mataram Islam berdiri. Pergantian tahta dari Amangkurat II ke Pakubuwono I adalah pergeseran dari seorang kakak kepada adik. Lima generasi kemudian, pergeseran kekuasaan dari HB V ke HB VI juga mengulangi hal serupa.

Untuk mengetahui ini kita perlu memetakan posisi keluarga Kraton Jogja secara utuh. Pertama, kita mesti mengetahui silsilah terkontemporer keluarga Kraton Jogja secara menyeluruh. Keluarga Kraton Jogja saat ini persis didominasi oleh seluruh keturunan HB IX. Para pangeran utama keturunan HB VIII seluruhnya sudah wafat. Dengan demikian, merujuk pada tatanan kraton, hanya keturunan HB IX lah yang kelak akan menggantikan HB X. Selebihnya tidak berhak sama sekali alias cukup menjadi "penonton pertandingan". Berikut ini diagram yang menggambarkan kelima istri HB IX dan putera-putera lelakinya.

Lakon Petruk Dadi Ratu dalam cerita pewayangan mungkin selaras dengan apa yang ada pada saat ini. Cerita ini berawal dari hilangnya pusaka Jamus Kalimasada milik Yudhistira, pimpinan para Pandawa. Petruk, salah satu abdi Punakawan, menyelamatkan pusaka itu dari perebutan antara kaum pencuri dan pemilik lantas menyembunyikannya. Karena dipengaruhi oleh energi pusaka Kalimasada, dalam hati Petruk tumbuh niat untuk menjadi raja. Ia akhirnya menjadi raja di Lojitengara, bergelar Prabu Welgeduwelbeh. Karena Petruk sejatinya dewa yang maha sakti, ia mengobrak-abrik dan mendekonstruksi tatanan yang selama ini dipakai oleh penguasa dan para dewa.

Tak ada yang berhasil menahannya, bahkan Batara Guru, dewa tertinggi pun tak sanggup. Begitu juga dengan Sri Kresna dan Baladewa, mereka babak belur dihajar Petruk. Atas ontran-ontran ini, ketidakseimbangan, kekacauan dan disharmoni mekar di mana-mana. Akhirnya, hanya Semar yang bisa

menghentikan Petruk. Dengan senyum ia menegur Petruk, anaknya. Serta merta Prabu Welgeduwelbeh yang sakti, gagah dan tampan berubah wujud menjadi Petruk kembali, berlutut di hadapan Semar, kembali pada kodratnya sebagai abdi abadi Punakawan.

Sebagaimana Petruk, menjadi raja adalah posisi puncak bagi alam pikir Jawa. Jawa memposisikan raja dengan personalitas yang agung, adikuasa, dan pengalir berkah Tuhan. Karenanya, tak heran, menjadi "Ratu" adalah prestasi puncak bagi manusia Jawa. Dampaknya jelas, posisi "Ratu" akan diperebutkan oleh mereka yang memiliki akses kepadanya sebagaimana Petruk yang memiliki kitab pusaka Jamus Kalimasada. Sayangnya, karena Petruk melakukan kesalahan, umat manusia di bumi justru terjebak dalam kurungan instabilitas.

Kini, di Kraton Jogja kita belum tahu siapakah yang berposisi sebagai Petruk. Kita akan mengetahuinya kelak di kemudian hari. Yang terpenting dari semuanya adalah, bagaimana proses menjadi raja alias suksesi di masa HB X akan berlangsung? Tampaknya kita perlu mengerti dahulu bahwa ada semacam kebetulan sejarah yang terjadi pada proses ini. Sebuah analisis yang disampaikan kerabat kraton mengatakan bahwa selama ini suksesi bergeser setiap lima generasi penguasa.

Konteks ini kemudian ditarik ke masa pemerintahan HB X. Kebetulan yang sangat luar biasa adalah ia menjadi raja tepat ketika periode lima penguasa telah terlampaui. Banyak kalangan berhipotesis bahwa kemiripan yang dialami oleh HB V dan HB X akan berimplikasi pada pengulangan kejadian masa silam dimana dinasti HB X akan putus lalu tahta akan bergeser

kepada salah satu adik HB X. Karenanya, sebagaimana pesan Napoleon Bonaparte bahwa sejarah akan berulang dapat dimengerti dalam tataran ini. Ke depan, tahta Jogja adalah objek yang menarik perhatian bagi elit-elitnya. Karena itu, pertanyaan dasar yang menarik adalah siapakah yang kelak berpeluang akan menggantikan tahta HB X.

Untuk mengetahui ini kita perlu memetakan posisi keluarga Kraton Jogja secara utuh. Pertama, kita mesti mengetahui silsilah terkontemporer keluarga Kraton Jogja secara menyeluruh. Keluarga Kraton Jogja saat ini persis didominasi oleh seluruh keturunan HB IX. Para pangeran utama keturunan HB VIII seluruhnya sudah wafat. Dengan demikian, merujuk pada tatanan kraton, hanya keturunan HB IX lah yang kelak akan menggantikan HB X. Selebihnya tidak berhak sama sekali alias cukup menjadi "penonton pertandingan". Berikut ini diagram yang menggambarkan kelima istri HB IX dan putera-putera lelakinya.

Tabel 4.1 Putera-putera Lelaki dari Seluruh Istri HB IX

KRAy Pintokopurnomo HB IX
- GBPH Hadisuryo

KRAy Windyaningrum HB IX
- KGPH Hadiwinoto
- GBPH Joyokusumo

KRAy Hastungkoro HB IX
- GBPH Prabukusumo
- GBPH Yudaningrat
- GBPH Condroningrat

KRAy Ciptomurti HB IX
- GBPH Pakuningrat
- GBPH Cokrodiningrat
- BRM Arianto
- BRM Sarsono
- BRM Harkomoyo

KRAy Norma Nindya Kirana HB IX
- Denny Widarna (bukan berstatus sebagai putera HB IX)



Kedua, status seluruh keturunan lelaki HB IX adalah sebagai putera raja dalam posisi yang setara, sebagian di antaranya sudah menyandang gelar kepangeranan, sebagian lain belum. Posisi setara dalam konteks ini bermakna seluruh pangeran keturunan HB IX, yang berarti juga adik-adik HB X yang bertahta, adalah seorang anak dari istri-istri HB IX yang tidak satupun berstatus permaisuri maupun selir[52]. Kelima istri HB IX diposisikan sebagai istri sejati, yang oleh karena

[52] HB IX menikahi kelima istrinya secara Islam. Ia tak pernah menobatkan permaisuri, juga tak mengangkat mereka sebagai selirnya. Kelimanya adalah istri sah yang dipoligami menurut hukum Islam. Kelimanya secara berurutan adalah KRAy Pintokopurnomo HB IX, KRAy Windyaningrum HB IX, KRAy Hastungkoro HB IX, KRAy Ciptomurti HB IX, dan KRAy Norma Nindya Kirana HB IX.

itu kelimanya memiliki gelar yang sama yaitu KRAy (Kanjeng Raden Ayu) dengan tambahan Hamengku Buwono IX di akhir nama asli mereka. Posisi ini berdampak sangat strategis dalam Suksesi 1989 maupun suksesi yang akan datang, sebab seluruh pangeran adik-adik HB X dengan demikian memiliki status yang sejajar.

Bagaimana paugeran kraton mengatur suksesi rajanya. Berikut ini poin-poin yang terkandung dalam paugeran yang lazim diterapkan oleh Kraton Jogja maupun Surakarta sejak berdiri, yaitu:

1. Yang berhak menggantikan raja adalah keturunan langsung dari raja dan seorang putera lelaki.
2. Calon pengganti raja adalah putera dari permaisuri.
3. Apabila raja tidak memiliki permaisuri, maka diutamakan untuk dipilih putera lelaki tertua dari selir-selir raja.
4. Apabila raja tidak memiliki putera lelaki, maka calon pengganti raja dipilih dari salah satu adik-adik sedarah raja, yang diutamakan paling tua, dan terlahir dari permaisuri.
5. Apabila raja tidak ada adik laki-laki, maka kedudukan diberikan kepada paman raja yang terlahir dari permaisuri.
6. Apabila raja belum sempat menobatkan seorang putera mahkota sebelum wafatnya, maka pemilihan calon pengganti raja dilakukan dengan melihat garis keturunan laki-laki dari permaisuri dan selir.

7. Untuk kasus Jogja, apabila raja yang dinobatkan dianggap belum cukup umur, maka penyelenggaraan pemerintahan kraton dijalankan oleh suatu Dewan Perwalian yang dipilih oleh kerabat kraton sendiri.

Aturan itu memberikan kita batasan-batasan normatif bagi berlangsungnya proses suksesi kelak dari HB X ke HB XI. Pada saat yang sama, kita bisa membacanya sebagai sebuah peluang bagi para calon pewaris tahta di Kraton Jogja dengan menelaah dalam empat sudut pandang berbeda yaitu sudut pandang logika politik, urutan usia, urutan istri HB IX, dan tata gelar kepangeranan. Kita bisa memetakan siapa berpeluang sebesar apa untuk dapat menggantikan tahta HB X. Mari kita telusuri satu per satu.

Sudut Pandang Berdasar Tata Gelar

Gelar kebangsawanan yang disandang kerabat kraton mempunyai makna khusus tersendiri. Ia adalah simbol dari kekuasaan adat. Saat ini, tata gelar di dalam kraton, menurut Moedjanto, lebih merupakan kesalahan sejarah elit Mataram Islam yang telah menumpuk bermacam-macam istilah gelar untuk legitimasi politik. Itu mengapa gelar bangsawan kraton panjang dan kadang tumpang tindih (Moedjanto 1987). Jika menengok sejarah, di masa awal Islam hadir di Pulau Jawa pun Raja Demak hanya bergelar Raden Patah. Gelar kebangsawanan menjadi faktor penting bagi penentuan putera mahkota. Penentuan seorang calon pengganti tahta pun tidak sembarangan. Ini merupakan proses panjang yang kadang berjalan bertahun-tahun. Acap kali seorang calon putera mahkota, yang kemudian

dianugerahi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro justru gagal di tengah jalan karena berbagai sebab. Ini terjadi pada masa HB I, HB V, dan HB VII [53].

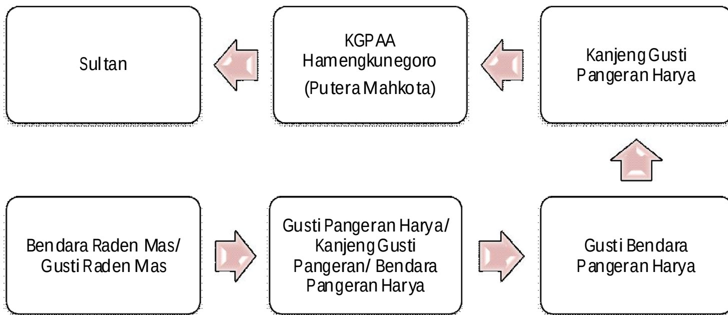
Secara normatif yang berhak menjadi raja adalah seorang putera raja yang sudah dipersiapkan untuk menduduki posisi putera mahkota. Putera mahkota di Kraton Jogja bergelar KGPAA Hamengkunegoro. Karena pada saat ini tidak satupun pangeran di Kraton Jogja bergelar itu, yang memungkinkan untuk dinaikkan menjadi putera mahkota adalah pangeran yang sudah bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH). Gelar ini adalah gelar tertinggi bagi putera raja satu tingkat di bawah putera mahkota. Gelar KGPH hanya diberikan kepada seseorang yang secara given menempati prioritas pertama untuk dijadikan salah satu calon pengganti raja. Dari sekian banyak pangeran di Kraton Jogja, sejauh ini hanya Hadiwinoto, adik kandung HB X, yang memiliki gelar KGPH. Sementara, adik-adik raja lainnya bergelar Gusti Bendara Pangeran Harya (GBPH), gelar satu tingkat di bawah KGPH.

Selain itu, Hadiwinoto juga telah diangkat sebagai Pangeran Lurah. Jabatan ini dimiliki seseorang yang diberikan mandat untuk menjadi pemimpin atas semua pangeran yang ada di kraton dan menjadi tangan kedua raja. Jika ada lebih dari satu yang menyandang gelar itu dan sama-sama berhak menjadi calon raja, maka dipilih

[53] Pengalaman sejarah pengalihan status putera mahkota HB I, Raden Mas Ento kepada GRM Sundoro, putusnya dinasti HB V karena tak berputera laki-laki, juga empat kali HB VII mengangkat putera mahkota (tiga dari keempatnya meninggal atau sakit jiwa) merupakan referensi sejarah yang sangat lengkap terutama sebagai pertimbangan untuk mencari kader-kader terbaik calon pengganti raja.

yang paling tua. Dengan memakai sudut pandang ini, kelak yang berpeluang menjadi HB XI adalah KGPH Hadiwinoto.

Diagram 5.1 Penggalan Alur Tata Gelar Kepangeranan



Ada hal kelaziman lain yang sering diterapkan dalam pengaturan pergantian tahta raja baik di Jogja maupun di Solo. Seorang putera raja yang dianugerahi nama tertentu dapat dibaca sebagai salah satu cara untuk menjajagi kemungkinan anak itu dijadikan putera mahkota. Nama-nama lazim calon pewaris tahta itu adalah:

1. Mangkubumi
2. Hangabehi
3. Puruboyo
4. Buminoto (jarang digunakan)

Nama-nama itu merujuk pada status dan derajat senioritas di kraton. Dengan berpijak pada kebiasaan ini

separuh dari Raja Jogja pernah menyandang salah satu dari nama tersebut. Kita lihat tabel berikut ini:

Tabel 5.2. Nama dan Gelar Calon Raja Ketika Dewasa

Nama Raja	Nama ketika masih berstatus pangeran
Sultan HB I	Kanjeng Pangeran Harya Mangkubumi
Sultan HB VI	Kanjeng Gusti Pangeran Mangkubumi
Sultan HB VII	Gusti Pangeran Harya Hangabehi
Sultan HB VIII	Gusti Pangeran Harya Puruboyo
Sultan HB X	Kanjeng Gusti Pangeran Harya Mangkubumi

Tabel di atas menunjukkan dari lima Sultan yang menggunakan nama-nama itu, tiga di antaranya menggunakan nama Mangkubumi. Hal ini sepertinya selaras dengan pernyataan HB IX dalam biografinya,

> *"Terus terang, apabila seseorang telah diberi gelar Mangkubumi, itu adalah langkah pertama ia dicalonkan untuk menjadi putera mahkota. Tetapi apakah ia benar-benar akan menjadi putera mahkota, masih tergantung pada penilaian, atau katakanlah periode ia menjadi Mangkubumi adalah periode penjajagan. Saya menilainya, para keluarga pun menilainya, untuk nanti pada pertemuan keluarga, sebagaimana waktu saya dulu, ditetapkan apakah ia bisa diterima atau tidak sebagai putera mahkota" (Moedjanto 1987: 123).*

Namun, perlu diketahui bahwa nama-nama itu bukanlah sesuatu yang mutlak dalam proses kaderisasi putera mahkota. Putera raja dengan nama Buminoto, Puruboyo, Mangkubumi dan Hangabehi juga banyak yang tak masuk dalam kans pewaris tahta. Penggunaan nama-nama itu terbatas pada putera lelaki dari seorang permaisuri.

Sudut Pandang Berdasarkan Urutan Istri HB IX

Dengan menengok kembali catatan sejarah pernikahan HB IX, maka secara berturut-turut wanita yang dinikahi HB IX adalah KRAy Pintokopurnomo HB IX, KRAy Windyaningrum HB IX, KRAy Hastungkoro HB IX, KRAy Ciptomurti HB IX, dan KRAy Norma Nindya Kirana HB IX. Masing-masing dari mereka memiliki putera lelaki kecuali istri kelima yang memang tidak memiliki keturunan. Sudah jelas bahwa istri pertama HB IX adalah KRAy Pintokopurnomo. Dari pernikahan dengannya itu, HB IX mendapatkan dua putera lelaki yaitu Hadikusumo dan Hadisuryo. Hadikusumo bahkan sudah dianugerahi gelar KGPH, namun meninggal dunia tak lama sesudah penobatan HB X.

Dengan demikian putera lelaki yang tersisa dari istri pertama HB IX adalah GBPH Hadisuryo. Dengan mengambil sudut pandang ini, dialah yang berpeluang paling besar. Bila terpaksa yang bersangkutan tidak berkenan menduduki tahta, maka posisi pengganti tahta jatuh kepada putera lelaki tertua dari istri kedua HB IX, KGPH Hadiwinoto, oleh karena Hadisuryo adalah putera lelaki terakhir dari KRAy Pintokopurnomo. Bila terjadi hal serupa maka posisi akan jatuh kepada adik Hadiwinoto, yaitu GBPH Joyokusumo, begitu seterusnya.

Sudut Pandang Berdasarkan Usia Para Pangeran

Dengan melacak waktu kelahiran seluruh pangeran yang masih hidup dan berpeluang untuk turut dalam proses suksesi yang akan datang, didapatkan urutan kelahiran sebagai berikut:

Tabel 5.3. Data Urutan Kelahiran Seluruh Putera Lelaki HB IX

No	Nama	Tanggal/Tahun Lahir
1	KGPH Hadiwinoto	1948
2	GBPH Hadisuryo	1950
3	GBPH Prabukusumo	22 Desember 1952
4	GBPH Joyokusumo	27 Oktober 1955
5	GBPH Pakuningrat	22 November 1957
6	GBPH Yudaningrat	17 Januari 1958
7	GBPH Condrodiningrat	1959
8	GBPH Cakraningrat	1959
9	BRM Arianto	Ø
10	BRM Sarsono	Ø
11	BRM Harkomoyo	Ø

Keterangan: Ø berarti belum dapat dikonfirmasikan.

Dengan melihat tabel urutan kelahiran para pangeran di atas, bisa ditarik hipotesis bahwa KGPH Hadiwinoto mempunyai peluang terbesar untuk naik tahta menggantikan HB X. Asumsi ini adalah asumsi normal di mana sudut pandang inilah yang biasa dipakai kraton untuk rekrutmen raja. Urutan nama di atas sekaligus menunjukkan urutan besarnya peluang dari sudut pandang usia. Semakin ke bawah semakin kecil.

Namun, perlu diketahui bahwa usia tidak menjadi preferensi utama, sebab pada akhirnya penentuan siapa yang akan naik tahta ada di forum musyawarah keluarga. Hal ini dikuatkan oleh KRT Jatiningrat:

> *"Ingat lho, tidak harus menerima Keris Kyai Joko Piturun. Itu bukan syarat mutlak. Itu baru ada di masa HB VIII, sebelum itu nggak ada. Keris itu menunjukkan kecocokan pribadi seorang raja, bukan alat yang ditradisikan untuk menyerahkan tahta. Dan ingat juga bahwa calon raja tidak harus putera lelaki yang paling tua. Karena alasan tertentu bisa jadi yang lebih muda yang akan ditunjuk oleh keluarga nantinya."*

Sudut Pandang Berdasarkan Peluang Politik

Dari seluruh sudut pandang di atas, semuanya dibaca dalam perspektif normal. Artinya, kondisi yang terjadi adalah keadaan normatif sebagaimana terjadi pada proses suksesi dari HB VIII ke HB IX, juga dari HB IX ke HB X. Namun, yang perlu diketahui oleh publik adalah seorang raja bisa jadi bukanlah putera tertua[54]. Sebab, proses penunjukan pewaris tahta tidak dilakukan dalam satu waktu yang singkat hanya dengan memandang usia, gelar, maupun status ibu kandungnya. Seluruh proses penunjukan calon pengganti tahta berpuncak pada mufakat keluarga kraton yang digelar sesudah seorang raja mangkat. Proses mufakat inilah yang menjadi ajang penentu siapa yang akan menjadi raja definitif.[55]

---

[54] Hal serupa juga disampaikan KRT Jatiningrat (Tirun Marwito), Pengageng Tepas Dwarapura Kraton Jogja, dalam wawancara kepada penulis. Ia menyatakan bahwa nanti yang akan menjadi raja tidak mesti adik tertua HB X, sebab hasil proses suksesi yang memutuskan adalah keluarga raja dan mesti dilihat hal terpenting dari calon yang berhak yakni mampu dan mumpuni atau tidak.

[55] Perlu diketahui bahwa roses mufakat keluarga hanya terjadi sejak penobatan HB IX pada tahun 1939. Mufakat 1939 pun tak bisa dikatakan sebagai proses musyawarah penjaringan calon raja mengingat satu-satunya calon yang berhak menjadi HB IX dan direstui Belanda hanyalah GRM Dorodjatun. Mufakat kedua dan yang benar-benar merupakan musyawarah penentuan pengganti raja terjadi pada tahun 1989 untuk

Seorang calon raja selain memenuhi syarat secara usia, yang paling penting adalah ia harus memenuhi kriteria kultural, diterima oleh semua pihak, berkapasitas pribadi yang unggul, dan mendapat dukungan politik yang cukup dari kerabat lain. Syarat ini menjadi lebih berat dibanding sekadar pencapaian usia, sebab syarat-syarat tersebut diukur dalam tataran abstrak yang sangat dependen pada penilaian dan sikap politik masing-masing kerabat. Dari seluruh pangeran yang berhak dicalonkan, hanya Prabukusumo-lah yang kelak paling memungkinkan untuk naik tahta menggantikan HB X. Ini berarti dia melangkahi dua kakak sekaligus yakni Hadiwinoto dan Hadisuryo.

Bukan tanpa argumen kuat untuk mengatakan bahwa Prabukusumo-lah calon HB XI yang paling ideal. Pertama, secara usia dia memang lebih muda dibanding Hadiwinoto dan Hadisuryo. Namun ia mempunyai keunggulan lain yang justru menjadi kunci ia berpeluang paling besar untuk memenangkan proses sukses di masa depan. Keunggulan itu adalah ia adalah sosok pribadi yang jernih, tidak memiliki catatan kesehatan yang lemah, tidak pernah terindikasi terlibat dalam tindak pelanggaran hukum, ia juga pangeran yang memiliki pengaruh besar di kraton, dan dekat dengan elit-elit penting di Jogja.

Perlu dicatat bahwa meski sebagai pangeran tertua, KGPH Hadiwinoto justru tidak dicatat sebagai kandidat terkuat oleh karena meskipun secara tata gelar

memutuskan siapa yang berhak menjadi HB X. Dengan demikian, mufakat keluarga tidak pernah ada sebelum era HB X, sebab penentuan raja adalah hak ekslusif raja bersama dengan Pemerintah Belanda. Di masa-masa yang akan datang, proses mufakat keluarga tampak akan menjadi proses wajib dalam soal suksesi politik.

dan pencapaian usia paling matang, namun catatan kesehatannya rupanya menjadikan ia tak berpeluang besar menggantikan HB X. Salah satu narasumber dari dalam kraton mengatakan bahwa di usianya yang telah 60 tahun lebih itu, Hadiwinoto diindikasikan menderita sakit yang cukup serius. Lain soal dengan GBPH Hadisuryo. Seorang kerabat kraton mengatakan kecil kemungkinan ia mendapatkan dukungan dari keluarga oleh karena "alasan tertentu" mengenai pribadi Hadisuryo. Lagipula Hadisuryo juga kurang dekat dengan kerabat lain, jarang berada di Jogja, dan telah sekian lama menetap di Jakarta. Ada juga kans lain yakini putera lelaki tertua KRAy Ciptomurti, GBPH Pakuningrat. Menurut penuturan narasumber dari dalam kraton, Pakuningrat bahkan dikabarkan telah menyatakan diri sebagai calon pengganti HB X. Namun, posisi politiknya yang kurang memadai bisa dianggap tak akan menyamai Prabukusumo.

Mengatakan Prabukusumo sebagai calon HB XI adalah sesuatu yang paling logis. Logika politik ini tercermin dalam berbagai momentum. Telah lama upacara-upacara di dalam Kraton dipimpin oleh Prabukusumo sebagai wakil HB X. Terakhir, Prabukusumo hadir untuk memimpin upacara Miyos Gongso yakni prosesi keluarnya sepasang gamelan pusaka Kanjeng Kyai Guntur Madu dan Kanjeng Kyai Nagawilaga pada perayaan Sekaten (Maulid Nabi Muhammad SAW) Februari 2011.

Agaknya politik wacana pun muncul cukup gencar untuk mulai mendorong Prabukusumo terangkat ke publik. Elit-elit Jogja juga cenderung mendukung Prabukusumo, apalagi selepas ia hengkang dari Partai

Demokrat akhir tahun 2010 lalu. Ia juga memperoleh penerimaan yang luas di kalangan kerabat kraton. Nukilan berita di samping dapat menunjukkan bahwa politik wacana ke publik sangat kental tengah digulirkan. Mengapa Prabukusumo?

Gambar 5.5. Prabukusumo, Pemimpin Masa Depan DIJ



Prabukusumo, Pemimpin Masa Depan DIJ

Hatta Dukung Pemilihan Sembari Jaga Keistimewaan

JOGJA - Isu suksesi gubernur dan wakil gubernur DIJ juga bergulir di arena Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-3 DPW PAN DIJ di Asrama Haji kemarin (18/7). Saat memberikan tausyiah politik, Ketua MPP DPP PAN Amien Rais menyinggung soal itu.

Amien menyebut sosok GBPH Prabukusumo sebagai calon pemimpin DIJ di masa datang. "Beliau dari Keraton Jogja, *the next leader* (pemimpin masa depan)," ujar Amien saat menyapa adik lain ibu dari Sultan Hamengku Buwono X. Soal kans Prabu sebagai pemimpin masa depan itu, Amien tak menerangkan apakah untuk posisi sultan atau gubernur DIJ.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X tak sempat mendengarkan langsung pujian mantan ketua MPR itu kepada adiknya. Saat itu, HB X tak datang dan mewakilkan ke Asisten Asekprov Pemerintahan dan Kesra Tavip Agus Rayanto •

► *Baca Prabukusumo... Hal 23*

Sumber: Radar Jogja, 20 Juli 2010

Perlu diingat bahwa setelah hengkang dari Partai Demokrat, dia pula yang kemudian menjadi pemimpin garda depan untuk mengawal proses penetapan gubernur. Hal ini bisa dibaca sebagai manuver untuk mengamankan proses pergantian tahta kelak. Meski HB X memuji sikapnya dan mengatakan hal tersebut sebagai pertanda soliditas kraton, namun untuk urusan suksesi tampaknya masing-masing sudah menghitung kepentingan politiknya. Tak heran, beberapa kalangan

sudah menggadang-gadang naiknya Prabukusumo ke tahta Jogja kelak[56]. Sebuah artikel surat kabar sebagaimana berikut juga menurunkan analisis mengenai peluang besar Prabukusumo untuk hadir sebagai calon pemimpin Jogja di masa depan.

Gambar 5.6 Kultural-Struktural Penuhi Kriteria



Kultural-Struktural Penuhi Kriteria

SEJAK...

Sambungan dari hal 13

Putera sulung Sultan Hamengku Buwono IX dengan garwa dalem KRAy Hastungkoro itu merupakan orang pertama di lingkungan keraton yang bergabung dengan Partai Demokrat. Di saat keluarga keraton belum banyak aktif ke Partai Demokrat, pangeran yang di masa mudanya bernama BRM Harumanto itu telah memulainya.

Kiprah Prabu memimpin Partai Demokrat DIJ juga tak mengecewakan. Hasil Pemilu 2009 menempatkan partai tersebut menjadi pemenang kedua di DPRD DIJ dengan jumlah 10 kursi. Saat pilpres, pasangan SBY-Boediono juga menang di DIJ.

Dari catatan Sukardi, Prabu juga punya pengalaman memimpin berbagai organisasi. Hingga sekarang tak kurang Prabu pernah memimpin tak kurang 70 buah organisasi. "Kalau jadi pemimpin DIJ, misalnya gubernur, Gusti Prabu telah punya kesiapan mental, pengalaman dan politik," ucapnya.

Mantan ketua Kadin Kota Jogja ini juga melihat Prabu punya pendukung riil. Termasuk, adanya dukungan kultural. "Bila dihitung, dukungannya sudah komplit," lanjutnya.

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) DPW PKS DIJ Arief Budiono menilai statemen Amien Rais patut dicermati. Berdasarkan pengalaman, mantan ketua MPR itu berpengalaman mengorbit calon pemimpin bangsa.

Ketika belum banyak orang meramal Gus Dur akan menjadi presiden, Amien sudah merancang lewat Poros Tengah 1998. Begitu pula naiknya Megawati Soekarnoputri menjadi presiden tak lepas dari peran Amien Rais. "Saat orang belum bicara suksesi, Pak Amien sudah bicara dan hasilnya Pak Harto turun pada reformasi 1998," beberny.

Kegagalan Amien mengorbit calon pemimpin kemungkinan hanya untuk internal PAN. Indikasi itu terlihat saat Soetrisno Bachir gagal menanjak sebagai pemimpin masa depan selepas menjadi ketua umum DPP PAN.

Arief Budiono juga menilai sosok Prabu secara kultural maupun struktural memenuhi kriteria. Secara kultural, Prabu merupakan salah satu putera HB IX. Sebagai putera Sultan, Prabu juga berpeluang menggantikan tahta HB X yang tidak punya keturunan laki-laki. "Sesuai aturan, bila raja tak punya anak laki-laki maka adiknya menjadi calon pengganti," ucap kader PKS.

Secara struktural, Prabu merupakan pimpinan partai yang punya jalur kedekatan dengan kekuasaan. Alasannya, partai yang dipimpinnya saat ini merupakan partai penguasa yang didirikan SBY.

"Soal apakah nanti Prabukusumo betul-betul jadi pemimpin masa depan DIJ, sejarah akan bicara," kilahnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD DIJ Putut Wiryawan juga ikut angkat bicara. Menurut dia, Prabu merupakan kader terbaik partainya. Namun demikian, saat ini terlalu pagi bila sekarang sudah bicara suksesi kepemimpinan DIJ. Sebab, RUUK DIJ saat ini belum disahkan. "Kami terima kasih dan mengapresiasi atas pernyataan Pak Amien," ujar Putut.

Lain halnya dengan pengamat budaya Heru Wahyu Kismoyo. Pria yang memosisikan diri sebagai penjaga gawang keistimewaan DIJ itu mengatakan lahirnya Muhammadiyah tak lepas dari peran HB VII yang ikut mendorong Muh Darwis yang kemudian berganti nama menjadi Achmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah.

Dengan demikian, sangat wajar bila Amien sebagai mantan pimpinan Muhammadiyah peduli terhadap nasib dan masa depan Kasultanan Jogja yang dewasa ini mengalami krisis regenerasi kepemimpinan. "Jadi kalau tiba-tiba Kasultanan Jogja tiba-tiba dipimpin perempuan berarti eksistensi keislaman perlu dipertanyakan kembali," kata Heru. (kus)

Sumber: Radar Jogja, 20 Juli 2010

[56] Mundurnya Prabukusumo dari partai besutan SBY merupakan titik balik penting dalam proses suksesi Raja Jogjakarta. Ini berarti secara politik Prabukusumo banting stir untuk bergabung dengan barisan "melawan" SBY. Terbukti, dalam demonstrasi besar-besaran di DPRD Jogja terkait RUU Keistimewaan Jogja, Prabukusumo berada di barisan paling depan, memimpin belasan ribu massa yang memadati kawasan Malioboro pada 13 Juli 2010. Dalam kacamata politik, hal ini juga bisa dibaca sebagai strategi politik (*political tactic*) untuk meneguhkan bahwa dirinya pun pantas menjadi pengganti HB X.

Sultan Perempuan: Kemungkinan Baru

Kemungkinan lain yang bisa saja terjadi adalah wacana raja perempuan diterima dan kemudian tahta akan diwariskan kepada GKR Pembayun. Mungkin kita akan memvonis bahwa logika ini akan mustahil terjadi. Namun perlu diingat bahwa dalam dunia politik segalanya menjadi mungkin. Lebih dari itu, sesuatu yang tidak pernah terjadi boleh jadi mendadak mempunyai ruang yang besar untuk untuk terjadi. Kita tidak pernah bisa menduganya. Analisis ini pun tidak mengada-ada, sebab sekecil apapun peluang itu, hal itu tetaplah sebuah peluang.

Apabila wacana raja perempuan diterima, maka jalan mulus menuju tahta sudah terbuka lebar bagi GKR Pembayun. Proses ini akan menjadi momentum politik yang luar biasa bagi Kraton Jogja. Jika ini terjadi, maka ini akan menjadi babakan perdana atas sebuah sejarah baru di mana dalam kerajaan yang menganut teologi Islam, perempuan diperkenankan menjadi pemimpin.

Namun agaknya kesulitan yang dihadapi akan banyak. Kita dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang akan menghadang yakni:

1. Resistensi dari saudara-saudara sedarah HB X akan menjadi faktor yang sangat sulit untuk dieliminasi. Dari seluruh keturunan HB IX, mungkin hanya segelintir anggota keluarga kraton yang sepakat tentang ide perempuan boleh menjadi raja di Jogja.

2. Resistensi dari seluruh kerabat kraton yang tergabung dalam *trah-trah* (semacam kekerabatan berdasar garis asal leluhur). Elit-elit yang memegang peranan

penting dalam kekerabatan Kraton Jogja disinyalir tidak akan mudah mengamini wacana itu. Bagi mereka, taruhannya akan terlampau besar sebab mendudukkan perempuan sebagai raja adalah perubahan yang teramat drastis.

3. Kalangan tokoh agama di Kraton Jogja tentu akan berpikir ulang untuk memberikan restu kepada HB X mewariskan tahta kepada Pembayun. Mereka tentu akan berpikir ulang bagaimana bisa para sesepuh *abdi dalem kaji* (abdi dalem yang mengurusi keagamaan) akan menyembah hormat seorang wanita. Reproduksi atas hal seperti ini akan digunakan untuk mengatakan tidak bagi wacana itu.

4. Penolakan dari publik boleh jadi akan menjadi faktor penekan yang cukup signifikan. Media massa justru dapat menjadi instrumen bagi pihak konservatif untuk menyudutkan HB X.

Dengan demikian, kelima kemungkinan di atas adalah sebuah peluang. Dengan kemungkinan hambatan dan kelebihannya, ia akan menjadi ajang pertarungan dan gesekan antar elit di masa yang akan datang. HB X, bersama Tim Hukumnya, menggunakan gender sebagai basis filosofi. Kalangan yang kontra menggunakan reproduksi atas istilah *Sayidin Panatagama Khalifatullah*. Kita akan melihatnya lebih jelas ketika momentum suksesi telah tiba. Apapun hasilnya, kita berharap yang terbaik untuk Kraton Jogja.



Sepuluh Sultan, Sepuluh Jalan

Dari Satu Raja ke Raja Berikutnya: Suksesi yang Tidak Selalu Sama

Sesudah memahami keseluruhan paparan pada Bab I, II, III dan IV, kita memperoleh pengetahuan bahwa sepanjang 260 tahun Kraton Jogja sudah mengalami lebih dari sepuluh kali suksesi rajanya. Dua setengah abad bukanlah rentang jarak yang pendek bagi Kraton Jogja untuk menikmati proses politik pergantian tahta. Suksesi berjalan melalui lorong *paugeran* kraton yang sudah diterapkan sejak era Kesultanan Islam Demak. Memang, *paugeran*-lah yang menjadi rujukan dalam proses itu.

Kita menganggap bahwa *paugeran* adalah sesuatu yang mutlak sepanjang zaman. Namun rupanya ia bukanlah instrumen yang dapat membakukan suksesi dari raja ke raja berikutnya. Ada faktor lain yang memandu dan mempengaruhi jalannya suksesi. Sejarah mencatat bahwa suksesi Kraton Jogja tergantung pada konteks dinamika sosial politik yang tengah terjadi pada masanya. Buktinya, suksesi Sultan Jogja memiliki variasi yang signifikan. Variasi itu meliputi suksesi berjalan normal sebagaimana lazimnya, terjadi pecat memecat antara anak dan ayah yang seorang raja, atau digantikan oleh saudara laki-laki. Ada pula suksesi yang diwakili

oleh suatu Dewan Perwalian atau penyingkiran putera mahkota dengan cara dibunuh. Fakta lain menyodorkan cerita bahwa seorang Sultan harus empat kali mengangkat putera mahkota karena sebab-sebab yang rumit.

Ragam pola suksesi itu kemudian diklasifikasi dalam lima jenis berdasar sifat, penyebab, dan dampaknya. Kelima ragam pola suksesi itu adalah:

1. Suksesi normal (*mblarak sempal*) yang meliputi:
    a. Suksesi dari HB VI ke HB VII,
    b. Suksesi dari HB VIII ke HB IX,
    c. Suksesi dari HB IX ke HB X;
2. Suksesi abnormal yang dibedakan lagi menjadi:
    a. Suksesi dinamis (*Semar oncat*) yang meliputi:
    b. Suksesi dari HB I ke HB II,
    c. Suksesi dari HB VII ke HB VIII;
3. Suksesi menyamping (*klapa nyawang*) yang meliputi:
    a. Suksesi dari HB V ke HB VI;
4. Suksesi dengan kekerasan (*Anggenthong pecah*) yang meliputi:
    a. Suksesi dari HB II ke HB III; dan
5. Suksesi dengan Dewan Perwalian (*ngembar dhomas*) meliputi:
    a. Suksesi dari HB III ke HB IV.
    b. Suksesi dar HB IV ke HB V

Namun, pola yang beragam ini tidaklah merupakan cerminan bahwa Kraton Jogja tidak memiliki sistem yang dapat mengelola proses pergantian tahta. Ragam pola hanya menunjukkan dimensi lain berdasarkan analisis dinamika proses. Bervariasinya proses dan pola suksesi ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu:

1. Tatanan nilai yang berlaku,
2. Pilihan politik raja, dan
3. Intervensi pihak ketiga (kekuatan eksternal).

Dari ketiga faktor itu, tatanan nilai yang juga disebut *Paugeran Kraton* merupakan faktor yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Dalam sejarahnya, baik keluarga Kraton Jogja maupun Pemerintah Kolonial menempatkan tatanan nilai sebagai prioritas dalam mengelola suksesi. Tatanan nilai ini tercermin dalam gelar Sultan yang salah satunya adalah *Sayidin Panatagama Khalifatullah*. Frase ini berdampak besar terhadap "bakunya" suksesi di Jogja sedari awal dipandang dari sisi filosofis. Itu mengapa, saya ingin mengatakan bahwa tatanan nilai merupakan roh utama yang selalu dianut oleh elit kraton dalam menentukan keputusan politik soal pergantian tahta.

Yang lebih penting dari tatanan nilai adalah ternyata faktor keberadaan intervensi asing menjadi sesuatu yang dominan sejak suksesi yang pertama sampai suksesi ke sembilan. Artinya, restu politik Pemerintah Kolonial begitu signifikan posisinya dalam percaturan politik pergantian tahta. Ini dapat dipahami oleh karena Jogjakarta di masa kolonial adalah vasal dari pemerintah penjajah.

Kini, suksesi tengah diperdebatkan karena raja yang bertahta tak memiliki putera lelaki. Wacana raja perempuan pun digulirkan oleh HB X. Wacana ini memantik kontestasi samar yang melibatkan dua kutub yaitu kutub raja yang pro dan kutub konservatif yang kontra. Masing-masing kutub menggunakan instrumen untuk membangun legitimasi atas argumen mereka. Kutub raja menggunakan hak raja dan isu pengarusutamaan gender. Menurut kutub ini, perubahan kebijakan di kraton adalah hak pribadi raja untuk dan atas nama penyesuaian zaman. Sedangkan kutub konservatif mereproduksi istilah *Sayidin Panatagama Khalifatullah* yang berkaitan dengan Fiqih Islam. Mereka juga menengarai bahwa kehendak untuk mendudukkan perempuan sebagai raja dianggap bias kepentingan karena cenderung menjadi ruang untuk menabalkan politik dinasti.

Terlepas dari itu kita dapat membacanya dalam dua hal. *Pertama,* ada pertentangan nilai yang dianut oleh maisng-masing pihak di internal kraton terkait suksesi pada masa sekarang. Pertentangan nilai dimunculkan oleh aktor elit dengan kepentingan politik yang dibawanya. Pihak yang mewacanakan perempuan sebagai raja menggunakan gender sebagai basis filosofi. Pihak lain yang kontra menggunakan reproduksi atas diksi gelar seorang Sultan Jogja yakni *Sayidin Panatagama Khalifatullah* yang ditafsirkan ke dalam konsep imamat Islam. *Kedua,* munculnya wacana raja perempuan makin menambah kemungkinan-kemungkinan dan peluang politik yang akan terjadi pada suksesi Raja Jogja di masa depan.

Dalam telaah lebih lanjut, proses suksesi di era HB X ini disebut sebagai suksesi "Ndamar Keli". Istilah ini merujuk pada sesuatu yang belum pasti, maish berproses secara terus menerus, dan belum bisa dipetakan polanya karena belum ada hasil yang dicapai. Namun, dengan mengambil analisis kompleks, didapatkan lima kemungkinan pola suksesi dapat berjalan. Kelima kemungkinan itu dapat berlangsung sesuai titik acuan yang meliputi:

1. Sudut pandang tata gelar kepangeranan,
2. Sudut pandang usia para pangeran,
3. Sudut pandang urutan istri HB IX,
4. Sudut pandang logika politik, dan
5. Sudut pandang perubahan kebijakan politik.

Kelima peluang itu memiliki tingkat kesulitan dan kemudahan yang berbeda satu sama lain. Pun hasilnya tentu tidak akan sama. Yang jelas, babaran ini menunjukkan peta komprehensif akan dinamika politik yang terjadi, sekaligus menunjukkan kontestasi kekuasaan yang dilakukan oleh elit-elit kraton. Dinamika ini, dalam temuan yang didapatkan, sarat dengan konflik dan integrasi elit-elit.

Lantas apa? Ketika semua energi sudah tercurahkan untuk memusatkan perhatian pada keberlangsungan Kraton Jogja, maka perlu dibuat pendekatan dan penjajagan kemungkinan untuk menjamin bahwa kelak proses suksesi tidak membawa dampak negatif. Berbagai alternatif itu adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kodifikasi ulang secara tegas dan rinci mengenai aturan hukum adat (*Paugeran Praja Kejawen*) yang terkait dengan proses pergantian tahta raja di Kraton Jogja. Ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh seorang raja karena ia harus melibatkan pihak-pihak yang kompeten untuk bisa melakukan misi ini. Tak heran, tidak ada buruknya apabila raja kemudian berinisiatif untuk membentuk *Sri Palimbangan Ageng* yakni semacam dewan pertimbangan yang memberikan masukan dan nasihat atas kebijakan-kebijakan raja.[57] Ini adalah bagian dari proses konsolidasi dan integrasi bagi seluruh elemen keluarga, sekaligus momentum untuk meredefiniskan kembali visi budaya kraton yang selama ini semakin surut.

2. Kraton perlu untuk mentransformasi diri ke dalam institusi adat yang tanggap akan zaman. Sistem administrasi, kelembagaan, tata organisasi, rekrutmen pemimpin, dan sistem hukum haruslah jelas dan tertuang dalam dokumen resmi. Kita perlu belajar dari Kerajaan Inggris yang sesudah hampir 1000 tahun masih mendapat tempat terhormat di mata publik.

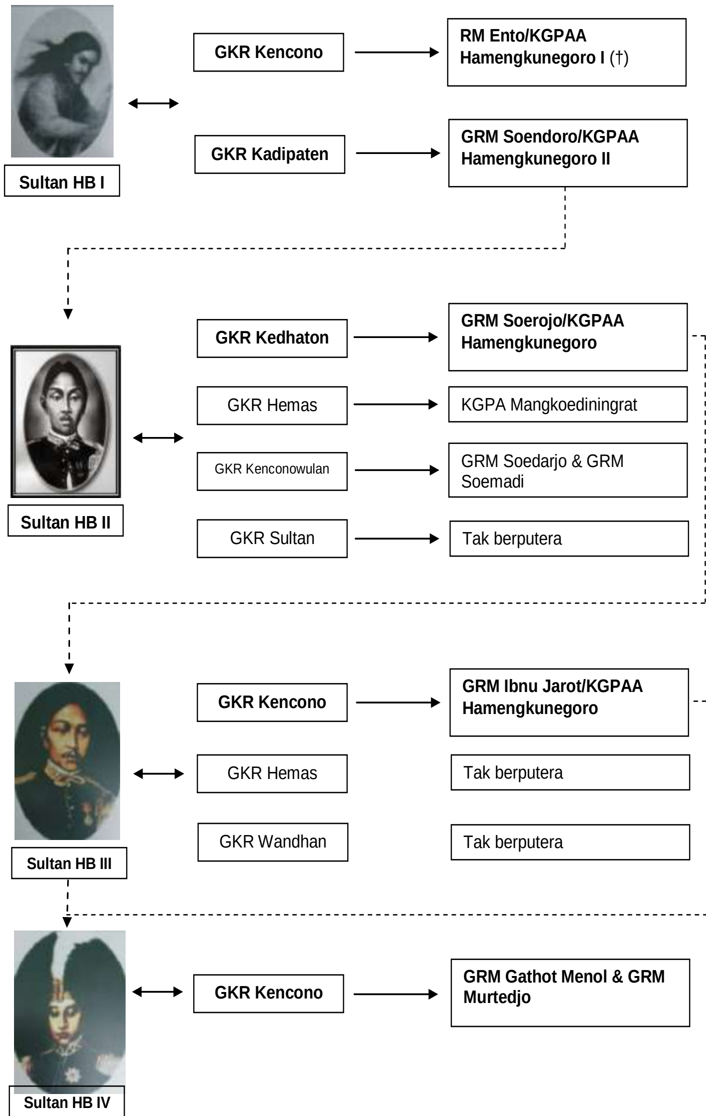
3. Perlu dilakukan telaah lebih lanjut dan lebih dalam tehadap naskah-naskah arsip kraton di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai kepemimpinan. Bukan tidak mungkin arsip-arsip tersebut memberikan kita wacana lain mengenai suksesi di masa lalu yang belum pernah terkuak. Selama ini yang dilakukan sebatas kodifikasi naskah. Transliterasi dan penuangan ke dalam naskah yang mudah dipahami belum dilakukan.

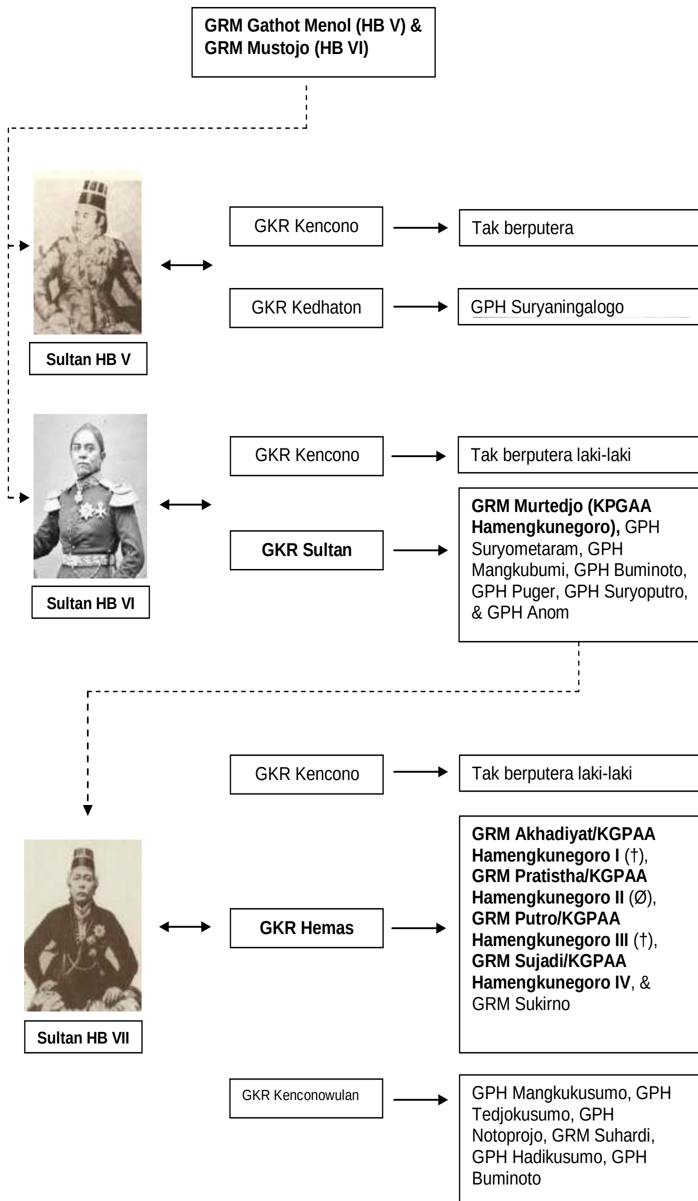
[57] Istilah Sri Palimbangan Ageng disadur dari naskah akademik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta yang disusun oleh Tim Akademik Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.

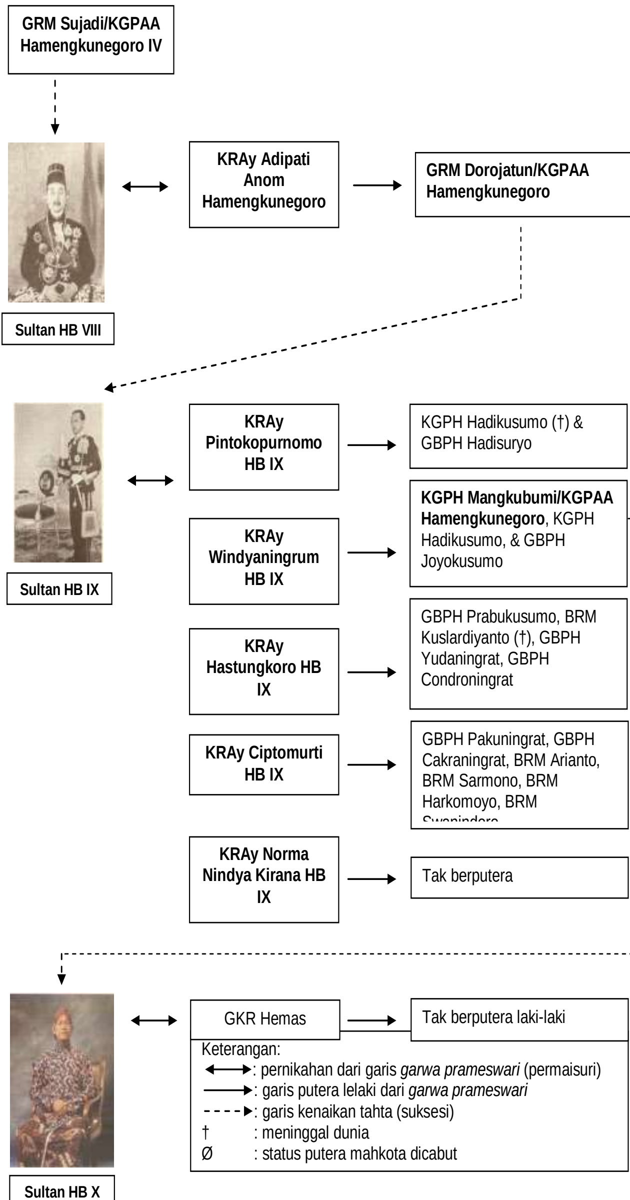
Gambar 6.1 Daftar Urutan Raja-Raja Jogja



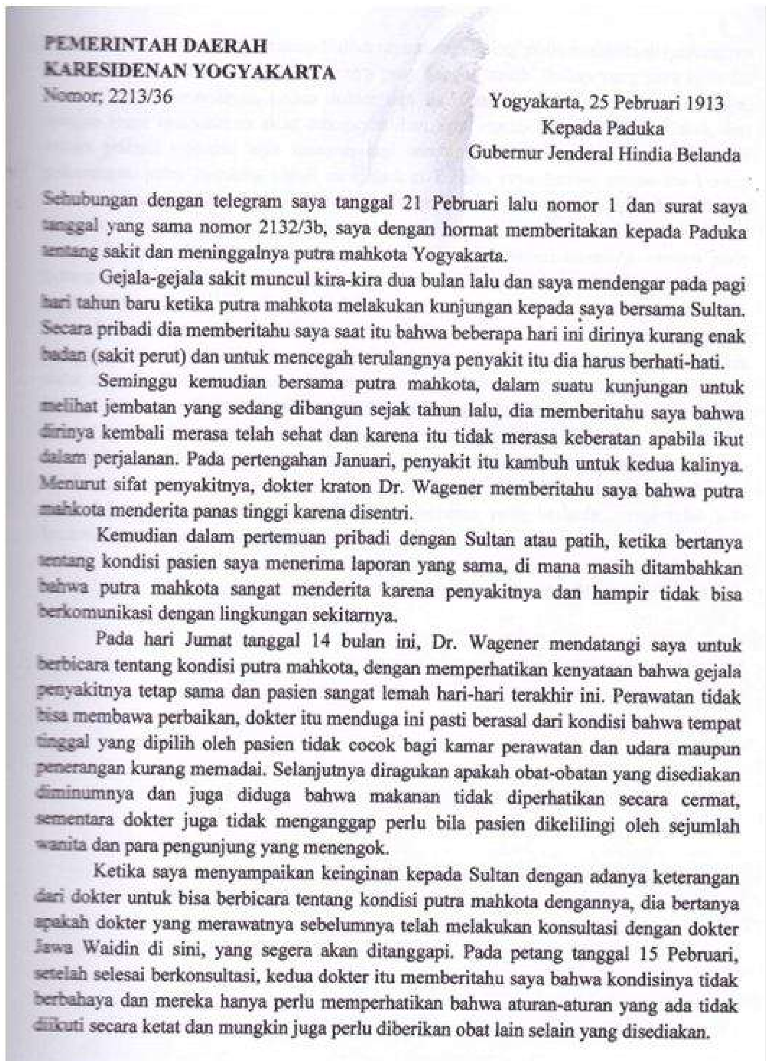
Diagram 6.1 Alur Pewarisan Tahta Raja-Raja Jogja




GRM Gathot Menol (HB V) &
GRM Mustojo (HB VI)
GKR Kencono
Tak berputera
GKR Kedhaton
GPH Suryaningalogo
Sultan HB V
GKR Kencono
Tak berputera laki-laki
GKR Sultan
GRM Murtedjo (KPGAA Hamengkunegoro), GPH Suryometaram, GPH Mangkubumi, GPH Buminoto, GPH Puger, GPH Suryoputro, & GPH Anom
Sultan HB VI
GKR Kencono
Tak berputera laki-laki
GKR Hemas
GRM Akhadiyat/KGPAA Hamengkunegoro I (†), GRM Pratistha/KGPAA Hamengkunegoro II (Ø), GRM Putro/KGPAA Hamengkunegoro III (†), GRM Sujadi/KGPAA Hamengkunegoro IV, & GRM Sukirno
Sultan HB VII
GKR Kenconowulan
GPH Mangkukusumo, GPH Tedjokusumo, GPH Notoprojo, GRM Suhardi, GPH Hadikusumo, GPH Buminoto


GRM Sujadi/KGPAA Hamengkunegoro IV
Sultan HB VIII
KRAy Adipati Anom Hamengkunegoro
GRM Dorojatun/KGPAA Hamengkunegoro
Sultan HB IX
KRAy Pintokopurnomo HB IX
KGPH Hadikusumo (†) & GBPH Hadisuryo
KRAy Windyaningrum HB IX
KGPH Mangkubumi/KGPAA Hamengkunegoro, KGPH Hadikusumo, & GBPH Joyokusumo
KRAy Hastungkoro HB IX
GBPH Prabukusumo, BRM Kuslardiyanto (†), GBPH Yudaningrat, GBPH Condroningrat
KRAy Ciptomurti HB IX
GBPH Pakuningrat, GBPH Cakraningrat, BRM Arianto, BRM Sarmono, BRM Harkomoyo, BRM
KRAy Norma Nindya Kirana HB IX
Tak berputera
Sultan HB X
GKR Hemas
Tak berputera laki-laki
Keterangan:
: pernikahan dari garis garwa prameswari (permaisuri)
: garis putera lelaki dari garwa prameswari
: garis kenaikan tahta (suksesi)
† : meninggal dunia
Ø : status putera mahkota dicabut

Gambar 6.2 Arsip Surat Rahasia Residen Belanda kepada Gubernur Jenderal .Hindia Belanda Nomor 2213/36 tertanggal 25 Februari 1913



PEMERINTAH DAERAH
KARESIDENAN YOGYAKARTA
Nomor; 2213/36

Yogyakarta, 25 Pebruari 1913
Kepada Paduka
Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Sehubungan dengan telegram saya tanggal 21 Pebruari lalu nomor 1 dan surat saya tanggal yang sama nomor 2132/3b, saya dengan hormat memberitakan kepada Paduka tentang sakit dan meninggalnya putra mahkota Yogyakarta.

Gejala-gejala sakit muncul kira-kira dua bulan lalu dan saya mendengar pada pagi hari tahun baru ketika putra mahkota melakukan kunjungan kepada saya bersama Sultan. Secara pribadi dia memberitahu saya saat itu bahwa beberapa hari ini dirinya kurang enak badan (sakit perut) dan untuk mencegah terulangnya penyakit itu dia harus berhati-hati.

Seminggu kemudian bersama putra mahkota, dalam suatu kunjungan untuk melihat jembatan yang sedang dibangun sejak tahun lalu, dia memberitahu saya bahwa dirinya kembali merasa telah sehat dan karena itu tidak merasa keberatan apabila ikut dalam perjalanan. Pada pertengahan Januari, penyakit itu kambuh untuk kedua kalinya. Menurut sifat penyakitnya, dokter kraton Dr. Wagener memberitahu saya bahwa putra mahkota menderita panas tinggi karena disentri.

Kemudian dalam pertemuan pribadi dengan Sultan atau patih, ketika bertanya tentang kondisi pasien saya menerima laporan yang sama, di mana masih ditambahkan bahwa putra mahkota sangat menderita karena penyakitnya dan hampir tidak bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya.

Pada hari Jumat tanggal 14 bulan ini, Dr. Wagener mendatangi saya untuk berbicara tentang kondisi putra mahkota, dengan memperhatikan kenyataan bahwa gejala penyakitnya tetap sama dan pasien sangat lemah hari-hari terakhir ini. Perawatan tidak bisa membawa perbaikan, dokter itu menduga ini pasti berasal dari kondisi bahwa tempat tinggal yang dipilih oleh pasien tidak cocok bagi kamar perawatan dan udara maupun penerangan kurang memadai. Selanjutnya diragukan apakah obat-obatan yang disediakan diminumnya dan juga diduga bahwa makanan tidak diperhatikan secara cermat, sementara dokter juga tidak menganggap perlu bila pasien dikelilingi oleh sejumlah wanita dan para pengunjung yang menengok.

Ketika saya menyampaikan keinginan kepada Sultan dengan adanya keterangan dari dokter untuk bisa berbicara tentang kondisi putra mahkota dengannya, dia bertanya apakah dokter yang merawatnya sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan dokter Jawa Waidin di sini, yang segera akan ditanggapi. Pada petang tanggal 15 Pebruari, setelah selesai berkonsultasi, kedua dokter itu memberitahu saya bahwa kondisinya tidak berbahaya dan mereka hanya perlu memperhatikan bahwa aturan-aturan yang ada tidak diikuti secara ketat dan mungkin juga perlu diberikan obat lain selain yang disediakan.

Keesokan harinya bersama Sultan saya mengunjungi putra mahkota di ranjangnya dan saya dikejutkan oleh penampilannya yang sangat lemah. Sultan yang saya beritahu tentang hasil pemeriksaan kedua dokter dan tindakan yang dianggap perlu olehnya, dengan tegas menyatakan akan memperhatikan agar aturan-aturan itu bisa ditaati, dan secara pribadi bersama saya mengunjungi bangunan-bangunan lain yang terletak di pekarangan putra mahkota untuk menjelaskan kepada saya bahwa semua itu kurang memenuhi persyaratan yang diajukan oleh dokter kecuali ruangan tempat putra mahkota dirawat.

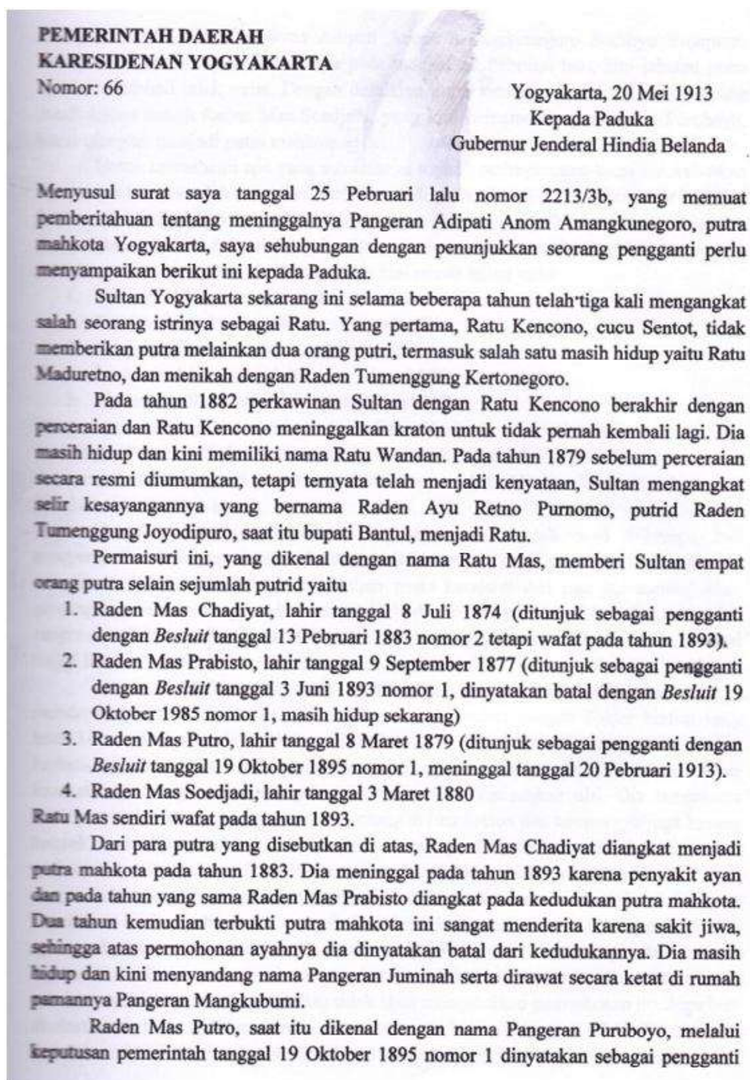
Beberapa hari kemudian, berita tentang kondisi pasien membaik sampai pada petang tanggal 20 Pebruari Dr. Wagener memberitahu saya bahwa tiba-tiba penyakitnya menunjukkan gejala yang sangat tidak menguntungkan dan pasien sepanjang hari tidak sadar. Pada petang yang sama, Sultan memanggil saya agar datang ke kraton yang segera saya laksanakan. Setibanya di sana, saya menjumpai putra mahkota dalam kondisi tidak sadar dan Dr. Wagener memberitahu saya bahwa semua harapan untuk sembuh sudah lenyap. Atas permohonan dokter itu, saya memberitahu Sultan saat itu bahwa dia harus bersiap apabila dalam beberapa jam putranya meninggal.

Tanpa sadar kembali, putra mahkota meninggal pada petang yang sama. Karena gejala-gejala yang mendahului kematian itu tidak sama seperti pasien disentri, dugaan muncul bahwa penyakit itu memerlukan pengobatan yang berbeda, tetapi tidak ada kepastian yang diperoleh tentang hal ini.

Residen Yogyakarta

Sumber: koleksi RM Pramutomo

Gambar 6.3 Arsip Surat Rahasia Residen Belanda kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 66 tertanggal 20 Mei 1913



PEMERINTAH DAERAH
KARESIDENAN YOGYAKARTA
Nomor: 66

Yogyakarta, 20 Mei 1913
Kepada Paduka
Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Menyusul surat saya tanggal 25 Pebruari lalu nomor 2213/3b, yang memuat pemberitahuan tentang meninggalnya Pangeran Adipati Anom Amangkunegoro, putra mahkota Yogyakarta, saya sehubungan dengan penunjukkan seorang pengganti perlu menyampaikan berikut ini kepada Paduka.

Sultan Yogyakarta sekarang ini selama beberapa tahun telah tiga kali mengangkat salah seorang istrinya sebagai Ratu. Yang pertama, Ratu Kencono, cucu Sentot, tidak memberikan putra melainkan dua orang putri, termasuk salah satu masih hidup yaitu Ratu Maduretno, dan menikah dengan Raden Tumenggung Kertonegoro.

Pada tahun 1882 perkawinan Sultan dengan Ratu Kencono berakhir dengan perceraian dan Ratu Kencono meninggalkan kraton untuk tidak pernah kembali lagi. Dia masih hidup dan kini memiliki nama Ratu Wandan. Pada tahun 1879 sebelum perceraian secara resmi diumumkan, tetapi ternyata telah menjadi kenyataan, Sultan mengangkat selir kesayangannya yang bernama Raden Ayu Retno Purnomo, putrid Raden Tumenggung Joyodipuro, saat itu bupati Bantul, menjadi Ratu.

Permaisuri ini, yang dikenal dengan nama Ratu Mas, memberi Sultan empat orang putra selain sejumlah putrid yaitu

1. Raden Mas Chadiyat, lahir tanggal 8 Juli 1874 (ditunjuk sebagai pengganti dengan *Besluit* tanggal 13 Pebruari 1883 nomor 2 tetapi wafat pada tahun 1893).
2. Raden Mas Prabisto, lahir tanggal 9 September 1877 (ditunjuk sebagai pengganti dengan *Besluit* tanggal 3 Juni 1893 nomor 1, dinyatakan batal dengan *Besluit* 19 Oktober 1985 nomor 1, masih hidup sekarang)
3. Raden Mas Putro, lahir tanggal 8 Maret 1879 (ditunjuk sebagai pengganti dengan *Besluit* tanggal 19 Oktober 1895 nomor 1, meninggal tanggal 20 Pebruari 1913).
4. Raden Mas Soedjadi, lahir tanggal 3 Maret 1880

Ratu Mas sendiri wafat pada tahun 1893.

Dari para putra yang disebutkan di atas, Raden Mas Chadiyat diangkat menjadi putra mahkota pada tahun 1883. Dia meninggal pada tahun 1893 karena penyakit ayan dan pada tahun yang sama Raden Mas Prabisto diangkat pada kedudukan putra mahkota. Dua tahun kemudian terbukti putra mahkota ini sangat menderita karena sakit jiwa, sehingga atas permohonan ayahnya dia dinyatakan batal dari kedudukannya. Dia masih hidup dan kini menyandang nama Pangeran Juminah serta dirawat secara ketat di rumah pamannya Pangeran Mangkubumi.

Raden Mas Putro, saat itu dikenal dengan nama Pangeran Puruboyo, melalui keputusan pemerintah tanggal 19 Oktober 1895 nomor 1 dinyatakan sebagai pengganti

ayahnya dengan nama Pangeran Adipati Anom Amangkunegoro Sudibyo Rojoputro Narendro Mataram. Karena wafatnya pada tanggal 20 Pebruari lalu, kini jabatan putra mahkota kembali tidak terisi. Dengan demikian putra satu-satunya dari Ratu Mas yang masih hidup adalah Raden Mas Soedjadi, yang kini bernama Pangeran Ario Puruboyo, harus diangkat menjadi putra mahkota.

Untuk memahami apa yang selanjutnya terjadi, perlu pertama-tama menyebutkan bahwa dua tahun setelah kematian Ratu Mas, jadi pada tahun 1895, seorang selir lain dari Sultan yaitu Raden Ayu Retno Sriwulan diangkat menjadi Ratu. Dia masih hidup. Setelah pengangkatannya, ia menerima gelar Ratu Kencono dan memberikan delapan orang putrid serta lima putra kepada Sultan, yang kini masih hidup yaitu

1. Pangeran Mangkukusumo, lahir pada tahun 1877
2. Pangeran Tejokusumo, lahir pada tahun 1881
3. Pangeran Notoprojo, lahir pada tahun 1885
4. Pangeran Adikusumo, lahir pada tahun 1893
5. Raden Mas Suratmojo, lahir pada tahun 1897

Dengan ini masih perlu dicatat bahwa Ratu Kencono merupakan cucu dari Sultan Hamengku Buwono II dan karena alasan kesehatan selama beberapa tahun terakhir ini, dia menarik diri dari kehidupan umum. Dia tidak pernah lagi keluar dari kraton dan minta ijin dalam acara-acara resmi.

Hanya sekali saya bertemu dengannya dan setelah saya beberapa kali menyampaikan keinginan kepada Sultan untuk bisa mengenal permaisurinya. Dia saat itu tampaknya hanya sebentar muncul dalam pesta kerajaan dan saat itu menunjukkan penampilan seorang yang cerdas, sangat berbeda dengan para putri lain di kraton. Dia sangat ramah tetapi sebaliknya seperti yang terbukti dari informasi lebih lanjut, dikenal tinggi hati.

Karena Ratu Kencono tidak menunjukkan kesan sakit menurut saya, saya mendapatkan informasi itu dalam pembicaraan terpercaya dengan dokter kraton yang telah 14 tahun mengenalnya. Dokter itu memastikan bahwa Ratu Kencono selalu sangat berhati-hati dan jangan sedikitpun mencampuri urusanya, sehingga bisa diduga bahwa kesehatannya yang lemah merupakan alasan untuk memisahkan diri. Dia tampaknya tidak pernah berhubungan dengan orang-orang di luar kraton dan tampaknya juga kurang banyak berbicara; setidaknya dari sejumlah orang saya mencoba untuk mengetahui perbuatannya tetapi sia-sia juga; informasi tentang hal itu belum saya peroleh.

Sultan selalu memperhitungkan keinginan Ratu Kencono, yang terbukti dari cara bagaimana dia berusaha untuk mengabulkan keinginan yang disampaikan kepada Sultan agar pada kesempatan kunjungan resmi di kraton suatu tari serimpi atau bedoyo dipagelarkan. Tanpa permaisurinya, yang selalu melakukan pengawasan atas para penari, sebelum meminta pendapatnya Sultan tidak akan mengabulkan permohonan itu. Juga bisa disebutkan bahwa salah satu putri Ratu Kencono belum lama ini telah dilamar oleh Susuhunan dan akan diangkat menjadi Ratu di Solo.

Baik dengan wafatnya putra mahkota maupun setelah itu, saya bertemu beberapa kali dengan Sultan dan saya melihat waktunya belum siap untuk membicarakan penunjukkan seorang pengganti dari pihak saya. Tampaknya dari pihak Beliau ada keraguan tentang hal ini. Hanya sekali (ketika saya dalam salah satu kunjungan menyinggung tentang hal ini) Sultan berbicara sepatah kata tentang hal itu dan menyatakan:"Saya berharap segera bisa membicarakan tentang penggantian almarhum putra mahkota. Saya harus berpikir matang tentang hal itu".

Bila suatu penunjukkan segera atas seorang pengganti ternyata pasti membuat Sultan merasa senang dan sebaliknya selama beberapa minggu tidak terdengar kabarnya lagi, jelas bagi saya bahwa sehubungan dengan usul ini sejumlah kesulitan muncul. Dengan memperhatikan usia tua Sultan, suatu pembahasan segera tentang perkara ini dianggap perlu dan oleh Beliau pribadi sangat dihargai apabila kesulitan yang muncul bisa teratasi. Saya berangkat pada pagi tanggal 31 Maret 1914 ke kraton setelah sebelumnya menyampaikan kepada Sultan tentang tujuan kedatangan saya. Dalam kunjungan itu juga hadir Pangeran Mangkubumi, saudara Sultan, Pangeran Hangabehi sebagai putra sulung Sultan yang dilahirkan dari selir, dan juga Patih.

Dalam kesempatan sebelumnya ketika pembicaraan penting berlangsung di kraton mengenai anggaran dan reorganisasi yang dibahas, ada kebiasaan bahwa Sultan juga dengan memperhatikan telinganya yang tuli, setelah mengucapkan beberapa kata menyampaikan pendapatnya tentang hal itu, meminta putranya atau patihnya menyampaikan penjelasan. Kali ini (yang sangat menarik) Sultan sendiri berbicara dan dia hanya sekali yaitu ketika dirinya sampai pada akhir penjelasannya meminta kepada para bangsawan tersebut agar memberikan persetujuannya dengan apa yang disampaikan dan diusulkan olehnya.

Menurut adat dan tradisi pribumi (demikian Sultan memulai) putra terakhir saya yang diturunkan oleh Ratu Mas, Raden Mas Soedjadi yang disebutkan di atas, seperti yang kini disebut Pangeran Puruboyo, harus dipertimbangkan untuk menduduki jabatan putra mahkota, tetapi saya menduga karena alasan yang kuat harus menyampaikan kepada Gubernur Jenderal untuk menyimpang dari kebiasaan yang ada dan sebagai ganti Pangeran Puruboyo, saya mengajukan putra sulung yang lahir dari Ratu Kencono, Pangeran Mangkukusumo menjadi putra mahkota.

Sebagai akibat dari berbagai kenyataan yang saya hadapi sendiri, yang pada tahun-tahun belakangan ini berlangsung (Sultan meneruskan) saya telah kehilangan kepercayaan pada putraku Puruboyo, di mana tidak mungkin saya berbicara tentang semua persoalan negara yang penting dengannya dengan cara yang sama seperti biasa saya lakukan dengan almarhum putra mahkota.

Toh sementara putra-putraku lainnya tidak pernah menimbulkan alasan untuk mengeluh, Puruboyo berulang kali melakukannya dan terutama sebagai akibat dari kecerobohannya dan ketidakcermatannya dalam urusan keuangan. Agar dia tidak merepotkan, saya sampai dua kali harus mengorbankan sejumlah besar uang; yang

pertama pada saat perkawinannya di mana (meskipun sebelumnya saya telah mengingatkannya) biayanya jauh melebihi penafsiran sebelumnya, dan yang kedua ketika dia membeli barang-barang sampai senilai f 20.000 dan tidak bisa membayar hutangnya. Jika kini terbukti (demikian menurut Sultan) maka mungkin masih bisa diharapkan bahwa Puruboyo setelah ada peringatan serius tentang pemborosannya dan kecerobohannya, kehidupannya akan lebih baik tetapi sepanjang tahun ini terdapat gejala yang semakin serius sehingga saya kehilangan semua kepercayaan kepada putraku.

Sultan memberitahu saya sebagai berikut. Pada saat itu Puruboyo diserahi untuk mengelola keuanganku pribadi, yang disimpan dalam sebuah almari.di ruangan yang saya tinggali sendiri. Kunci almari itu disimpan oleh Puruboyo. Dalam almari itu terdapat sebuah peti uang dari besi. Dari kunci yang digunakan pada peti itu ada dua, yang satu tersimpan dalam almari dan yang lain saya satukan dengan cincin kunci. Tanpa bantuan Puruboyo saya sendiri atau orang lain tidak bisa membuka peti uang itu. Ketika sekitar setahun lalu saya memeriksa kondisi kas ini, terbukti bahwa terdapat kekurangan f 140.000 yang menurut keyakinan saya tidak diambil oleh orang lain kecuali oleh Puruboyo.

Dengan adanya keterangan oleh Sultan, saya merasa heran karena tidak pernah mendengar sesuatu tentang pencurian ini seperti juga setelah peristiwa itu terjadi selama setahun, yang pasti menjadi suatu kenyataan penting bagi saya bahwa Puruboyo menjadi tercemar di matanya, sebaliknya disampaikan bahwa Puruboyo di antara para pangeran lain tetap menduduki posisi yang sama.

Sebagai jawaban, Sultan menyatakan bahwa saya tidak perlu melupakan betapa kerasnya mendidik dia sebagai ayah untuk mengajukan suatu bukti yang sangat tidak baik tentang seorang anak apabila dia berbicara tentang Puruboyo. Beliau berkata:"Saya tidak pernah bertindak apabila kondisi tidak memaksaku. Jika ini tidak terjadi, saya tidak akan pernah membicarakannya dengan Anda seperti juga saya lakukan terhadap kerabatku. Hanya almarhum putra mahkota yang saat itu saya beritahu tentang hal ini sehubungan apa yang terjadi pada pengelolaan kas yang dijalankan oleh Puruboyo".

Atas pertanyaan saya apa yang telah dilakukan oleh Puruboyo untuk membela diri setelah terbongkar kekurangan ini, Sultan menjawab yang mengejutkan saya bahwa dia menganggap tidak perlu menanyainya tentang hal ini, yakin pada seseorang seperti Puruboyo yang cenderung akan membantah semua itu, tetapi tidak ada gunanya. Dari suatu penyelidikan, Sultan tidak mengharapkan hasil apapun dan dia juga tidak menghendakinya, karena saat itu dia ingin menunjukkan bahwa persoalan itu akan terdengar oleh umum.

Suatu kesalahan dalam catatan tentang pemasukan dan pengeluaran atau dalam perhitungan kondisi kas dianggap tidak mungkin oleh Sultan dan bila dia percaya pada pendapatnya bahwa tidak ada orang lain selain Puruboyo yang bersalah, dia telah mengabaikan interogasi atau penelitian lebih lanjut. Setelah pemberitahuan ini, saya masih harus menunjukkan kepada Beliau (meskipun tampaknya juga mengarah pada

Puruboyo) bahwa bukti kesalahannya toh harus diungkapkan dan tanpa pemeriksaan tenaga ahli atas buku-buku itu juga tetap ada kemungkinan bahwa di sini suatu kesalahpahaman terjadi, sementara tidak tertutup kemungkinan bahwa tidak mungkin untuk menguasai kunci almari besi dan setelah itu mengambil uangnya dan akhirnya Puruboyo (seperti setiap terdakwa lainnya) berhak untuk didengar pembelaannya.

Pada semua pernyataan ini, Sultan menjawab bahwa dia yakin bila tidak seorang lainpun kecuali Puruboyo yang bersalah dan karena itu dia menduga tidak akan mempertimbangkan putranya itu menjadi pewaris tahta. Sultan mengakhiri:"Karena itu demi kepentingan negara dan bangsa, ketika permohonan saya ditanggapi dan Pangeran Mangkukusumo serta bukan Puruboyo yang telah bertindak sebagai seorang pemberani, diangkat menjadi putra mahkota". Pangeran Mangkukusumo, seperti yang terbukti dari laporan itu, lahir pada tahun 1877 dan tiga tahun lebih tua daripada Puruboyo tetapi yang tuntutannya atas jabatan putra mahkota berasal dari kenyataan bahwa ibu Puruboyo lebih dahulu diangkat menjadi Ratu daripada ibu Mangkukusumo.

Karena tidak berhasil mendesak lebih lanjut penyerahan bukti-bukti kesalahan Puruboyo pada kesempatan itu, saya memberitahu Sultan bahwa saya pada mulanya akan mempertimbangkan usul yang dibuat olehnya dan setelah itu akan berbicara dengannya sebelum saya memberitahu Paduka, sementara saya juga meminta Sultan agar memperhitungkan dampak-dampak yang terjadi dari penyimpangan yang diusulkan olehnya terhadap tradisi yang ada.

Saya sementara ini akan memanfaatkan waktu untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang kedua orang pangeran tersebut dari orang-orang yang tampaknya kupercaya, yang terutama disebutkan di sini. Dengan semua pangeran lain di kraton Yogya, juga Puruboyo dan Mangkukusumo umumnya termasuk orang-orang yang sangat berpengaruh dan sederhana, yang memiliki tujuan baik dan (kemudian untuk memenuhi panggilan jabatannya) dengan mudah akan memimpin.

Mereka berdua dididik di kraton dan di masa mudanya belajar membaca, menulis dan berhitung tetapi tidak lagi ada. Persoalan untuk memperluas wawasan mereka tidak ada, karena mereka hanya kadang-kadang berada di luar lingkungan kraton. Sampai sekarang keduanya tidak pernah ikut campur dalam masalah pemerintahan dank karena itu juga sangat jarang berhubungan dengan aparat pemerintah Eropa; di luar pesta-pesta kraton, untuk itu tidak banyak kesempatan tampil bagi mereka.

Sebagai anggota komisi pengawas atas kas Kesultanan, Pangeran Puruboyo secara rutin berhubungan dengan Kontrolir komisi itu yang baik kerajinan dan kecermatannya maupun perhatiannya dalam apa yang terjadi di dunia ini sangat dikagumi olehnya. Juga para pelapor lain sangat memuji Puruboyo karena kemandirian dan keterbukaan hatinya. Penampilan dua orang pangeran ini di muka umum sangat berbeda, seperti yang diketahui sepintas oleh setiap orang. Puruboyo sangat mudah bergaul, dia sangat ramah, selalu mengenal setiap orang yang kebetulan berada di dekatnya, mengajak berbicara dan dikenal menyenangkan di antara semua orang.

Mangkukusumo sebaliknya sangat pendiam dan tertutup, pada kesempatan upacara dia tampak seperti patung Buda dan terbukti tidak peduli terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Pada umumnya saya menggambarkannya sebagai pemuda yang patuh, pendiam di mana sangat sedikit yang tampak dari dirinya. Bila di masa mendatang penilaian mandiri bisa dilontarkan terhadap Puruboyo, Mangkukusumo tampaknya harus memerlukan bimbingan atau tidak bisa berjalan sendiri. Jika Puruboyo melalui usahanya bagi pendidikan yang lebih baik untuk putra-putranya menunjukkan minat pada arah yang baru, tentang Mangkukusumo tidak bisa diharapkan dan dia diduga untuk itu tidak berminat pada apa yang dituntut darinya oleh pemerintah.

Masih perlu disebutkan bahwa kedua pangeran itu menikah dengan putri Pangeran Mangkubumi, kakak sulung Sultan. Puruboyo sebaliknya tidak disukai oleh mertuanya, yang (dengan adanya sifat-sifat pribadinya dan terutama keinginan bebasnya) sangat mudah dipahami. Mangkukusumo kata orang sangat disukai oleh Mangkubumi. Sebagai sesuatu yang sangat menarik di sini akhirnya perlu dicatat bahwa berbeda dengan almarhum putra mahkota, kedua pangeran tersebut (dan terkecuali Puruboyo) sangat jarang tampil di muka umum secara resmi dan berucap dalam kata-kata yang tidak banyak berbeda dengan orang Jawa biasa.

Seperti yang telah disampaikan di atas, para pangeran yang ikut hadir dalam pembicaraan dengan Sultan, sambil menyimpang dari kebiasaan yang ada, tidak ikut terlibat dalam diskusi mengenai penunjukkan seorang pewaris tahta baru dan karena itu saya menganggap sangat penting untuk berbicara baik dengan Pangeran Mangkubumi maupun Patih secara khusus guna menyampaikan pandangan mereka tentang usul yang dibuat oleh Sultan itu. Suatu pembicaraan dengan Pangeran Hangabehi tampaknya tidak diperlukan karena pangeran yang sudah tua dan tidak begitu menonjol ini pada umumnya tidak banyak ikut campur dalam pemerintahan dan jika dia berani menyampaikan penilaian tentang permintaan Sultan, toh pasti tidak akan saya libatkan.

Dalam suatu perjalanan bersama dia menuju tanah perkebunannya di Pakem, saya memberi kesempatan Pangeran Mangkubumi untuk mengungkapkan pendapatnya kepada saya lewat pembicaraan baik tentang peristiwa terakhir di kraton maupun menantunya yang disebutkan tadi. Segala upaya yang saya lakukan untuk mengajaknya bicara ternyata sia-sia dan dengan jawaban yang menyimpang dia juga menolak berbicara. Terbukti pilihan yang dibuat oleh Sultan menurut Mangkubumi sudah sesuai dan dia tidak menyatakan atau meminta apapun kepada saya sehubungan dengan hal itu.

Untuk memahami situasi itu, dengan ini saya kira perlu mencatat bahwa Pangeran Mangkubumi tampaknya tidak mau terlibat sama sekali. Tentang kepercayaan dari pihaknya kepada para pejabat Eropa di sini tidak ada persoalan. Karena pengaruhnya yang besar pada Sultan, di antara para bangsawan lain dan pejabat pribumi dia sangat ditakuti. Selanjutnya dia merupakan salah satu pangeran di kraton yang melontarkan penilaian kurang menguntungkan di luar. Dia disebut sangat sombong, yang mencoba

kerabatnya, suatu sifat yang tampaknya dimiliki juga oleh banyak orang. Juga jangan dilewatkan bahwa Pangeran Mangkubumi bukanlah sahabat termasuk bagi orang Eropa, di mana mungkin ada kecenderungan untuk disampaikan kepadanya.

Segera setelah pembicaraan dengan Mangkubumi, saya mendapatkan kesempatan untuk membahas persoalan yang sama dengan patih. Patih tidak tertutup dan meskipun tidak secara utuh toh mengungkapkan secara jelas bahwa usul Sultan membuatnya heran dan kecewa. Biasanya dia mulai dengan mengusulkan bahwa semua yang dilakukan oleh Sultan harus dianggap sebagai berkah. Dia berkata:"Jadi saya bukan hanya berpikir demikian tetapi kita di sini semua juga berpikir". Meskipun ternyata dia juga tidak berani melontarkan pendapat tentang usul Sultan, Danurejo di sisi lain toh menduga meminta perhatian saya pada persoalan berikut ini.

Dia menyatakan, tidak bisa dibantah bahwa Pangeran Puruboyo dahulu mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang diperhitungkannya dan dia juga membenarkan telah memberitahu Sultan sehubungan dengan kelebihan jumlah yang dikeluarkan bagi pesta perkawinannya dan pembelian barang-barang perabotan yang tidak mampu dibayarnya dan ketika itu diambil alih oleh Sultan. Tetapi bila kenyataan ini terjadi empat tahun lalu dan setelah itu tidak pernah ada lagi yang terulang, maka Patih menduga bahwa kecerobohan ini tidak bisa dipersalahkan kepadanya.

Puruboyo juga mengelola kas pribadi ayahnya, Patih tidak menduga dan dia yakin dalam hal ini pasti ada intrik-intrik dari beberapa orang kepercayaan Sultan, yang akan mencemarkan nama Puruboyo. Dia menyebutnya Raden Wedono Atmosewito dan Sulebar. Atmosuwito pasti mengambil kunci almari atas perintah Sultan dari Puruboyo ketika Puruboyo berhalangan karena sakit, dan siapapun bisa berkata apakah dia menyalahgunakannya atau tidak. Juga pertanyaan itu muncul, demikian kata Patih selanjutnya, siapa yang menyerahkan laporan itu kepada Sultan untuk melakukan perhitungan kas setelah Puruboyo sakit, karena ternyata untuk itu toh tidak ada alasan sedikitpun.

Ketika kelemahan itu terbongkar, menurut kata orang Puruboyo telah dikenai tuduhan bahwa dia tidak mengetahui jumlah uang yang diambil dari kas ketika Raden Wedono Atmosuwito datang mengambil kunci, di mana Sultan pasti sangat marah dan putranya harus dipersalahkan. Juga Patih tidak bisa menyatakan bahwa Sultan telah merahasiakan apa yang terjadi dan baru setelah kematian putra mahkota tuduhan terhadap Puruboyo ini muncul. Untuk membela Puruboyo lebih .lanjut, Patih mengungkapkan bahwa tidak terbukti bila belakangan ini lebih banyak uang yang dikeluarkan daripada biasanya, dan seperti yang diduga bahwa dia masih bisa memiliki sejumlah besar uang, karena itu pemeriksaan rumah bisa dilakukan kepadanya.

Ketika Sultan berpendapat bahwa saya telah memiliki uang yang hilang itu (demikian Puruboyo menurut Patih harus mengungkapkan kepada ayahnya atau jika tidak akan dibuang keluar daerah), dan jika kesalahan saya belum terbukti, mengapa tidak ada penyelidikan yang dilakukan? Saya di sini bisa menyebutkan bahwa Patih menikah

dengan saudari Puruboyo dan dia berulang kali telah menunjukkan sikap permusuhan terhadap Mangkubumi.

Bila baik kematian putra mahkota yang tetap tak terduga dan tidak bisa dijelaskan sampai sekarang maupun kematian beberapa orang keturunan lain yang sah setelah itu (masih seorang bayi) memberikan alasan bagi berbagai komentar, tampaknya sangat penting bagi saya untuk menyebutkan di tempat ini kisah yang beredar di sini, bahwa (meskipun sangat penting) toh bisa memberikan titik terang dalam kegelapan ini.

Seperti yang dikatakan, kematian putra mahkota memang tak terduga. Beberapa minggu saja dia menderita sakit dan sifat penyakitnya setidaknya tidak segera bisa diakhiri. Juga dua dokter yang merawatnya (Dr. Wagener dan dokter Waidin) sebelum kematian sampai sekarang tidak bisa menemukan pernyataan yang masuk akal dan perkembangan ini karena itu sangat tidak bisa mereka pahami maupun mereka jelaskan, karena lima hari terakhir sebelum kematiannya gejala-gejala sakit (disentri) sama sekali lenyap.

Kematian putra tunggalnya dari permaisuri yang sah juga merupakan teka-teki dan sangat menarik, segera setelah tersebar desas-desus bahwa Sultan bermaksud meminta agar anak itu ditunjuk sebagai pewaris tahta. Sultan mengangkat sendiri anak itu dan selalu berada di bawah pengawasan istrinya Ratu Kencono. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Wagener kepada saya, segera setelah kematian putra mahkota anak itu tiba-tiba sakit dan tidak menunjukkan gejala lain kecuali kejang-kejang, meninggal setelah beberapa jam.

Dari tiga putra yang lahir lewat Ratu Hemas, yang selama kehidupan Sultan diangkat menjadi putra mahkota, yang pertama meninggal karena sakit kepala (kata orang), yang kedua sakit jiwa dan yang ketiga belum lama ini meninggal. Jika kini Puruboyo sebagai putra terakhir Ratu Hemas yang masih hidup menjadi putra mahkota, seperti yang diduga umum, maka dia juga tidak akan bertahan lama, menurut dugaan orang-orang umum.

Jabatan ini tampaknya telah diisi oleh sejumlah orang yang belum saatnya (demikian para pengamat persoalan kraton mengatakan), suatu ramalan dari Sultan HB VI, ayah dari Sultan sekarang. Dengan kisah itu mereka berusaha menyampaikan bahwa Sultan HB VI pada mulanya tidak memberikan persetujuan pada perwakinan putranya dengan Raden Ayu Retno Purnomo, kemudian Ratu Hemas, dan baru setelah berkali-kali ada desakan dari pihak putranya, untuk itu raja mengabulkan. Penolakan Sultan HB VI merupakan akibat dari kenyataan bahwa raja tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayah Retno Purnomo.

Ketika akhirnya Sultan HB VI mengalah dengan memberikan persetujuan, Sultan mengajukan syarat bahwa wanita itu tidak akan pernah diangkat menjadi Ratu. Kemudian hal tersebut dilaksanakan meskipun saya melarangnya, jadi dia menambahkan kepada putranya namun keturunannya tidak akan pernah bisa menaiki tahta Yogya. Ramalan itu

sekarang terpenuhi dan lebih tepat dikatakan telah terwujud. Saya tidak berani menjamin kebenaran dari praduga yang mungkin muncul.

Ketika usaha lebih lanjut dari pihak saya untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa terbaru di kraton tetap sia-sia, saya menemukan waktu untuk membicarakan usul yang dibuat oleh Sultan dengannya sekali lagi dan saya mengunjungi Beliau dengan tujuan ini pada pagi tanggal 25 April 1913. Sebelumnya saya telah mengajukan permohonan dalam pembicaraan itu agar tidak ada orang lain siapapun juga yang ikut hadir dengan harapan bahwa dia mungkin akan lebih bebas dalam mengungkapkan pendapat daripada yang terjadi sebelumnya.

Saya masih memulai dengan meminta perhatian Paduka, yang menurut pendapat saya kesalahan Puruboyo pada tuduhan yang ditimpakan sehubungan dengan pencurian uang kas itu terbukti tidak meyakinkan dan kemungkinan baik kesalahan dalam menghitung uang kas maupun campur tangan pihak ketiga dengan tujuan untuk mencemarkan nama Puruboyo tetap ada. Sultan menjamin saya saat itu bahwa menurut keyakinan pribadinya tidak ada orang lain selain Puruboyo yang bisa mendapatkan uang yang hilang itu.

Beliau berkata, Puruboyo sendiri yang memegang kunci almari dan selain itu dia serta Sultan tidak pernah mengijinkan orang lain masuk ke ruangan. Sultan menambahkan bahwa ketika dirinya memberitahu saya pada kesempatan kunjungan sebelumnya tidak mau meminta pertanggungjawaban Puruboyo, dia tidak sepenuhnya menegaskan kebenaran itu karena segera setelah perhitungan dibuat ternyata dia memang melakukannya.

Puruboyo (Sultan meneruskan) saat itu melaporkan kekurangan kepadanya, segera jawaban disiapkan dan berkata bahwa kunci kedua dari peti uang (dahulu juga disimpan dalam almarhi) telah hilang dari situ, yang tuduhannya juga disampaikan kepada saya, sehingga saya menganggap tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Ketika Anda setelah keterangan saya ini masih belum yakin tentang kesalahan Puruboyo (Sultan mengatakan lebih lanjut) maka saya harus meminta perhatian Anda, selain itu tidak perlu membahas kekurangan dalam kas saya. Toh saya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk bisa mempertimbangkan putra saya Mangkukusumo menduduki jabatan putra mahkota sebagai pengganti Puruboyo. Saya menganggap Puruboyo tidak cocok karena sifat-sifatnya untuk menggantikan saya. Sifatnya tidak baik, dia terlalu ceroboh. Orang tidak akan percaya kepadanya dan dia akan membawa negeri ini dalam bencana, saya yakin. Sebaliknya saya memiliki harapan yang baik dari putra saya Mangkukusumo.

Terhadap penilaian seorang ayah atas putranya, saya tidak bisa banyak berkomentar (kedua pangeran itu hanya sekilas saya kenal). Sultan mengakhiri, permohonan ini saya buat hanya demi kepentingan negeriku; tidak seorangpun yang bisa menegakkan pengaruh dan saya juga tidak akan mengajak bicara siapapun termasuk Ratu

Kencono. Keterangan terakhir ini sangat menarik karena Ratu Kencono adalah ibu Mangkukusumo yang sangat berkepentingan.

Jelas pada saya bahwa dalam pembicaraan ini terbukti bila untuk sementara setidaknya tidak ada perubahan dalam pandangan Sultan terhadap Puruboyo. Dengan tegas Sultan meminta saya agar membantu permohonannya kepada Paduka Gubernur Jenderal saat saya berpamitan dan juga menuntut keputusan segera. Apakah dengan memperhatikan masa depan dan kepentingan negeri itu dan penduduknya permohonan Sultan yang diminta itu perlu dikabulkan, merupakan suatu pertanyaan yang sekarang ini masih belum terjawab.

Terutama perlu disampaikan bahwa terlepas dari apakah tuduhan penyelewengan dalam hal keuangan yang diajukan terhadap Pangeran Puruboyo ini benar atau tidak, tampaknya penunjukkan pangeran ini menjadi putra mahkota dalam kondisi tersebut tidak akan terjadi. Meskipun harus diakui bahwa karena sifat-sifat pribadinya dia melebihi pangeran lain di kraton di masa depan bila berada di bawah bimbingan seorang pejabat pemerintah untuk menjadi penguasa di kraton Yogyakarta, terhadap penunjukkannya sikap permusuhan ayahnya yang telah menyatakan tidak mempercayainya dan tidak bisa bekerjasama dengannya, merupakan kendala yang sulit diatasi.

Seperti yang diakui sendiri oleh Sultan, bila dengan pengangkatan seorang lain selain Puruboyo menjadi putra mahkota, penyimpangan dari tradisi terjadi karena apabila hal itu dilakukan – untuk mencegah kesulitan di masa mendatang oleh Sultan terutama suatu pernyataan tertulis perlu dibuat, di mana dengan mengungkapkan alasan yang memotivasinya Sultan harus mengumumkan bahwa ada keinginan mutlak untuk tidak mempertimbangkan Puruboyo menduduki jabatan sebagai putra mahkota, yang juga berhak untuk menggantikan ayahnya.

Tetapi apakah dalam kondisi yang disampaikan ini terpenuhinya keinginan Sultan dari sudut pandang politik bisa diterima, saya menduga harus meragukan dengan berbagai alasan. Pertama-tama dengan ini saya akan memikirkan sifat-sifat calonnya yang diuraikan sebelumnya, yang tidak akan memberikan jaminan bahwa dirinya akan menjadi penguasa yang baik di masa mendatang. Baik kurangnya kepandaian maupun kurang sesuainya dengan semangat zaman sekarang ini, yang juga bagi seorang Sultan di suatu kerajaan Jawa merupakan syarat mutlak, Mangkukusumo jelas mencoba untuk tetap berpegang teguh pada semua tradisi Jawa. Dia dibantu oleh banyak bangsawan yang dengan memiliki kepentingan tertentu, terutama di antaranya adalah mertuanya Pangeran Mangkubumi yang berada di belakang layar. Tidak mudah untuk menjadikan Mangkukusumo sebagai penguasa yang baik dan setidaknya pertama-tama demi kepentingan rakyatnya diperlukan pembaharuan dari pihak pemerintah.

Selain keberatan yang bertumpu pada sifat-sifat pribadi Mangkukusumo terhadap pengangkatannya menjadi putra mahkota, dari pihak saya masih ada keberatan serius lainnya yang saya kira perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Meskipun sangat

jarang keluar kecuali dalam upacara, toh sudah bukan rahasia lagi apabila di kraton pribumi seperti Yogyakarta selalu ada intrik-intrik untuk bisa mencapai kedudukan tinggi dan terhormat dan sering untuk mencapai tujuan itu semua cara dihalalkan (meskipun juga buruk). Juga peristiwa terakhir di kraton baik kematian putra mahkota dan keturunannya yang sah secara tiba-tiba maupun aksi yang dilancarkan terhadap Puruboyo menimbulkan dugaan bahwa ada suatu kelompok yang bekerja untuk mempertimbangkan keturunan Ratu Kencono bagi kedudukan Sultan menggantikan keturunan Ratu Hemas.

Sultan tampaknya tidak terlepas dari pengaruh kelompok ini dan kini jika keinginan Beliau terpenuhi dan Mangkukusumo diangkat menjadi putra mahkota, maka juga tujuan kelompok ini akan tercapai. Bila kenyataan yang disampaikan di atas membenarkan dugaan ini, saya menduga bahwa ada alasan dalam hal ini untuk bertindak sangat hati-hati dan pengambilan suatu keputusan tentang penunjukkan seorang putra mahkota selama mungkin harus ditunda.

Pengisian kekosongan putra mahkota secara terburu-buru menurut saya tidak akan menguntungkan kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan hanya akan terjadi untuk mengabulkan keinginan Sultan tua yang pemberani dan simpatik ini. Meskipun sudah mencapai 75 tahun, Sultan menunjukkan kesan sangat tegas dan juga ada kesempatan bahwa dia akan menjalankan pemerintahan selama beberapa tahun lagi. Jika seorang putra mahkota ditunjuk, maka pemerintah (terlepas dari kondisi khusus) juga wajib untuk mengangkatnya menjadi Sultan.

Jika sebaliknya jabatan ini untuk sementara tetap dibiarkan tidak terisi, dengan penunjukkan seorang pengganti bisa ditunggu sampai bisa dipastikan siapa dari para calon ini di masa mendatang yang memberikan paling banyak jaminan bagi pemerintahan yang baik dan maju, sementara dengan wafatnya Sultan sebelum penunjukkan seorang putra mahkota terjadi, pemerintah akan tetap bebas sama sekali dalam memilih penggantinya dan pejabat baru bisa memenuhi semua syarat yang diajukan tanpa perlu memperhatikan bahwa persyaratan ini tidak akan diterima.

Pendeknya saya dengan hormat memberi Paduka pertimbangan untuk tidak terburu-buru menunjuk putra mahkota karena alasan yang telah disampaikan di atas dan memerintahkan saya agar membuat laporan kepada Sultan dengan pernyataan bahwa ketika ada penyimpangan dari tradisi dan penunjukkan tidak dilakukan menurut tradisi melainkan menurut pilihan bebas, pemerintah tidak yakin bahwa Pangeran Mangkukusumo merupakan sosok yang paling cocok, karena pemerintah ingin untuk sementara usul itu dipertimbangkan.

Residen Yogyakarta
Liefrinck

Sumber: Koleksi RM Pramutomo

Gambar 6.4 Arsip Surat Rahasia Sultan Hamengku Buwono VII kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 1558/14 tertanggal 6 Mei 1914

Sumber : *Mailrapport* nomor 1558/14

Setelah pengantar ini, saya memberitahu ayah saya (Residen Yogya) bahwa selama beberapa hari ini saya telah bertanya kepada Pangeran Arya Adipati Danurejo apakah ayah telah membicarakan sesuatu dengannya tentang kesalahan pegawai saya Wedana Atmasuwita. Dia memberi saya jawaban bahwa nasib wedana ini sepenuhnya berada di tangan saya. Setelah saya menerima jawaban dari Pangeran Arya Adipati Danureja ini, saya memberi perintah untuk memecat Wedana Atmasuwita dari jabatannya dan mengusirnya dari kraton dan atas dasar bahwa selama dia menjadi orang kepercayaan saya, dia telah menipu putraku Kyai Pangeran Ario Puruboyo, mayor pada staf umum, dengan menuduh telah berbuat buruk serta melaporkan hal itu kepada raja.

Di sini adalah bagaimana kasus tersebut berlangsung. Pada saat itu saya telah memerintahkan putraku Kyai Pangeran Aryo Puruboyo untuk menghitung uang. Setelah uang itu diberikan oleh saya untuk dihitung olehnya, putraku menghitung uang itu. Setelah menghitung, dia melaporkan jumlahnya kepadaku, tetapi (menurut bukti kemudian) dilaporkan jumlah yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya ada. Pada kesempatan ini putraku diberitahu oleh cucuku Lurah Atmo Condrokusumo, bahwa dalam menghitung itu dia keliru dan telah melaporkan jumlah yang lebih besar daripada yang sebenarnya ada, karena dia (Atmo Condrokusumo) melihat bahwa ada setumpuk uang kertas tebal dan tipis (yang dihitung untuk jumlah yang sama), tetapi putraku merasa bahwa perhitungan sudah benar dan dengan demikian tidak melakukan kesalahan.

Karena alasan ini uang itu tidak lagi dihitung. Tentang pembicaraan antara putraku dan cucuku, saya tidak mendengar apapun karena saat itu saya sibuk membuat catatan sendiri. Setelah perhitungan selesai, saya bertanya kepada putraku berapa banyak jumlahnya; jumlah yang dilaporkan olehnya saya catat. Setelah itu saya menyerahkan catatan kepadanya untuk kemudian dia melaporkan bahwa semuanya beres. Setelah itu saya membuat catatan dalam kotak tentang uang itu, menguncinya dan saya menyerahkan perintah kepada putraku agar memasukkan peti itu dalam almari. Setelah semuanya selesai, cucuku Lurah Atmocondro Kusumo menemui Wedana Atmo Suwito, yang diberitahu bahwa ada kesalahan telah terjadi dalam perhitungan seperti yang disebutkan di atas.

Beberapa hari setelah itu, Atmosuwito memberitahu saya bahwa uang saya hilang. Saya marah dan memerintahkan agar putraku Kyai Pangeran Puruboyo dipanggil, yang saya perintahkan untuk membawa peti uang. Saya membukanya dan menyerahkan kepada putraku dengan perintah agar menghitung uang yang ada. Pada saat perhitungan terbukti bahwa jumlahnya lebih sedikit daripada yang ada dalam catatan saya. Putraku memberitahu saya bahwa kunci (yang hilang) yang tersimpan dalam peti uang itu hilang. Saya bertanya kepadanya bagaimana kunci itu bisa hilang, di mana putraku menjawab tidak mengetahui bagaimana kunci itu bisa hilang.

Atas dasar hal ini, saya mencurigai putraku telah mengambil uang itu. Baru pada hari Sabtu Kliwon tanggal 9 Rabingulakhir tahun Bhe 1844 (7 Maret 1914) semuanya terbukti dengan jelas bahwa keterangan Atmosuwito tidak sama seperti apa yang telah disampaikan oleh cucuku Lurah Atmo Condrokusumo. Jika Atmo Suwito memberitahukan hal yang sama kepadaku seperti apa yang diketahui dari cucuku, saya sangat yakin tidak akan memberitahukan bahwa uangku telah hilang seperti juga aku tidak akan mencurigai putraku mengambilnya.

Dari penjelasan di atas jelas terbukti bahwa Atmo Suwito adalah orang yang jahat, yang sengaja merencanakan untuk membuat nama putraku Kyai Pangeran Aryo Puruboyo mendapatkan nama buruk dan yang telah menipu raja serta bermaksud untuk mengganggu kondisi tenteram di kraton. Jadi saya tidak lama kemudian memecat Atmo Suwito. Jika ayahanda bersama Pangeran Aryo Adipati Danurejo berpendapat harus ada tindakan lain terhadap Wedana Atmo Suwito, saya serahkan kepada kebijakan ayahanda. Juga saya pasrah pada pendapat ayahanda apakah semua ini perlu disampaikan kepada Kakek Paduka Gubernur Jenderal.

Ditulis di Yogyakarta Adiningrat pada hari Rabu, tanggal 10 Jumadilakhir tahun Bhe 1844 (6 Mei 1914).

Penterjemah Bahasa Jawa
W.Engel

Sumber: Koleksi RM Pramutomo

Gambar 6.5 Arsip naskah pandangan resmi Dewan Hindia Belanda (Volksraad) Nomor 1252 tertanggal 11 Juni 1914

Komisarial tanggal 11 Juni 1914 nomor 1252

Dasar : surat Residen Yogya tanggal 30 Mei 1914 nomor 94 tentang penunjukkan pewaris tahta dalam pemerintahan Kesultanan Yogyakarta

Nasehat Dewan Hindia Belanda diajukan dalam rapat tanggal 26 Juni 1914:

Dalam surat pendahulunya kepada residen Yogya tanggal 25 Pebruari 1913 nomor 2213/36 dan 20 Mei lalu nomor 66 sangat rahasia, di mana tentang sakit dan meninggalnya putra mahkota serta tentang penunjukkan pengganti dilaporkan, meskipun Tuan Liefrinck kemudian terbukti melontarkan tuduhan terhadap orang tertentu, ada kesan kuat bahwa kematian putra raja ini diduga tidak disebabkan oleh penyebab alami, tetapi dianggap sebagai korban dari kelompok yang memusuhinya, yang maksud ambisinya tidak pernah terwujud sepanjang hidupnya.

Saling hubungan antara keturunan dan kerabat Sultan begitu rumit dan orang-orang yang tampil ketika menyangkut urusan keluarga akan bertahan pada ungkapannya bahwa hanya ada sedikit wawasan untuk bisa mendapatkan kepastian tentang gambaran drama ini, yang telah terjadi pada awal tahun lalu di kraton Yogyakarta. Sehubungan dengan pernyataan yang dibuat untuk ini mengenai meninggalnya putra mahkota, juga perlu diperhatikan bahwa Sultan setelah sedikit keraguan bermaksud menunjuk seorang pengganti dalam jabatan putra mahkota sambil menyimpang dari tradisi yang ada, yaitu dengan mempertimbangkan putra sulung dari permaisuri sekarang sebagai pengganti putra terakhir dari perkawinannya dengan Ratu Hemas, yaitu Pangeran Ario Puruboyo.

Meskipun telah jelas penyimpangan dari adat ini diduga berasal dari dorongan salah satu pihak di dalam kraton yang sangat berpengaruh pada Sultan tua itu, toh juga ada tempat bagi dugaan bahwa penguasa pribumi bertindak karena takut bahwa dengan mengikuti tradisi Pangeran Puruboyo setelah pengangkatannya menjadi putra mahkota, mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti kakaknya. Tetapi tidak ada gunanya untuk memperdebatkan lebih lanjut persoalan ini karena Sultan sudah sampai pada keputusan untuk menyerahkan pertimbangannya kepada pemerintah agar segera menanggapi usulnya, kini diminta dalam surat Anda tanggal 30 Mei lalu nomor 94 yang juga memuat salinan surat tanggal 1 Maret, telah meminta Pangeran Puruboyo agar diangkat menjadi putra mahkota.

Suatu penyelidikan lebih lanjut membuktikan kepadanya, demikian kata Sultan, bahwa dahulu dia telah mencurigai Pangeran Puruboyo terlibat dalam kasus keuangan dan meskipun dalam pembicaraan terakhir dengan residen mengenai keluhan lain yang dilontarkan saat itu terhadap Puruboyo tidak lagi terbukti, bisa diduga bahwa juga sekarang semua telah berakhir dan dalam pertanyaan selanjutnya, Sultan ingin menjelaskan perubahan sikap dan penilaian ini dengan menyatakan bahwa dia telah menggambarkan Puruboyo terlalu buruk karena terpengaruh oleh kesan pencurian.

Bila Pangeran Puruboyo memang dianggap sebagai yang paling berhak menduduki posisi yang kosong itu dan Sultan kini mengajukan permohonan untuk

Sumber: Koleksi RM Pramutomo

Gambar 6.6 Petikan arsip naskah Surat Perjanjian Politik antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Hindia Belanda tertanggal 18 Maret 1940

TENTANG KESULTANAN

Pasal 1

(1) Kesultanan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan karenanya berada di bawah kedaulatan Sri Baginda Ratu Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal.

(2) Kekuasaan atas Kesultanan diselenggarakan oleh seorang Sultan yang diangkat oleh Gubernur Jenderal.

Pasal 2

Kesultanan merupakan sebuah badan hukum yang diwakili oleh Sultan, oleh *Pepatih Dalem (Rijksbestuurder)* atau oleh yang ditunjuk olehnya.

Pasal 3

(1) Kesultanan meliputi wilayah yang batas-batasnya telah diketahui oleh kedua belah pihak yang menandatangani Surat Perjanjian ini.

(2) Kesultanan tidak meliputi daerah laut.

(3) Dalam hal timbul perselisihan tentang batas-batas wilayah, maka keputusan berada di tangan Gubernur Jenderal.

TENTANG KEDUDUKAN SRI SULTAN

Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi Sri Sultan hanyalah, kecuali jika oleh Gubernur Jenderal dinilai tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan, putra-putra laki-laki dari Yang Mulia Sultan Hamengku Buwono VIII, dengan pengertian bahwa, mengenai pengangkatan ini, para putra laki-laki dari Sri Sultan yang terakhir berkuasa selalu mempunyai hak prioritas di atas putra-putra laki-laki Yang Mulia Hamengku Buwono VIII lainnya dan bahwa, pada tingkatan yang sama, putra laki-laki dari seorang *garwa padmi* (istri utama) harus didahulukan terhadap putra laki-laki seorang *garwa ampéyan*.

Pasal 5

(1) Selama, sesudah kosongnya kedudukan Sri Sultan, belum diangkat seorang pengganti dalam kedudukan ini, begitu pula dalam hal

303

tiadanya atau berhalangannya Sri Sultan, maka wewenangnya dengan persetujuan Gubernur Yogyakarta dijalankan:

a. oleh *Pepatih Dalem*, sejauh mengenai pemerintahan kerajaan;
b. oleh Pangeran Adipati Anom, atau jika ia berhalangan, oleh satu panitia yang ditunjuk oleh Gubernur Yogyakarta, sedapat mungkin dengan persetujuan Sri Sultan, yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota dari antara mereka yang dimaksud dalam pasal empat, sejauh mengenai kekuasaan di dalam Keraton.

(2) Gubernur Jenderal berwenang, sejauh dan selama dipandangnya perlu, mengatur secara lain hal-hal yang dimaksud dalam ayat satu pasal ini dalam hal pelaksanaan kekuasaan Sri Sultan.

(3) Apabila perlu maka Gubernur Jenderal dapat memutuskan bahwa Sri Sultan berhalangan untuk menjalankan wewenangnya.

Pasal 6

(1) Sri Sultan akan dipertahankan dalam kedudukannya selama ia dengan patuh dan tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diakibatkan oleh perjanjian ini ataupun yang akan ditandatangani kemudian berikut perubahan-perubahannya ataupun penambahan-penambahannya, dan selama ia bertindak sebagaimana layaknya seorang Sultan.

(2) Apabila Sri Sultan, menurut pendapat Gubernur Jenderal, tidak mampu lagi menjalankan kekuasaannya karena cacat badaniah atau rohaniah, maka Gubernur Jenderal dapat, bilamana mungkin setelah mendengar pendapat ahli-ahli kedokteran, membebaskan Sri Sultan dari kedudukannya.

TENTANG KEDUDUKAN PANGERAN ADIPATI ANOM

Pasal 7

Seorang dari keturunan seperti yang dimaksud dalam pasal empat dapat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal itu mengenai hak prioritas, diangkat menjadi Pangeran Adipati Anom.

304

Sumber: Roem, M., (ed), Tahta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, Gramedia, Jakarta, 1982.



DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam (ed) 1991, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa,* Sinar Harapan, Jakarta.

D. Larson, G. 1990, *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912 – 1942,* Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.

Dwiyanto, D. 2009, *Kraton Jogjakarta: Sejarah, Nasionalisme dan Teladan Perjuangan,* Paradigma Indonesia, Jogjakarta.

Hadisiswaya, A. M. 2009, *Keraton Under Cover: Penyingkiran Putera Mahkota Asli dalam Perebutan Tahta Keraton Solo,* Pinus Book Publisher, Jogjakarta.

Haryanto, *Kekuasaan Elit, Suatu Bahasan Pengantar,* S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM – Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, Yogyakarta.

Juniarti 2004, *Raja Banawa dari Belanda: Elit dan Konflik Politik Kerajaan Banawa 1888 – 1942,* Intra Putaka Utama, Semarang.

Marihandono, D. 2008, *Sultan Hamengku Buwono II: Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa,* Banjar Aji, Jogjakarta.

Meinsma, J. H. (ed) 1941, *Babad Tanah Djawi,* Prosa, 'sGravenhage.

Mernissi, F. 1994 , *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan,* Mizan, Bandung.

Moedjanto, G. 2002, *Suksesi dalam Sejarah Jawa,* Penerbitan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta.

Moedjanto, G. 1987, *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram,* Kanisius, Yogyakarta.

Moertono, S. 1981, *State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period 16th to 19th Century,* Monography Series No.43, Cornell Univ. Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Ithaca.

Pakempalan Pengarang Serat ing Mangkunegaran 1993, *Babad KGPAA Mangkunegara I,* Yayasan "Mangadeg" Surakarata dan Yayasan Centhini Yogyakarta.

Pramutomo 2006, *Pengaruh Bentuk Pemerintahan Pseudoabsolutisme Pasca Perjanjian Giyanti 1755 Terhadap Perkembangan Tari Jawa Gaya Yogyakarta,* Tesis Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

Ricklef, M.C. 2003, *Jogjakarta di Bawah Sultan Mangkubumi (1749 – 1792): Sejarah Pembagian Jawa,* Terjemahan Hartono Hadikusuma dan E Setyawati Alkhatab, Matabangsa, Jogjakarta.

Ricklefs, M. C. 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004,* PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.

Roem, M. (ed) 1982, *Tahta untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX,* Gramedia, Jakarta.

Sjamsuddin, N. 1991, *Dimensi-Dimensi Vertikal dan Horizontal dalam Integrasi Politik,* Jurnal Politik Nomor 8, PT Gramedia, Jakarta.

Sugiono, M.P. 2008, *Sang Demokrat Hamengku Buwono IX: Dokumen Setelah Sri Sultan Mangkat,* Yayasan Budi Luhur Jakarta, Jakarta.

Suryo, D. 2001, *Khasanah Budaya Kraton Jogjakarta II,* IAIN Sunan Kalijaga dan Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia, Jogjakarta.

Tashadi 1978, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Jogjakarta,* Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Wijaya, A. (ed) 1982, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta.

Winarno, B. 2007, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses,* MedPress, Yogyakarta.

Woodward, M.R. 1999, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan,* LkiS, Jogjakarta.

Yin, R.K. 1997, *Studi Kasus :Desain dan Metode,* penerjemah: M. Djauzi Mudzakir, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surat Kabar

Gatra 2010, *Hamengku Buwono XI: Raja atau Ratu*, 26 Juni.

Harian Jogja 2010, *Sultan Perempuan Timbulkan Pro Kontra*, 17 Mei.

Kedaulatan Rakyat 2010, *Sri Sultan HB X Soal Suksesi Kraton: Raja Yogya Bisa Perempuan*, 15 Mei.

Minggu Pagi 2010, *Wacana Perempuan Raja Yogya Gusti Yudha: Ngogrejh-ogreh Paugeran!*, Edisi Minggu Ketiga.

Radar Jogja 2010, *Kultural-Struktural Penuhi Kriteria*, 20 Juli.

Radar Jogja 2010, *Prabukusumo: Pemimpin Masa Depan DIJ*, 20 Juli.

Dokumen

Arsip Surat Rahasia Residen Belanda kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 2213/36 tertanggal 25 Februari 1913, KITLV.

Arsip Surat Rahasia Residen Belanda kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 66 tertanggal 20 Mei 1913, KITLV.

Arsip Surat Rahasia Sultan Hamengku Buwono VII kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 1558/14 tertanggal 6 Mei 1914, KITLV.

Arsip naskah pandangan resmi Dewan Hindia Belanda (Volksraad) Nomor 1252 tertanggal 11 Juni 1914, KITLV.



TENTANG PENULIS



Susilo Harjono, terlahir sebagai anak desa di kaki Merapi, Jogjakarta, 15 Juni 1986 silam. Tahun 2005 ia menyelesaikan bangku SMA Negeri 2 Yogyakarta, dan sesudah lolos seleksi UM UGM 2005 ia sempat menikmati dua semester di Fakultas Biologi UGM. Pasca bencana Gempa Jogja pada Mei 2006, ia memutuskan untuk pindah haluan. Melalui proses seleksi kembali, ia pada akhirnya menemukan labuhan terakhirnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan menyelesaikan studinya pada tahun 2011.

Berbagai organisasi, kegiatan, dan aktivitas telah penulis jalani. Namun, sedari awal hidup di bawah langit Jogjakarta membuatnya tertarik untuk lebih jauh menyisir tirai-tirai politik Dinasti Mataram yang abu-abu itu. Bermodalkan jaringan yang memadai, penulis termotivasi untuk mengungkap tema tentang tahta Jogja yang kemudian menjadi salah satu skripsi terbaik di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM. Tulisan inilah yang kemudian sampai di tangan para pembaca dalam bentuk buku.

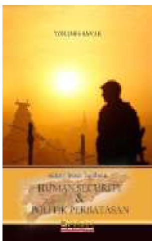
PUBLIKASI YANG DITERBITKAN

Jurusan Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM



Arya Budi 'Partai Aceh: Transformasi GAM?', 288 + xvi hlm, 14x21cm, 2012

Kajian kepartaian dewasa ini dipenuhi oleh analisis kompetisi dan dinamika struktur internal partai politik di ranah nasional. Tatanan demokrasi yang mendunia akhirnya tidak mampu lagi menghadirkan sebuah studi lahirnya partai politik dalam konteks lokal. Di titik inilah, buku ini menghadirkan kekosongan tersebut dari fakta kemunculan dan praktek penyelenggaraan partai politik lokal di Indonesia. Hadirnya Partai Aceh sebagai praktek partai lokal pertama di Indonesia—setelah empat dekade sejak pemilu 1955—perlu kita lihat lebih jauh sebagai penampakan baru politik di Indonesia. Banyak pengamat, politisi, dan pemerhati kepartaian melihat hadirnya partai lokal sebagai sebuah alternatif atas kejumudan politik yang diperankan oleh partai-partai di parlemen. Namun apakah kemunculannya memang sebuah gagasan alternatif? Lantas atas dasar apa dan dalam bentuk seperti apa partai lokal hadir dalam dekade post-Soeharto saat ini? Studi dengan mengambil Partai Aceh sebagai refleksi partai politik lokal di Indonesia, buku ini berusaha menjawab pertanyaan 'mengapa' dan 'bagaimana' Partai Aceh hadir dan kemudian menjadi *leading party* dalam praktek partai politik lokal pasca pemilu 2009.



Yohanes Sanak, 'Human Security dan Politik Perbatasan', 220 + xx hlm, 14x21cm, 2012

Buku ini mencermati bagaimana wilayah perbatasan di kelola di Indonesia melalui kebijakan negara. Dalam buku ini penulis menyoroti ketimpangan dalam kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia, yang lebih menekankan pada elemen wilayah ketimbang elemen penduduk atau manusia yang tinggal di wilayah perbatasan. Lebih spesifik lagi, penekanan pada aspek wilayah ini

juga didominasi oleh perspektif keamanan yang bersifat konvensional di mana ancaman cenderung diasumsikan selalu datang dari luar.

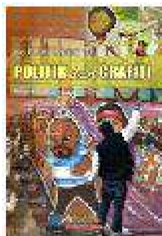
Dengan melihat ketimpangan tersebut melalui analisis *Strength–Weakness–Opportunity* dan *Treath* atau SWOT, penulis mengajukan argumentasi untuk mengedepankan pendekatan *human–security* sebagai pendekatan alternatif untuk pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih komprehensif. Patut dicatat bahwa dalam argumentasinya yang dituangkan dalam buku ini, penulis sama sekali tidak berpretensi untuk mengabaikan elemen wilayah sama sekali, namun, yang menjadi salah satu poin penting dalam buku ini, adalah keniscayaan pengolaan wilayah perbatasan dengan memperhatikan elemen wilayah dan penduduk secara berimbang di mana ketimpangan dalam pengelolaan malah akan menimbulkan potensi ancaman terhadap kedaulatan negara yang lebih serius.



Josef Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. 353 halaman, 24 cm x 15,5 cm.

"... Lain daripada itu, dalam Negara yang menganut paham demokrasi seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semboyan daripada demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of, by, and for the people). Kalau semboyan ini benar-benar hendak direalisir, maka tidaklah cukup dengan melaksanakannya pada tingkat Nasional atau Pusat saja tetapi juga pada tingkat Daerah.

Hal ini berhubungan langsung dengan kenyataan bahwa di dalam wilayah Negara itu terdapat masyarakat-masyarakat setempat yang masing-masing diliputi oleh keadaan khusus setempat sehingga masing-masing masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan/kepentingan-kepentingan khusus yang berbeda dari Daerah ke Daerah. Mengusahakan, menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat itu (mengurus rumah tangga Daerah) sebaiknya diserahkan kepada rakyat Daerah itu sendiri. Jadi dasar, maksud, alasan, dan tujuan kedua bagi adanya pemerintah Daerah adalah: pelaksanaan demokrasi, khususnya demokrasi di/dari bawah *(grass roots democracy).*

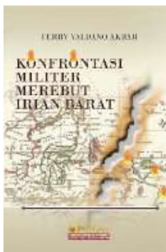


Rias Fitriana Indriyati, *Politik dan Grafiti,* 146+xxiv hlm, 14x21cm, 2011

Belum banyak orang menyadari bahwa politik tidak saja berada dalam ranah lembaga-lembaga formal, seperti Negara, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dalam konteks ini, politik sebenarnya bersifat

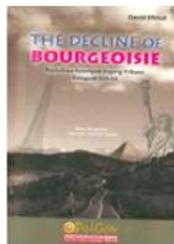
sangat *fluid*, termasuk dalan hal strategi penyampaian aspirasi politik yang dapat dilakukan melalui media gambar.

Perspektif *daily politics* dipakai untuk melacak fenomena *grafitti* di Yogyakarta. *Grafitti* sebenarnya merupakan media komunikasi politik sehari-hari yang berisi berbagai masalah sosial, ekonomi, budaya dan politik. Dengan kata lain, dunia grafitti telah mengalami "kromonisasi" atau penjinakan (*domestication*). Sebagai konsekwensinya, sebagai bahasa visual, *grafitti* bukan lagi sekedar menjadi media dari representasi realitas sehari-hari versi *grafitter*, tapi *graffiti* juga telah menjadi media dari representasi dari kelompok-kelompok dominan.



Ferry Valdano Akbar, *Konfrontasi Militer Merebut Irian Barat*, 148 hlm, 14x21 cm, 2011

Pasca 10 tahun perjanjian KMB, pembicaraan mengenai status wilayah Irian Barat antara pihak Indonesia dan Belanda masih juga menemui jalan buntu. Padahal, dalam perjanjian KMB 1949 masalah Irian barat ini akan diselesaikan tidak lebih dari 1 tahun. Baik Belanda dan juga Indonesia memiiki kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri. Bagi Belanda yang negerinya hancur paska perang dunia 2, wilayah Irian Barat ini menjadi harapan baru sebagai sumber daya untuk kembali membangun perekonomian negaranya. Sedang bagi Indonesia hilangnya wilayah ini berarti sebuah serangan telak terhadap kedaulatan dan eksistensi NKRI. Bagi Bung Karno, Presiden Indonesia pada masa itu, perundingan yang berlarut-larut sudah tidak ada artinya. Sejak itulah Indonesia melakukan pembangunan kekutan militer besar-besaran untuk merealisasikan hal itu. Tujuannya hanya satu, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu pertiwi apapun caranya…



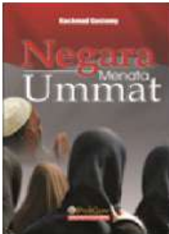
David Efendi, The decline of bourgeoise: Runtuhnya kelompok dagang pribumi Kotagede XVII-XX), 276 hlm, 14,5x21 cm, 2010.

Perjalanan dan dinamika pedagang di Nusantara menjadi penting untuk melacak keberadaan borjuasi yang muncul di abad ke-19 dan ke-20. Kelompok borjuis ini lahir dan bermunculan di beberapa daerah (borjuasi etnis) yang kemudian bertemu dalam perdagangan Nusantara sebagai akibat dari perkembangan perdagangan dan pelayaran. Pelacakan kelas borjuasi ini juga dapat diawali dengan pembacaan terhadap kategori Clifford Geertz yang memilah tiga kelompok dalam masyarakat; yaitu golongan Abangan sebagai penduduk desa, kaum Santri sebagai kaum pedagang, dan Priyayi sebagai keturunan bangsawan atau birokrat.



Titik Widayanti, Politik Subaltern (Pergulatan Identitas Waria), 148 hlm, 14,5x20,5 cm, 2010.
Masih minimnya kajian subaltern di Indonesia menginspirasi penulis untuk menghadirkan studi tentang Pergulatan Identitas Waria yang dibingkai dalam politik subaltern. Keberadaannya sebagai komunitas subaltern sebenarnya memiliki berbagai dimensi yang sangat menarik untuk dikaji baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Buku ini mencoba mengawali kajian tentang waria dari perspektif politik, khususnya berkaitan dengan pembentukan dan pergulatan identitasnya sebagai komunitas subaltern.

Rachmad Gustomy; Negara Menata Umat, 242 hlm, 14x21 cm, 2010.



Pemikiran di balik buku ini berangkat dari olokan sambil lalu bahwa selama ini membaca 'masyarakat Islam' adalah sekedar mendefinisikan wacana tokoh besar yang diwawancarai. Baik ilmuwan, cendekia, ulama atau tokoh Islam yang dijadikan sampling analisis penelitian yang selama ini seakan mewakili "Rakyat Islam Indonesia": Siapa (?), bagaimana (?), seperti apa (?) mereka. Olokan itu menjadi refleksi serius bagi penulis, sehingga memunculkan sebuah ambisi untuk melihat konstruksi masyarakat Islam dalam relasi kekuasaan dengan negara. Penulis menemukan celah kecil, meminjam psikoanalisa pada identifikasi proses bawah sadar (sub-conciousness) yang ternyata masih membentuk pola tertentu.

Rizza Kamajaya; Transformasi Strategi Gerakan Petani, 192 hlm, 14x21 cm, 2010.



Pasca jatuhnya rezim otoritarian Order Baru, konstelasi politik di Indonesia diwarnai dengan munculnya berbagai organisasi rakyat dalam berbagai sektor, seperti buruh, nelayan, kaum miskin kota dan tentunya petani. Partisipasi politik yang macet selama kurun waktu 32 tahun telah menemukan momentum kebangkitannya. Dalam hal ini kehadiran organisasi rakyat yang dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk aktualisasi gerakan bawah tanah yang hidup secara sembunyi-sembunyi sewaktu rezim Orde Baru berkuasa.
Gerakan petani Batang menjadi salah satu kasus yang muncul di era transisi demokrasi. Melalui sebuah wadah kolektif perjuangan yang bernama Forum

Perjuangan Petani Batang atau disingkat FPPB, para petani Batang berusaha mengambilalih kembali tanah mereka yang diakuisisi negara ketika rezim Orde Baru berkuasa. Strategi reclaiming menjadi sebuah titik tolak petani untuk mewujudkan cita-citanya tersebut.



Wigke Capri Arti; Politik Subaltern: Pergulatan Identitas Gay, 192 hlm, 14x21 cm, 2010.

Lebih dari dua puluh tiga tahun yang lalu, organisasi gay pertama di Indonesia didirikan di Yogyakarta. Organisasi tersebut memberi warna berbeda bagi dunia gerakan di Yogyakarta yang telah diisi dengan berbagai organisasi. Organisasi tersebut bernama PGY, Persaudaraan Gay Yogyakarta.
Buku ini melacak tentang gerakan gay di Yogyakarta dari kuntum terciptanya gerakan hingga sekarang ini. Buku ini juga memotret pertarungan wacana gay dengan wacana kuasa agama dan negara yang telah berlangsung selama ratusan abad.



Purwo Santoso, Hasrul Hanif, AE Priyono; Securing the pace and the direction of Indonesian Democratization, 90 hlm, 13x21 cm, 2010

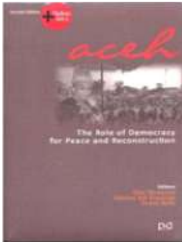
Buku ini berisi tentang desain asesmen demokrasi yang ditawarkan oleh Tim Fisipol UGM terkait dengan relasi *power, wealth* dan *democracy.* Model tersebut terkait dengan relasi power antara proses produksi kemakmuran dan distribusi kemakmuran yang seimbang. Buku ini berisi empat (4) buah chapter, pertama *"In search for alternative models of democracy for Indonesi".* Chapter kedua "Power, wealth, and democracy: Reconstructing welfare-based power relations". Chapter yang ketiga "Action-reflection" dan keempat berisi kesimpulan .



Bayu Dardias Kurniadi (ed.); Praktek Penelitian Kualitatif: Pengalaman dari UGM, 310 hlm, 14,5 x 20,7 cm, 2011

Buku ini adalah kumpulan tugas mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM pada semester lima (5) proses kuliah mereka. Tugas-tugas tersebut dipakai sebagai salah sat penilaian akhir dalam mata kuliah Metode Analisa Kualitatif yang diampu oleh Bayu Dardias Kurniadi, MA, M.Pub.Pol bersama Arie Ruhyanto, M.Sc. Dalam mata kuliah

ini, mahasiswa dituntut untuk mampu melakukan dua hal, pertama memahami prinsip dan konsep dasar metode penelitian kualitatif dan kedua mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut ke dalam penelitian yang sebenarnya.



Olle Törnquist, Stanley Adi Prasetyo, Teresa Birks, George J. Aditjondro, Gyda Marås Sindre, The ISAI Aceh Research Group, Murizal Hamzah, The Aceh Participatory Research Team, Dara Meutia Uning; Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction; 435 hlm, 15x21 cm, 2010.

Ketika tsunami pada akhir Desember 2004 semakin memperuncing perang saudara di Sri Lanka, Aceh justru mengalami transisi luar biasa dari situasi konflik dan bencana ke arah perdamaian. Provinsi di ujung Pulau Sumatera, yang telah berpuluh tahun berusaha memisahkan diri dari Indonesia itu, kini memulai era baru dalam pembangunan. Yang menarik, sebagaimana dituturkan dalam buku ini, keajaiban itu dimungkinkan oleh adanya proses demokratisasi. Untuk pertama kali, kombinasi intervensi internasional dan keterlibatan rakyat di tingkat lokal;, akhirnya membuahkan hasil. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana proses tersebut bisa terus dipertahankan? Buku ini mengupas jawaban pertanyaan-pertanyaan penting tersebut.



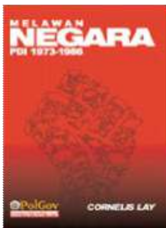
Olle Törnquist, Stanley Adi Prasetyo, Teresa Birks, George J. Aditjondro, Gyda Marås Sindre, The ISAI Aceh Research Group, Murizal Hamzah, The Aceh Participatory Research Team, Dara Meutia Uning; Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction; 435 hlm, 15x21 cm, Versi Indonesia, 2011

Ketika tsunami pada akhir Desember 2004 semakin memperuncing perang saudara di Sri Lanka, Aceh justru mengalami transisi luar biasa dari situasi konflik dan bencana ke arah perdamaian. Provinsi di ujung Pulau Sumatera, yang telah berpuluh tahun berusaha memisahkan diri dari Indonesia itu, kini memulai era baru dalam pembangunan. Yang menarik, sebagaimana dituturkan dalam buku ini, keajaiban itu dimungkinkan oleh adanya proses demokratisasi. Untuk pertama kali, kombinasi intervensi internasional dan keterlibatan rakyat di tingkat lokal;, akhirnya membuahkan hasil. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana proses tersebut bisa terus dipertahankan? Buku ini mengupas jawaban pertanyaan-pertanyaan penting tersebut.



Purwo Santoso dibantu Joash Tapiheru, Analisis Kebijakan Publik, 194 hlm, 15x22 cm, 2010

Selama ini ada kecenderungan dominasi perpektif modernis rasional-komprehensif dalam kajian analisis kebijakan. Sayangnya, dominasi perpektif ini telah mencapai level mendekati hegemonik sehingga menutup mata sebagian besar publik awam tentang keberadaan berbagai perspektif alternatif lain. Analisis kebijakan selama ini identik dengan kerumitan dan kompleksitas yang hanya bisa diatasi oleh mereka yang "ahli". Mitos inilah yang ingin digugat oleh buku Analisa Kebijakan Publik ini. Melalui buku ini kami ingin menunjukkan bahwa analisis kebijakan bukanlah hal yang sedemikian rumit dan kompleks sehingga secara eksklusif diperuntukkan bagi para ahli. Meskipun penulisan modul ini ditujukan untuk menunjang perkuliahan mahasiswa strata 1, namun melalui modul ini kami ingin menunjukkan bahwa semua orang bisa melakukan analisis kebijakan.



Cornelis Lay, Melawan Negara: PDI 1973 – 1986, 15x22 cm, 2010

Perkembangan politik Indonesia selalu mencerminkan kondisi yang tampak diarahkan secara gamblang akan segera tunduk di hadapan kuasa negara. Mencitrakan negara sebagai magnet yang menarik setiap elemen apapun yang kuat berwatak besi, bahkan "mereka" yang berkarat untuk bersanding dengannya, dan lalu mengokohkan hegemoni negara. Namun, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di satu episode silam; 1973-1986, yang secara terperinci dikisahkan dalam buku ini, berkembang menjadi sebuah kutub yang tidak saja melawan kecenderungan, tetapi juga menguras lebih banyak energi penguasa lebih dari satu dasawarsa. Kajian spesifik tentang PDI ini mengungkapkan secara terang-terangan karakter sesungguhnya negara. Tidak hanya membongkar masa lalu, tetapi juga melawan limitasi teori dan perdebatan-perdebatan politik jaman Orde Baru yang terlanjur "mahfum" dipahami dari sudut pandang sentralitas yang mengandaikan negara kohesif dan solid.



Riswandha Imawan, Quo Vadis Demokrasi Indonesia, 15x22 cm, 2010

"...Dalam politik, konflik hanya sebatas perbedaan visi, bukan pribadi. Boleh saja kita berbeda pendapat, pandangan. Namun tidak berarti menghapus sama sekali persamaan yang ada di antara kita. Apalagi kita menganut konsep kekeluargaan dalam bernegara. Kita dibentuk oleh penderitaan yang sama, menghadapi tatangan yang sama, menghirup udara dan meminum air yang sama. Maka seharusnya tingkat toleransi manusia Indonesia menempati rangk8ing tertinggi di antara bangsa-bangsa di muka bumi ini. Bagi ilmuwan politik, ketidakmampuan ini bisa dimaklumi. Mayoritas aktor politik kita adalah politisi karbitan. Mereka hadir dan dibesarkan di bawah payung popularitas orang lain.."